



STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 - 2023

**Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,
dan Pengembangan Daerah
(BAPPEDA)
2018**

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil menyelesaikan penyusunan Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 sebagai revisi dari dokumen SPKD Tahun 2015-2019.

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pelaksanaan pemilu serentak pertama Tahun 2018, Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd berkomitmen untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Komitmen tersebut dituangkan dalam Visi “Membangun NTB Gemilang”, untuk mensejahterakan warga NTB di tanah kelahirannya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 1% (satu persen) per tahun melalui pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis desa prioritas secara bertahap dan berkesinambungan. Harapannya adalah agar penanggulangan kemiskinan ini dapat lebih efisien, efektif dan terintegrasi, yang dalam pelaksanaannya dibiayai melalui sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa maupun Non Government Organization (NGO), masyarakat, dan stakeholder pembangunan lainnya.

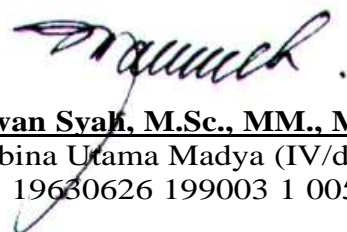
Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 ini merupakan pedoman dan acuan dalam perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga seluruh pelaku pembangunan daerah dapat bersinergi dan bekerjasama dalam mewujudkan “NTB Gemilang” untuk kesejahteraan bersama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 30 November 2018

Mengetahui,

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB,



Ir. Ridwan Syah, M.Sc., MM., MTP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630626 199003 1 005

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Dasar Hukum	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
Bab II Kondisi Umum Daerah	8
2.1. Kondisi Geografis	8
2.2. Kondisi Demografis	15
2.3. Struktur Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.4. Inflasi Daerah.....	21
2.5. Kesempatan Kerja	23
2.6. Tingkat Pengangguran.....	24
Bab III Profil Kemiskinan Daerah.....	27
3.1. Kondisi Kemiskinan Daerah	27
3.2. Analisis Kemiskinan Provinsi NTB.....	28
Bab IV Determinan Kemiskinan Daerah	35
4.1. Analisis Akar Permasalahan	35
4.2. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi	37
Bab V Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan	99
5.1. Acuan Analisis	99
5.2. Analisis Struktur Pendapat	106
5.3. Analisis Pendapat Daerah	111
Bab VI Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.....	114
6.1. Tinjauan Kebijakan	114
6.2. Tinjauan Kelembagaan.....	163
Bab VII Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah	167
7.1. Isu Strategis Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.....	167
7.2. Rencana Aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	168
Bab VIII Sistem Monitoring dan Evaluasi.....	181
Bab IX Penutup	189

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan dan Luas Wilayah Tahun 2018	8
Tabel 2 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB	10
Tabel 3 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor	10
Tabel 4 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi	11
Tabel 5 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami	12
Tabel 6 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan	12
Tabel 7 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang	13
Tabel 8 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan	13
Tabel 9 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia.....	14
Tabel 10 Status Penyediaan Air Provinsi NTB	15
Tabel 11 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2018.....	16
Tabel 12 Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018 (Jiwa).....	16
Tabel 13 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018.....	17
Tabel 14 Penduduk Usia Kerja Serta Dependency Ratio Tahun 2013–2018	18
Tabel 15 Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Provinsi NTB.....	19
Tabel 16 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja	23
Tabel 17 Tingkat Setengah Penganggur Provinsi NTB Tahun 2016-2017	26
Tabel 18 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018.....	29
Tabel 19 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018 (dalam Ribuan).....	29
Tabel 20 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018	30
Tabel 21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018	32
Tabel 22 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018	32
Tabel 23 Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Di Kabupaten/Kota Se NTB Tahun 2013-2017	39
Tabel 24 Komponen IPM Provinsi NTB Tahun 2013-2018.....	51
Tabel 25 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2014-2018	52
Tabel 26 Jumlah Kasus Kematian Bayi Tahun 2013-2018	53
Tabel 27 Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2013-2018.....	54
Tabel 28 Jumlah Kasus Kematian Ibu Provinsi NTB Tahun 2013-2018	54
Tabel 29 Prevalensi Kurang Gizi tahun 2013-2018	56
Tabel 30 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat S/D Bulan Desember 2017	62
Tabel 31 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2014 – 2017	63
Tabel 32 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2016.....	65
Tabel 33 Cakupan Air Bersih Perkotaan Dan Perdesaan.....	67
Tabel 34 Rasio Ketersediaan Daya Listrik	69
Tabel 35 Jumlah Pelanggan Listrik Dari PLN Cabang Mataram, Sumbawa dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2016.....	70

Tabel 36 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2018	70
Tabel 37 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017.....	74
Tabel 38 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2013-2018.....	76
Tabel 39 Kondisi Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2016-2017.....	76
Tabel 40 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2013 – 2018	77
Tabel 41 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2013-2017	80
Tabel 42 Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2013-2017	82
Tabel 43 Cadangan Pangan Provinsi NTB 2013-2018	82
Tabel 44 Perkembangan Harga Pangan ditingkat Pengumpul di Provinsi NTB	83
Tabel 45 Arus Keluar Masuk Komoditas Pangan Strategis Tahun 2013-2017.....	83
Tabel 46 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2012-2017	88
Tabel 47 Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2013 – 2018.....	90
Tabel 48 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018.....	91
Tabel 49 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor di Provinsi NTB.....	92
Tabel 50 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017	93
Tabel 51 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2017	93
Tabel 52 Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2017	94
Tabel 53 Perkembangan Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan	94
Tabel 54 Perkembangan Ekspor Tahun 2013 – 2017	96
Tabel 55 Perkembangan Jenis Komoditi yang Mendominasi Perolehan Devisa.....	96
Tabel 56 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	97
Tabel 57 Perkembangan Industri NTB Tahun 2013-2017	98
Tabel 58 Alokasi 7 Program Prioritas 2018	100
Tabel 59 Alokasi 13 Program Prioritas 2018	101
Tabel 60 Alokasi Belanja Dalam Mendorong Percepatan Penurunan Angka Kemiskna Pada APBD Perubahan 2017	102
Tabel 61 Perkembangan Komposisi Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTB.....	110
Tabel 62 Sarana, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga : Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas yang Memberi Nilai Tambah	121
Tabel 63 Status Pencapaian Target SDGs untuk Tujuh Ke-1 Tanpa Kemiskinan	127
Tabel 64 Keterkaitan Permasalahan, Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat	133
Tabel 65 Program OPD Terkait Jamkesmas	138
Tabel 66 Program OPD Terkait PNPM	142
Tabel 67 Program OPD Terkait KUR	149
Tabel 68 Pendekatan Wilayah, Isu Strategis untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.....	168
Tabel 69 Isu Strategis untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Pendekatan Bidang Intervensi	169
Tabel 70 Indikator Kerja, Kondisi Kerja Awal RPJMD, Target Capaian, dan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	169
Tabel 71 Misi 1 NTB Tangguh dan Mantap melalui Penuatan Mitigasi Bencana dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah	171
Tabel 72 Misi 2 NTB Bersih dan Melayani melalui Trasformasi	

Birokasi yang Berintegrasi, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi.....	172
Tabel 73 Misi 3 Sehat dan Cerdas melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi Daya Saing Daerah	174
Tabel 74 Misi 4 NTB Asri dan Lestari melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan	175
Tabel 75 Misi 5 NTB Sejahtera dan Mandiri melalui Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Bertumpu pada Pertanian, Pariwisata, dan Industrilisasi	176
Tabel 76 Misi 6 NTB Aman dan Berkah melalui Perwujudan Masyarakat Madani yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan	179
Tabel 77 Pembagian Peran-Peran Pihak dalam Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	183
Tabel 78 Matrik Indikator Kinerja Monitoring dan Evaluasi SPKD Provinsi NTB	184

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB	15
Gambar 2 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2017	19
Gambar 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017.....	20
Gambar 4 Peta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2016	21
Gambar 5 Perkembangan Inflasi Provinsi NTB Tahun 2013-2018.....	22
Gambar 6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB Tahun 2017	24
Gambar 7 Proporsi TPT Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
Gambar 8 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2017	25
Gambar 9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2013-2018.....	27
Gambar 10 Peta Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2017	30
Gambar 11 Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2017.....	31
Gambar 12 Peta Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2017	33
Gambar 13 Indeks Gini Perkotaan, Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB 2013-2018	34
Gambar 14 Peta Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2016	48
Gambar 15 Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2014-2018	49
Gambar 16 Posisi Relatif IPM Tahun 2017.....	50
Gambar 17 Peta Jumlah Gizi Buruk Provinsi NTB Tahun 2016	57
Gambar 18 Peta Angka Harapan Hidup Provinsi NTB Tahun 2017	60
Gambar 19 Kerangka Analisis Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	73
Gambar 20 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB Tahun 2017	75
Gambar 21 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2017	76
Gambar 22 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2018.....	79
Gambar 23 Perkembangan Pola Pangan Harapan Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017.....	80
Gambar 24 Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2013-2017.....	81
Gambar 25 Peta Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi NTB Tahun 2016	88
Gambar 26 Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan selama periode tahun 2013-2017.....	89
Gambar 27 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 (Rp.Milyar)	91
Gambar 28 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB...	107
Gambar 29 Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 (Juta Rupiah).....	108
Gambar 30 Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013 s.d 2017 (Juta Rupiah)	108
Gambar 31 Komposisi Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2017.....	110
Gambar 32 Perkembangan Ruang Fiskal Pendapatan Daerah Provinsi NTB	112
Gambar 33 Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	113

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, untuk itu harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanggulangan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling berintegrasi dengan beberapa program kegiatan lainnya. Sejak dicanangkannya Millennium Development Goals (MDGs) pada KTT millennium pada tahun 2000, sebanyak 191 negara anggota PBB sepakat mengurangi penduduk miskin hingga setengahnya pada tahun 2015 dari jumlah penduduk miskin pada tahun 1990. Dalam SDGs yang merupakan kelanjutan dari MDGs, dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas, semenjak berjalannya SDGs telah banyak terjadi penurunan angka kemiskinan, hingga kini telah terjadi penurunan per Maret 2019 yakni 14,58%. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau; penanganan stunting dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Hasil analisa Bank Dunia yang baru saja dirilis pada bulan April 2018, dinyatakan bahwa pada tahun 2010 persentase penduduk miskin dunia sebesar 15,6 % dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,077 miliar jiwa menurun menjadi 10,9 % dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 783 juta jiwa pada tahun 2018 (worldbank.org, April 2018). Namun lebih lanjut dinyatakan bahwa jumlah penduduk miskin tidak proporsional yang ditandai dengan satu dari tiga penduduk miskin dan kelaparan merupakan anak-anak.

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, yaitu melalui (1) Program bantuan dan jaminan sosial, (2) Program pemberdayaan masyarakat, (3) Program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan (4) Program pro-rakyat untuk melengkapi program-program yang

telah dijalankan. penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Data kemiskinan yang akurat ini digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak tahun 2014-2018 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai macam program penanggulangan kemiskinan, yang telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak lagi dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak – hak dasar dalam menjalani kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera. Penanggulangan kemiskinan masih menjadi perhatian utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama sejak diberlakukannya Undang – Undang tentang Pemerintah Daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018, penurunan angka kemiskinan ditargetkan sebesar 1 % (satu persen) per tahun. Dalam upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dijabat oleh Wakil Gubernur. Selain itu diamanatkan pula tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kabupaten/kota.

Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019, penurunan angka kemiskinan Nasional berbanding lurus dengan Penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2015, persentase kemiskinan Provinsi NTB sebesar 16,54% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 802,29 ribu jiwa. Jumlah ini menurun menjadi 16,02% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 785,56 ribu jiwa pada tahun 2016. Pada tahun 2017, terjadi penurunan kembali menjadi 15,05% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 748,12 ribu jiwa. Jumlah ini menurun menjadi 14,63% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 735,62 ribu

jiwa pada tahun 2018. Pada bulan Maret 2019, terjadi penurunan kembali menjadi 14,56% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 735,96 ribu jiwa.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 18,40% (377,28 ribu jiwa). Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang ada di daerah perdesaan, yaitu sebesar 15,18% (425,01 ribu jiwa). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015, indeks kedalaman (P1) sebesar 2,725% dan indeks keparahan kemiskinan (P2) 0,726%. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 17,55% (378,83 ribu jiwa). Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan di daerah perdesaan, yaitu sebesar 14,82% (407,75 ribu jiwa). Pada tahun ini, indeks kedalaman (P1) sebesar 2,626% dan indeks keparahan kemiskinan (P2) 0,653%. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 16,23% (368,55 ribu jiwa) Sama dengan tahun 2015 dan 2016, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemiskinan di daerah perdesaan, yaitu sebesar 14,06% (379,57 ribu jiwa) Pada tahun 2017 ini, indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 2,629% dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,623%. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 15,66% (384,479 ribu jiwa). Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan di daerah perdesaan, yaitu sebesar 13,69% (363,755 ribu jiwa). Pada tahun ini, indeks kedalaman (P1) sebesar 2,38% dan indeks keparahan kemiskinan (P2) 0,551%. Pada bulan Maret tahun 2019 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 15,74% (396,696 ribu jiwa). Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan di daerah perdesaan, yaitu sebesar 13,45% (374,123 ribu jiwa). Pada tahun ini, indeks kedalaman (P1) sebesar 2,327% dan indeks keparahan kemiskinan (P2) 0,478%.

Kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Amanat dari berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas adalah secara garis besar memerintahkan kepada Daerah untuk penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan berbagai program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Strategi Penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah dan program yang dirancang secara khusus dan terpadu oleh pemerintah, dengan pertanggungjawaban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Secara Nasional penanggulangan kemiskinan menghadapi *triple-track problem*, yaitu kemiskinan yang terus menurun namun penurunannya melambat karena banyaknya penduduk miskin di sekitar Garis Kemiskinan (GK). Kondisi ini mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada di atas Garis Kemiskinan tersebut jatuh ke bawah Garis Kemiskinan (rentan miskin). Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi sebagai pedoman/referensi/acuan oleh para pihak di dalam penyusunan program/kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk:

- a. Merumuskan strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan.
- c. Memandu intervensi program pada setiap OPD dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Tujuan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah adalah:

- a. Mempertegas komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mempercepat penanggulangan Kemiskinan.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) maupun dokumen perencanaan lainnya.
- c. Membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- d. Mempercepat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap pengambilan kebijakan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan.
- e. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan komitmen dalam mendukung tujuan SDGs.
- f. Memperkuat fungsi dan peran TKPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung program-program penanggulangan kemiskinan.

g. SPKD merupakan dasar dalam menyusun rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan yang dimuat di dalam dokumen RPJMD. Selanjutnya, SPKD ini akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi terkait penanggulangan kemiskinan.

Dokumen SPKD merupakan penjabaran konsep penanggulangan kemiskinan yang membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam mengkoordinasikan permasalahan spesifik lokal kemiskinan dengan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. SPKD juga bermanfaat untuk OPD dalam penyusunan Renstra dan Renja terkait program penanggulangan kemiskinan lintas sektor. Rumusan konsep penanggulangan kemiskinan dalam SPKD dapat membantu pihak legislative dalam pengambilan keputusan untuk pengalokasian anggaran pembangunan daerah. Bagi para pihak dan lembaga non-pemerintahan, SPKD bermanfaat dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui CSR, hibah, dan lainnya.

1.3. Dasar Hukum

Kewajiban daerah untuk menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPKD) didasarkan pada regulasi – regulasi sebagai berikut:

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konferensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- e. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- f. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.
- g. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019
- j. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.

- k. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Kondisi Umum Daerah

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Kondisi Demografis
- 2.3. Struktur Pertumbuhan ekonomi
- 2.5. Inflasi Daerah
- 2.6. Kesempatan Kerja
- 2.7. Tingkat Pengangguran

Bab III. Profil Kemiskinan Daerah

- 3.1. Kondisi Kemiskinan Daerah
- 3.2. Analisis Kemiskinan Provinsi NTB

Bab IV. Determinan Kemiskinan Daerah

- 4.1. Analisis Akar Permasalahan
- 4.2. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi

Bab V. Analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan

- 5.1. Acuan Analisis
- 5.2. Analisis Struktur Pendapatan
- 5.3. Analisis Pendapat Daerah

Bab VI. Tinjauan Kebijakan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

- 6.1. Tinjauan Kebijakan
- 6.2. Tinjauan Kelembagaan

Bab VII. Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah

7.1. Isu Strategis Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

7.2. Rencana Aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Bab VIII. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Bab IX. Penutup

Bab II Kondisi Umum Daerah

2.1. Kondisi Geografis

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.738,70 km² (23,51%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.414,5 km² (76,49 %) yang dikelilingi oleh 378 pulau-pulau kecil. Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°05' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah di sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok & Provinsi Bali dan sebelah timur Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas

Secara Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan dan Luas Wilayah Tahun 2018

No	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kab. Lombok Barat	10	122	1.053,92
2	Kab. Lombok Utara	5	33	809,53
3	Kab. Lombok Tengah	12	139	1.208,40
4	Kab. Lombok Timur	20	254	1.605,55
5	Kab. Sumbawa	24	165	6.643,98
6	Kab. Dompu	8	81	2.324,60
7	Kab. Bima	18	191	4.389,40
8	Kab. Sumbawa Barat	8	64	1.849,02
9	Kota Mataram	6	50	61,30
10	Kota Bima	5	38	207,50
JUMLAH		116	1.137	20.153,15

Sumber : DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, 2018

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 – 3.726 m dpl untuk Pulau Lombok, dan 0 – 2.755 m dpl untuk Pulau Sumbawa, dengan klasifikasi ketinggian wilayah 0 - 100 m dpl sekitar 23,76% atau seluas 478.911 Ha, ketinggian 100 - 500 m dpl sekitar 37,39% atau seluas 753.612 Ha, ketinggian 500 - 1000 m dpl sekitar 15,25% atau seluas 307.259 Ha dan lebih dari 1000 m dpl seluas 475.533

Ha 23,60%. Kemiringan tanah didominasi oleh kemiringan antara 15 - 40% seluas 704.619 Ha (34,96%) sedangkan yang paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0 - 2% seluas 338.552 Ha (16,80%). Untuk Pulau Lombok klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2 - 15% seluas 198.616 Ha (9,85%) sedangkan yang paling sempit klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 Ha (1,01%). Sedangkan Pulau Sumbawa klasifikasi kemiringan tanah yang paling luas berkisar antara 15 - 40% seluas 573.903 Ha (28,48%) dan yang paling sempit kemiringan tanah 0 - 2% seluas 214.194 Ha (10,63%).

Geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar, batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan. Batuan kuartar di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuartar di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangiang, gunung api Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral, aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok.

Sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai di satuan wilayah sungai Lombok dan satuan wilayah sungai Sumbawa dibagi menjadi 18 sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/DAS) berdasarkan SK Gubernur NTB No. 147 Tahun 1999. Satuan wilayah sungai (SWS) Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P, Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh.

Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB sebagaimana dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air	Luas (Km ²)	Air Tanah Bebas (Juta M ³ /Tahun)	Air Tanah Tertekan (Juta M ³ /Tahun)
1	Mataram – Selong	2.366	662	8
2	Tanjung Sambelia	1.124	224	22
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4	Empang	345	35	3
5	Pekat	977	220	10
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7	Dompu	375	63	6
8	Bima	1,102	165	16
9	Tawali – Sape	363	36	3

Sumber : Perda RTRW Provinsi NTB, 2009-2029

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2017 temperatur udara maksimum di Provinsi NTB 33,2°C – 33,6°C temperature udara minimum 17°C – 21,4°C dan temperatur rata rata 26,9°C – 27,6°C. Kelembaban udara rata rata 78%-85%, kelembaban udara minimum 57% - 64% dan kelembaban udara maksimum 94% - 96%. Kecepatan angin rata-rata 3 – 5 knots, tekanan udara antara 1003,1 – 1009,8 mb, lamanya penyinaran matahari 69% - 79% dan curah hujan berkisar antara 1.775 mm – 2.874 mm.

Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A	
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
Kab. Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Kab. Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
Rawan Tanah Longsor Tipe B	

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Kab. Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kab. Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kab. Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana gunung berapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Gunung Rinjani	
Kab. Lombok Utara	Daerah Bahaya: Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kab. Lombok Timur	Daerah Bahaya: Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora	
Kab. Dompu	Daerah Bahaya: Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km ²
Kota Bima	Daerah Waspada: jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
Kab. Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang	
Kab. Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km ² yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sori Panda, Sori Iso dan Sori Berano
	Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan
	Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 5 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kab. Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kab. Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana angin topan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 6 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Angin Topan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Lombok Timur	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kab. Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kab. Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kab. Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana gelombang pasang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 7 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagian barat yaitu Sekip dan Ampenan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
Kab. Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kab. Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kab. Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejongong dan Sekongkong
Kab. Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 8 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Kekeringan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, Liuk- Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
Kab. Sumbawa Barat	Sejongong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh
Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok Punik, Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Kekeringan
	Lopok-Lape-kalaning-Tanjungberu Pungkit, Plampang-Empang
Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
Kab. dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Lokasi rawan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tersebar di wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI (*modified mercally intensity*). Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi kawasan rawan banjir sebagai berikut.

Tabel 9 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia

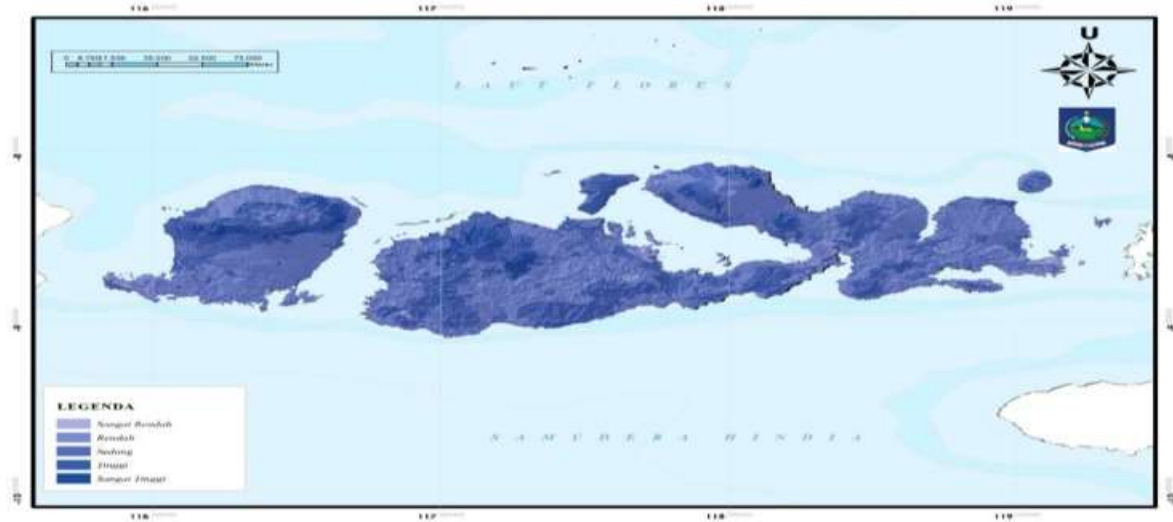
Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Daya dukung air dapat dihitung menggunakan metode jasa ekosistem. Angka persentase yang ditampilkan dari hasil perhitungan jasa ekosistem adalah

persentase lahan yang potensial dalam menghasilkan air. Kelas tinggi sedang dan rendah menunjukkan penyediaan air di Provinsi NTB.

Gambar 1 Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB



Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air pada provinsi NTB selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 10 Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m ³)	Kebutuhan (m ³)			Selisih (m ³)	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampai

Sumber: Bappeda Prov. NTB

Kebutuhan total air di Provinsi NTB sebesar 8.395.152.903 m³ sedangkan ketersediaan air sebanyak 4.735.817.287 m³ sehingga sudah berhasil melampaui kebutuhan dengan jumlah selisih 3.659.335.615 m³.

2.2. Kondisi Demografis

Perkembangan penduduk di Provinsi NTB terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sampai 2017, jumlah penduduk NTB menunjukkan trend meningkat yang umumnya disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 (data diolah), jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2017 berjumlah 4.955.578 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 2.405.080 jiwa dan perempuan sebanyak 2.550.498 jiwa.

Penurunan persentase pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir membuktikan bahwa program pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB), Pendewasaan Usia Perkawinan, dan Generasi Berencana sudah berjalan efektif. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 1,21% atau sebanyak 59.416 jiwa. Data jumlah penduduk dari tahun 2013 – 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2018

Tahun	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)			Sex
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	Ratio
2013	2.244.721	2.385.581	4.630.302	1,41	1,35	1,38	94,1
	48,48%	51,52%	100%				
2014	2.315.234	2.458.561	4.773.795	1,37	1,31	1,34	94,17
	48,50%	51,50%	100%				
2015	2.345.811	2.489.766	4.835.577	1,32	1,27	1,29	94,22
	48,51%	51,49%	100%				
2016	2.375.750	2.520.412	4.896.162	1,28	1,23	1,25	94,26
	48,52%	51,48%	100%				
2017	2.405.080	2.550.498	4.955.578	1,23	1,19	1,21	94,3
	48,53	51,47	100%				
2018	2.433.731	2.579.956	5.013.678	1,19	1,15	1,17	94,33
	51,47	51,46	100%				

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Distribusi atau persebaran penduduk di Provinsi NTB tergolong belum merata karena lebih dari 70% penduduk bertempat tinggal di Pulau Lombok, sementara sisanya berada di Pulau Sumbawa. Ketimpangan distribusi penduduk antara kedua pulau akan berdampak pada munculnya permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti ketersediaan sumber air, kerusakan hutan dan lahan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pendangkalan sungai, dan lain-lain.

Tabel 12 Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018 (Jiwa)

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lombok Barat	620.412	644.586	654.892	665.132	675.222	685.161
2	Lombok Utara	205.064	210.133	212.265	214.393	216.515	218.533
3	Lombok Tengah	881.686	903.432	912.879	922.088	930.797	939.409
4	Lombok Timur	1.130.365	1.153.773	1.164.018	1.173.781	1.183.204	1.192.110
5	Kota Mataram	419.641	441.064	450.226	456.314	468.509	477.476

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Pulau Lombok	3.310.898	3.352.988	3.394.280	3.434.708	3.474.274	3.512.689
6	Sumbawa Barat	121.167	129.724	133.391	137.072	140.890	144.707
7	Sumbawa	426.128	436.599	441.102	445.503	449.680	453.797
8	Dompu	226.218	234.665	238.386	241.888	245.387	248.879
9	Bima	450.976	463.419	468.682	473.890	478.967	483.901
10	Kota Bima	148.645	156.400	159.736	163.503	166.407	169.714
	Pulau Sumbawa	1.399.937	1.420.807	1.441.297	1.461.454	1.481.331	1.500.998
	Provinsi NTB	4.710.835	4.773.795	4.835.577	4.896.162	4.955.578	5.013.687

Sumber : BPS Provinsi NTB 2018

Kepadatan penduduk tertinggi tahun 2018 terjadi di Kota Mataram yaitu 7.78917 Jiwa/Km² disusul oleh Kota Bima dengan kepadatan 817,90 jiwa/km². Kepadatan tertinggi terjadi di daerah perkotaan.

Tabel 13 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lombok Barat	601,68	611,61	621,42	631,13	640,71	650,14
2	Lombok Utara	256,69	259,57	262,21	264,84	117,10	118,19
3	Lombok Tengah	739,67	747,63	755,44	763,07	1.149,80	1.160,44
4	Lombok Timur	712,08	718,62	725	731,08	979,15	986,52
5	Kota Mataram	7.045,29	7.195,17	7.344,63	7.492,89	7642,89	7.78917
	Pulau Lombok	698,69	707,58	716,3	724,83	697,35	705,06
6	Sumbawa Barat	68,16	70,16	72,14	74,13	32,10	32,97
7	Sumbawa	65,01	65,71	66,39	67,05	280,08	282,64
8	Dompu	99,36	100,95	102,55	104,06	36,93	37,46
9	Bima	104,32	105,58	106,78	107,96	206,04	208,17
10	Kota Bima	737,84	753,73	769,81	786,03	801,96	817,90
	Pulau Sumbawa	90,82	92,17	93,5	94,81	97,64	98,94
	Provinsi NTB	233,75	236,88	239,94	242,95	245,90	248,78

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Struktur umur penduduk Provinsi NTB, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, menunjukkan perubahan struktur penduduk dimana kelompok umur usia produktif 15-64 tahun menjadi semakin banyak. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kinerja perekonomian suatu daerah. Pertambahan jumlah kelompok umur usia produktif berpengaruh pada angka ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas (bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

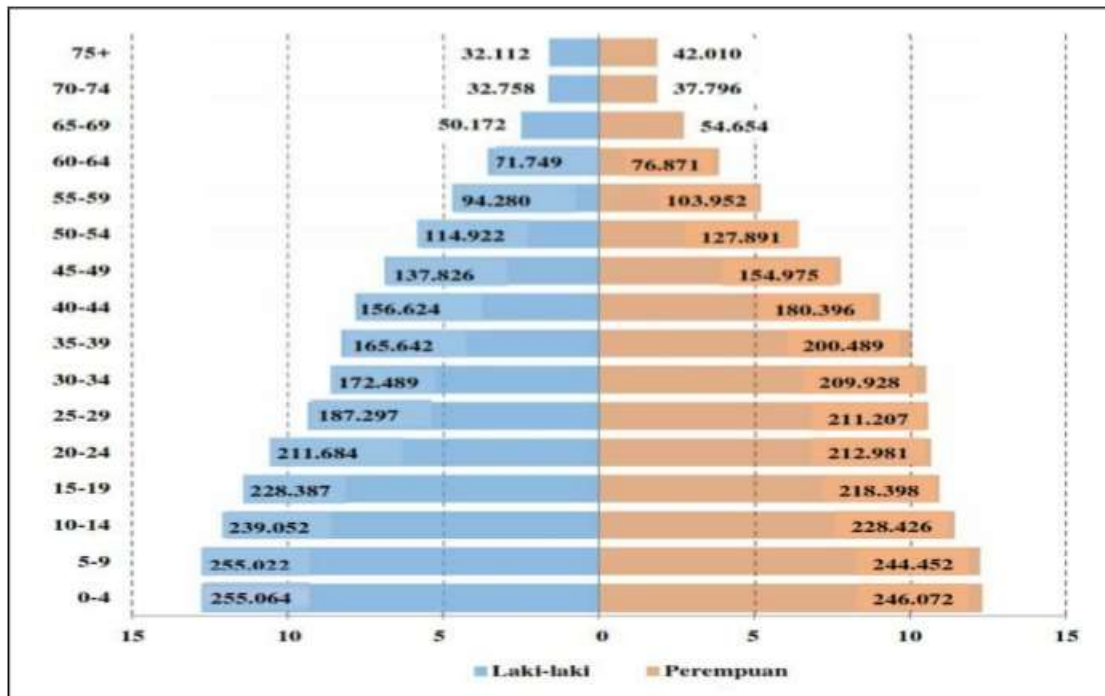
Dependency ratio tahun 2017 sebesar 52,76% artinya setiap 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 52 orang yang tidak/belum produktif.

Tabel 14 Penduduk Usia Kerja Serta Dependency Ratio Tahun 2013–2018

No	Penduduk Usia 15 -64 Tahun	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah	2.984.501	3.098.719	3.145.613	3.192.225	3.237.988	3.282.080
2	Laki-laki (orang)	1.412.416	1.470.701	1.494.165	1.517.829	1.540.900	1.563.026
	(%)	47,33	47,46	47,5	56,52	56,08	55,71
3	Perempuan (orang)	1.572.085	1.628.018	1.651.448	1.674.396	1.697.088	1.719.054
	(%)	52,67	52,54	52,5	50,53	50,29	50,08
<i>Dependency Ratio</i>		55,14	54,06	53,72	53,38	53,04	52,76

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Pemerintah Provinsi NTB perlu menetapkan kebijakan yang mendukung produktifitas pertambahan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebagai bagian dari bonus demografi di NTB sekitar tahun 2027. Selama kurun waktu 2013- 2016, terjadi penurunan jumlah kelahiran. Penurun yang terindikasi dari jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang semakin menurun per tahun. Hal ini sejalan dengan total fertility rate (TFR) NTB tahun 2017 (sesuai SDKI 2017) sebesar 2,5 yang berarti rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburanya 2-3 orang anak, dan angka TFR 2,5 tergolong sedang. Penduduk kelompok umur 65+ yang semakin meningkat dan berkontribusi pada peningkatan Usia Harapan Hidup penduduk NTB. Struktur umur penduduk NTB 2017 dibawah ini, kelompok umur produktif (15-64) lebih mendominasi.



Gambar 2 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2017
 Sumber: BPS NTB, 2017

2.3 Struktur Pertumbuhan Ekonomi

Struktur pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB selama periode tahun 2013 - 2018 mengalami fluktuasi, namun rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir untuk tambang sebesar 7,10 persen, sedangkan untuk non tambang sebesar 6,25 persen. Dari sisi produksi, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 adalah sektor pengadaan listrik, gas dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 10,92 persen dan 39,65 persen. Pada tahun 2015 sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertambangan yaitu sebesar 107,03 persen dan pada tahun 2016 dan 2017 sumber pertumbuhan tertinggi adalah berasal dari sektor jasa keuangan dengan masing-masing besarnya pertumbuhan 12,73 persen dan 9,98 persen. Tabel berikut menyajikan pertumbuhan sektor usaha pada periode 2013 – 2018 secara rinci.

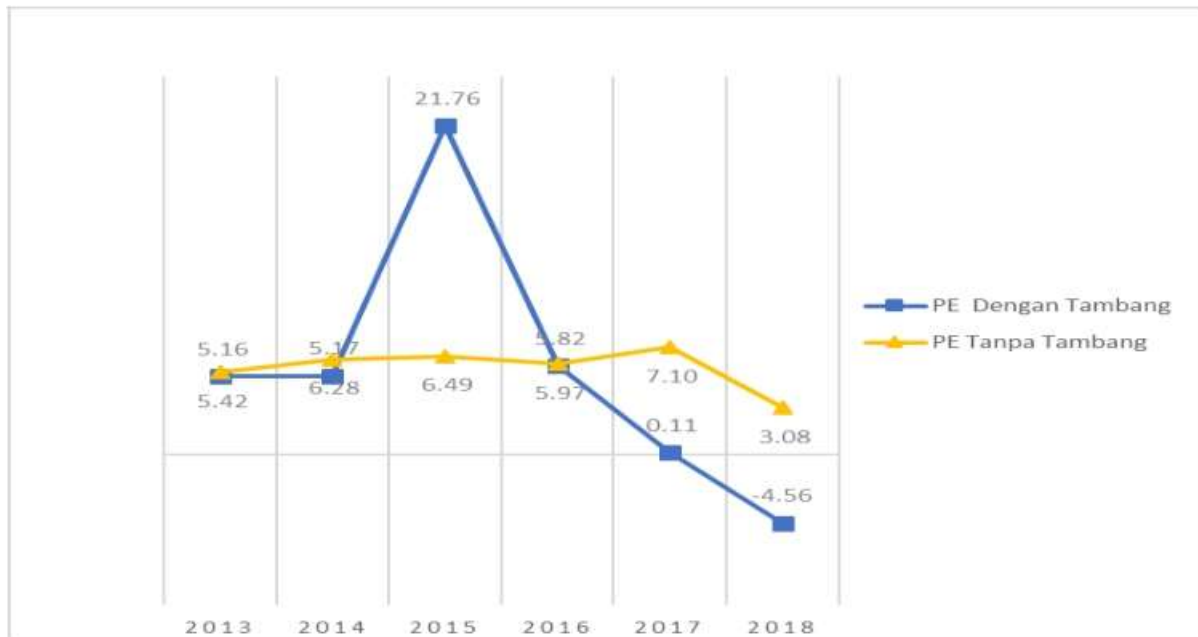
Tabel 15 Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2013-2018

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,29	4,46	6,91	3,50	6,60	1,65
2	Pertambangan dan Penggalian	4,32	-0,14	107,03	5,30	-19,86	-33,71
3	Industri Pengolahan	3,65	3,37	3,12	5,26	5,93	1,33
4	Pengadaan Listrik, Gas	10,92	39,65	0,89	11,25	4,29	1,55
5	Pengadaan Air	-0,88	12,87	3,79	4,89	4,61	-3,64
6	Konstruksi	5,19	7,80	7,69	8,23	7,62	2,41

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,86	7,67	6,05	7,85	8,64	5,45
8	Transportasi dan Pergudangan	5,22	7,48	6,47	4,20	7,19	2,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,64	6,92	5,65	10,09	7,61	-4,59
10	Informasi dan Komunikasi	7,39	8,37	8,34	8,79	8,66	5,41
11	Jasa Keuangan	9,21	7,72	9,32	12,73	9,98	6,77
12	Real Estate	7,84	5,74	6,83	6,18	7,05	4,66
13	Jasa Perusahaan	6,92	7,26	5,76	6,99	5,87	5,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,03	4,98	3,69	2,98	3,30	1,03
15	Jasa Pendidikan	6,03	6,72	7,27	6,04	6,54	5,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,57	6,92	6,77	5,70	7,07	8,08
17	Jasa Lainnya	8,04	7,83	6,21	6,29	7,35	5,33
PE Dengan Tambang		5,16	5,17	21,76	5,82	0,11	-4,56
PE Tanpa Tambang		5,42	6,28	6,49	5,97	7,10	3,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2018

Gambaran pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dengan dan tanpa tambang pada tahun 2013-2018 adalah:



Gambar 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2018

Sumber: BPS Provinsi NTB

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa tambang cenderung lebih stabil dan menunjukkan tren yang meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan tambang menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tiga tahun terakhir terus menurun.

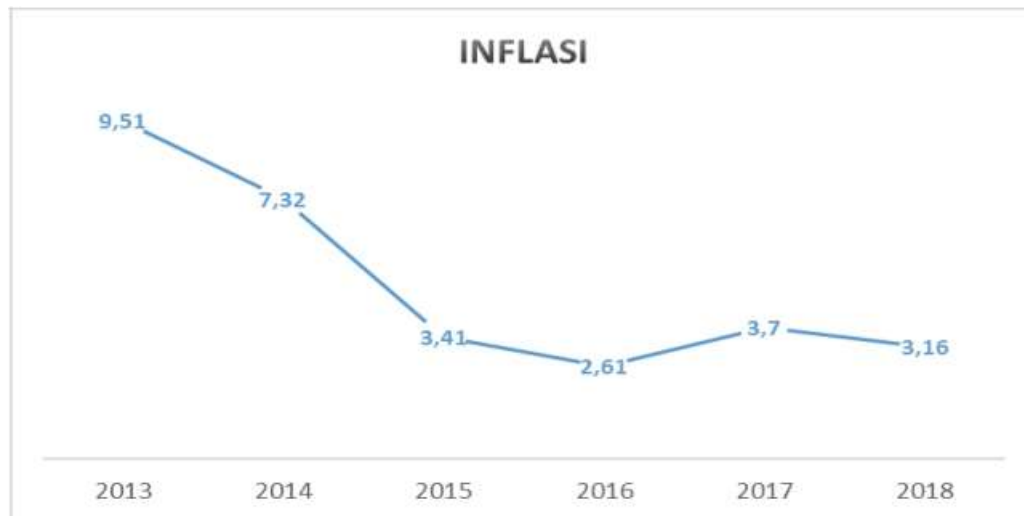


Gambar 4 *Peta Pertumbuhan Ekonom Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2016*
Sumber: BPS Provinsi NTB

2.4 Inflasi Daerah

Tingkat inflasi menunjukkan dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat, yang berdampak pada target penurunan angka kemiskinan. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidاكلancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Bila inflasi semakin tinggi maka akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar kebutuhan minimum (garis kemiskinan) sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu inflasi perlu dikendalikan dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dan jasa, sehingga diperlukan koordinasi yang intens antara Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mewujudkan stabilitas harga barang dan jasa.

Gambar berikut ini menyajikan inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2013 -2018.



*Gambar 5 Perkembangan Inflasi Provinsi NTB Tahun 2013-2018
Sumber: BPS Provinsi NTB*

Tahun 2013 inflasi cukup tinggi yaitu sebesar 9,51 persen, penyebab tingginya inflasi tahun 2013 karena pada tanggal 22 Juni 2013 Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 07.PM/12/MPM/2013 telah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini berdampak cukup signifikan pada pembentukan laju inflasi, tekanan inflasi yang cukup tinggi ini juga disebabkan karena kenaikan harga BBM yang berdekatan dengan tahun ajaran baru, bulan Ramadhan dan Lebaran yang memberikan sumbangan inflasi cukup tinggi disamping itu juga disebabkan karena adanya eksternal faktor seperti pengaruh perekonomian global.

Selanjutnya, tahun 2014 inflasi cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu sebesar 7,23 persen sedangkan tahun 2015 sebesar 3,41 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 2,61 persen. Inflasi yang terjadi pada tahun 2016 ini jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02 persen. Tingginya inflasi pada tahun 2014 disebabkan karena adanya kenaikan harga LPG pada awal tahun, kenaikan harga tarif dasar listrik pada bulan Oktober kemudian juga adanya kenaikan harga BBM pada bulan November. Pada grafik diatas terlihat bahwa inflasi pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2016 cenderung menurun yaitu dari 3,41 persen menjadi 2,61 persen, inflasi tersebut jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02 persen.

Pada tahun 2017 inflasi meningkat menjadi 3,70 persen, bila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi yang terjadi pada tahun 2017 di Provinsi NTB lebih

tinggi dari inflasi nasional yang besarnya 3,62. Meningkatnya inflasi di NTB pada tahun 2017 disebabkan karena adanya kenaikan listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sebanyak tiga kali dalam kurun waktu Januari - Mei 2017 disamping itu juga disebabkan karena anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pada komoditi di sektor pertanian serta erupsi Gunung Agung Bali yang mengganggu distribusi barang. Pada bulan Desember 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,62 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi Nusa Tenggara Barat terjadi karena kenaikan indeks pada kelompok makanan. Komoditi penyumbang inflasi terbesar antara lain Daging Ayam Ras, Air Kemasan, Beras, Rokok Kretek Filter, dan Kontrak Rumah. Sedangkan komoditi yang mengalami deflasi antara lain Tongkol/Ambu-Ambu, Bawang Merah, Telur Ayam Ras, Jeruk, Kembung/Gembung/Banyar/Gembolo/Aso-Aso.

2.5 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan penduduk. Selama periode Agustus 2013 – Agustus 2017, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi NTB adalah pertanian, kemudian diikuti oleh perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan industry. Lapangan usaha yang paling rendah menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha listrik, gas dan air.

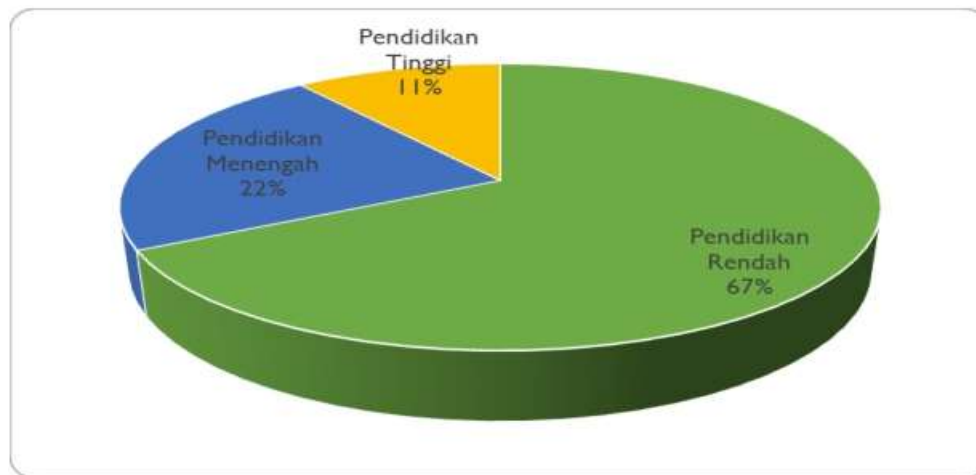
Tabel 16 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian	45,29	43,13	39,01	38,90	29,69
Industri	8,05	8,89	9,38	8,87	14,05
Konstruksi	5,33	5,01	7,36	6,51	6,73
Perdagangan	18,88	20,20	21,58	19,39	23,28
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3,55	3,90	3,28	4,71	4,76
Keuangan	1,52	1,40	1,14	1,76	3,1
Jasa Kemasyarakatan	15,62	15,51	16,47	17,24	16,92
Lainnya	1,76	1,97	1,77	2,62	1,47

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Hal yang menarik adalah adanya penurunan persentase atau porsi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dari 45,29% menjadi 29.69%. Hal ini

berbanding lurus dengan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian yang juga menunjukkan tren yang menurun. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2017 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 1.559.978 orang (67,34%). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 513.943 orang (22,18%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 242.799 orang (10,48%) mencakup 41.481 orang berpendidikan Diploma dan 201.318 orang berpendidikan Universitas.



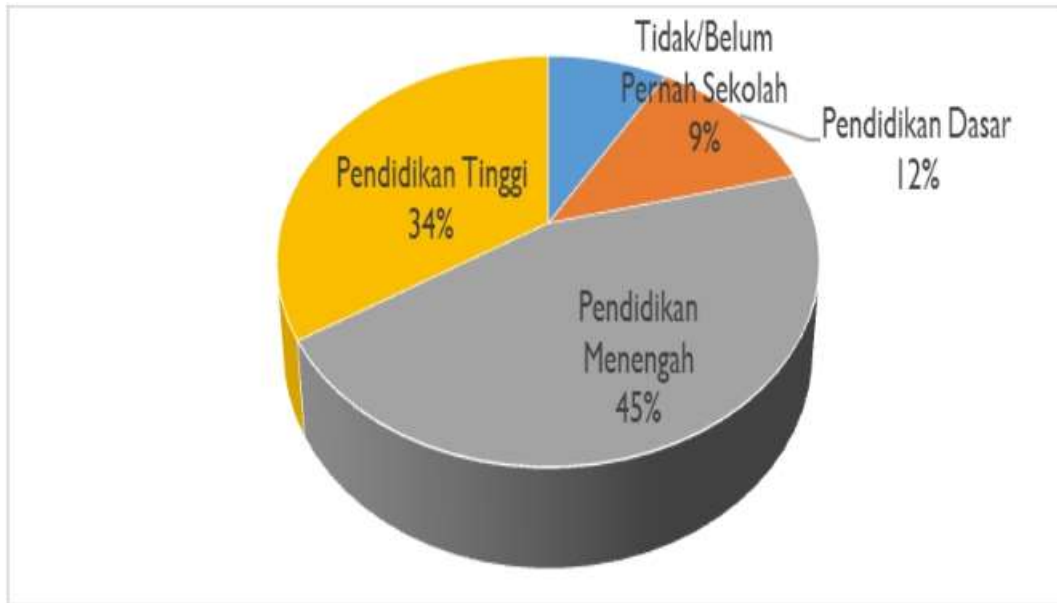
Gambar 6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB Tahun 2017

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB 2018

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang bekerja di Provinsi NTB masuk dalam pendidikan rendah, hal ini akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan yang diperoleh. Dengan kualifikasi pendidikan seperti itu, maka upah yang diperoleh cenderung akan relatif rendah dan kesejahteraan yang minim. Hal ini berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Provinsi NTB.

2.6 Tingkat Pengangguran

Selama periode tahun 2013 – 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB cenderung menurun dari 5,38 persen di tahun 2013 menjadi 3,32 persen atau setara dengan 79.449 orang di tahun 2017, berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,50 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka NTB tahun 2017 lebih rendah 0,62 point jika dibandingkan tahun 2016. Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,32%. Dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2017), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 2,06%.



Gambar 7 Proporsi TPT Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Sumber: BPS Provinsi NTB (diolah)

Hampir separuh penganggur terbuka memiliki tingkat pendidikan hanya pada jenjang pendidikan menengah (45%) sedangkan yang memiliki pendidikan tinggi hanya 34%, sisanya adaah penganggur yang berpendidikan dasar dan tidak/belum pernah sekolah.



Gambar 8 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2017
 Sumber: BPS Provinsi NTB

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu berada di bawah rata-rata nasional, selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017. Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian

Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi faktor pendorong (*driving forces*) dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumbawa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Lombok. Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah dengan TPT tertinggi pada tahun 2017.

Nilai capaian TPT Provinsi NTB sudah sangat baik yaitu pada angka 3 persen, namun bila kita lihat lebih jauh terdapat jumlah setengah penganggur yang cukup tinggi yaitu sebesar 16,70%. Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Tabel 17 Tingkat Setengah Penganggur Provinsi NTB Tahun 2016-2017

No	Tingkat Pendidikan	Tahun	
		2016	2017
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	12,04	16,2
2	Pendidikan Dasar	14,98	18,61
3	Pendidikan Menengah	14,48	17,18
4	Pendidikan Tinggi	9,26	12,72
Tingkat Setengah Penganggur		13,33	16,7

Sumber: BPS Provinsi NTB (diolah)

Tingkat penganggur terbuka di NTB masih cukup tinggi, selain itu tingkat pengangguran terbuka paling banyak ada memiliki pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Meskipun memiliki pekerjaan, namun mereka masih di bawah ambang batas normal, dan dengan penghasilan yang relatif rendah.

Bab III Profil Kemiskinan Daerah

3.1. Kondisi Kemiskinan Daerah

Kondisi kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dalam 6 tahun terakhir, dari 17,25 persen pada tahun 2013 menjadi 14,63 persen pada tahun 2018 atau rata-rata 0,42 persen per tahun. Pada tahun 2018, NTB menempati tertinggi kedua dalam angka penurunan kemiskinan sebesar 1,02 persen setelah Papua Barat (1,98%). Keberhasilan itu mengukuhkan posisi NTB sebagai provinsi paling progresif kedua dalam mengurangi angka kemiskinan secara nasional.



Gambar 9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2013-2018
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Namun, menurut data BPS ketimpangan ekonomi atau indeks gini di Provinsi NTB selama periode Maret 2017 – Maret 2018 mengalami peningkatan. Ironisnya, ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi terjadi di daerah pedesaan. Selain ketimpangan ekonomi, hal yang sama juga terjadi dengan jumlah penduduk miskin secara absolut. Kemiskinan absolut yakni situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Selama periode Maret 2018– September 2018 secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 4,74 ribu orang dari 370.38 orang pada Maret 2018 menjadi 375.12 ribu orang pada September 2018. Sebaliknya penduduk miskin secara absolut di daerah pedesaan berkurang sebanyak 6.58 ribu orang

dari 367.08 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 360.50 ribu orang pada September 2018. Artinya, pendapatan masyarakat di pedesaan justru semakin membaik, jika dibandingkan dengan penduduk di daerah perkotaan yang justru penduduk miskinnya bertambah.

3.2. Analisis Kemiskinan Provinsi NTB

Dimensi kemiskinan yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan berupaya memperkecil jumlah penduduk miskin, mengurangi tingkat kedalaman, dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2018 – Maret 2019, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,500 pada Maret 2019. Untuk pedesaan, indeks kedalaman kemiskinan dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,166 pada Maret 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan cenderung menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk meningkat. Demikian halnya dengan indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan mengalami kenaikan, dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,451 pada Maret 2019. Untuk pedesaan, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,504 pada Maret 2019. Meningkatnya indeks keparahan kemiskinan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah. Menurunnya indeks keparahan kemiskinan di pedesaan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada tahun 2018, Garis Kemiskinan Provinsi NTB sebesar Rp 365.901 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp 314.238. Berikut ini garis kemiskinan di Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota tahun 2013-2018.

Tabel 18 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun						Peningkatan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Lombok Barat	313.632	328.402	353.667	375.684	390.979	412.487	98.855
2	Lombok Tengah	306.311	319.518	335.286	357.337	369.645	386.676	80.365
3	Lombok Timur	321.249	335.651	359.235	382.861	396.668	414.721	93.472
4	Sumbawa	259.474	268.326	272.274	296.914	300.643	320.617	61.143
5	Dompu	233.213	239.936	243.467	263.458	266.483	284.188	50.975
6	Bima	243.339	252.628	255.962	282.854	288.703	308.695	65.356
7	Sumbawa Barat	379.222	395.832	408.991	435.890	444.465	459.065	79.843
8	Lombok Utara	332.073	347.150	363.367	387.265	398.702	416.705	84.632
9	Kota Mataram	359.651	376.178	397.468	414.115	428.754	457.950	98.299
10	Kota Bima	262.967	270.037	274.394	293.048	299.346	323.187	60.220
	Provinsi NTB	278.514	297.907	314.238	333.996	345.341	365.901	87.387

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Pada tahun 2018, GK paling tinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat dengan GK sebesar Rp 459.065 sedangkan yang terendah di Kabupaten Dompu dengan GK Rp 284.188. namun bila dilihat dari peningkatan, daerah dengan peningkatan GK tertinggi pada periode 2013-2018 adalah Kabupaten Lombok Barat dengan perubahan sebesar Rp 98.855 lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

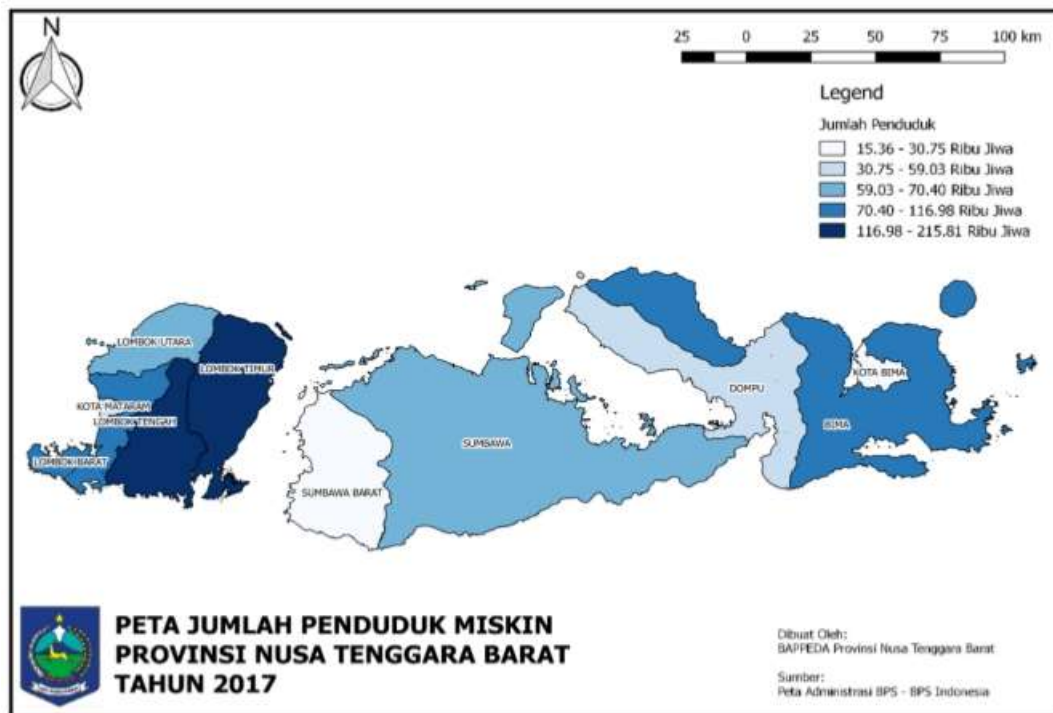
Tabel 19 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018 (dalam Ribuan)

No	Uraian	Tahun						Penurunan 2013-2018
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Lombok Barat	110,99	110,75	113,30	110,85	110,69	103,77	7,22
2	Lombok Tengah	145,15	145,18	147,94	145,37	142,14	130,00	15,15
3	Lombok Timur	219,56	219,67	222,19	216,18	215,81	196,87	22,69
4	Sumbawa	73,79	73,86	73,57	71,66	68,69	63,77	10,02
5	Dompu	36,40	36,42	35,94	34,31	32,85	30,74	5,66
6	Bima	73,83	74,54	73,71	72,36	72,14	71,65	2,18
7	Sumbawa Barat	21,71	22,04	22,50	22,47	22,33	20,36	1,35
8	Lombok Utara	72,16	72,19	72,28	71,02	69,24	62,86	9,3
9	Kota Mataram	46,67	46,67	46,76	44,81	44,53	42,60	4,07

No	Uraian	Tahun						Penurunan 2013-2018
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
10	Kota Bima	15,25	15,31	15,70	15,42	15,36	14,84	0,41
Provinsi NTB		815,50	816,62	823,89	804,45	793,78	737,46	78,04

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Berikut ini sebaran jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada tahun 2017.



Gambar 10 Peta Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2017
Sumber: BPS Provinsi NTB

Jumlah penduduk miskin paling banyak tinggal di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, sedangkan yang paling sedikit di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah penduduk miskin relatif lebih banyak mendiami Pulau Lombok dibandingkan dengan Pulau Sumbawa.

Tabel 20 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018

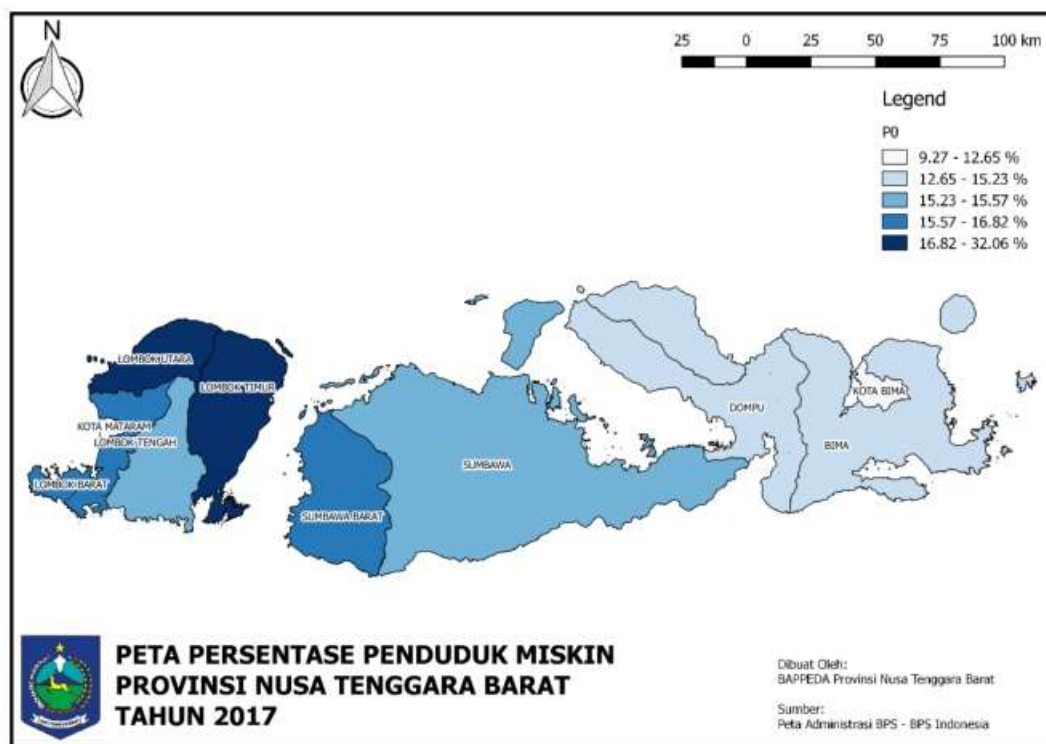
No	Uraian	Tahun						Penurunan 2013-2018
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Lombok Barat	17,43	17,11	17,38	16,73	16,46	15,20	2,23
2	Lombok Tengah	16,20	16,03	16,26	15,80	15,31	13,87	2,33
3	Lombok Timur	19,16	19,00	19,14	18,46	18,28	16,55	2,61
4	Sumbawa	17,04	16,87	16,73	16,12	15,31	14,08	2,96
5	Dompu	14,24	15,46	15,11	14,23	13,43	12,40	1,84
6	Bima	16,24	16,04	15,78	15,31	15,10	14,84	1,4

No	Uraian	Tahun						Penurunan 2013-2018
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
7	Sumbawa Barat	17,10	16,87	16,97	16,50	15,96	14,17	2,93
8	Lombok Utara	35,88	34,27	34,13	33,21	32,06	28,83	7,05
9	Kota Mataram	10,75	10,53	10,45	9,80	9,55	8,96	1,79
10	Kota Bima	9,91	9,74	9,85	9,51	9,27	8,79	1,12
Provinsi NTB		17,25	17,05	16,54	16,02	15,05	14,75	2,5

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB pada lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2,50%, hal ini juga terjadi pada tingkat kabupaten/kota. Seluruh kabupaten/kota menunjukkan kondisi yang positif, penurunan PO tertinggi ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan 7,05% sedangkan yang paling kecil di Kota Bima dengan 1,12%.

Berikut ini sebaran kondisi persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi NTB pada tahun 2017.



Gambar 11 Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2017

Sumber: BPS Provinsi NTB

Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur adalah daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi NTB pada tahun 2017, sedangkan yang paling rendah di Kota Mataram dan Kota Bima. Secara umum kondisi kemiskinan di Pulau Lombok lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Sumbawa.

Tabel 21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun						Peningkatan/ Penurunan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Lombok Barat	2,96	3,14	2,91	3,11	3,24	3,07	0,11
2	Lombok Tengah	2,32	2,21	3,00	2,74	2,81	2,31	-0,01
3	Lombok Timur	2,58	2,68	3,36	2,88	3,03	2,67	0,09
4	Sumbawa	2,52	2,90	2,70	3,12	2,60	3,05	0,53
5	Dompu	2,07	2,02	2,40	1,66	1,84	1,59	-0,48
6	Bima	2,33	2,66	2,41	2,34	2,47	1,73	-0,6
7	Sumbawa Barat	4,25	2,50	2,93	4,79	3,81	2,04	-2,21
8	Lombok Utara	7,64	7,28	7,50	7,06	7,63	6,98	-0,66
9	Kota Mataram	1,87	1,82	1,53	1,69	1,73	1,17	-0,7
10	Kota Bima	1,56	1,20	1,68	2,08	1,30	1,55	-0,01
Provinsi NTB		2,72	2,92	2,72	2,63	2,63	2,82	0,1

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 tertinggi pada tahun 2018 ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan 6,98 sedangkan yang terendah di Kota Mataram dengan 1,17.

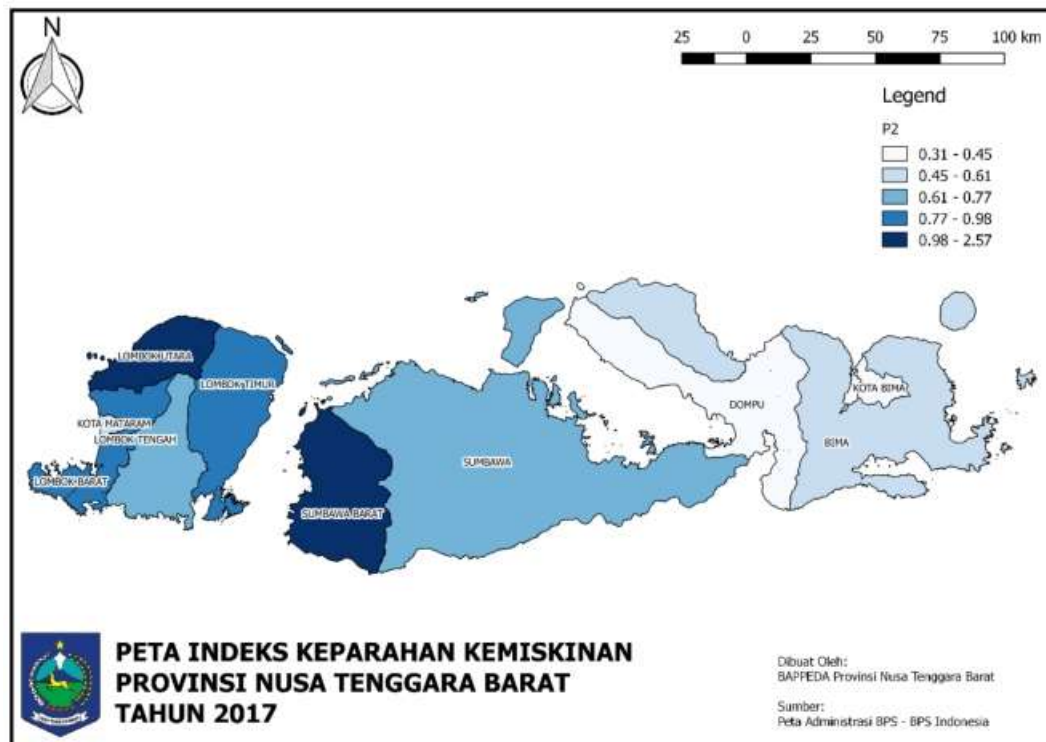
Tabel 22 Perkembangan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun						Peningkatan/ Penurunan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Lombok Barat	0,72	0,85	0,77	0,89	0,92	0,95	0,23
2	Lombok Tengah	0,50	0,48	0,87	0,64	0,75	0,54	0,04
3	Lombok Timur	0,54	0,61	0,87	0,68	0,79	0,64	0,1
4	Sumbawa	0,61	0,76	0,63	0,84	0,63	0,86	0,25
5	Dompu	0,45	0,42	0,61	0,30	0,39	0,34	-0,11
6	Bima	0,54	0,66	0,57	0,52	0,58	0,35	-0,19
7	Sumbawa Barat	1,47	0,58	0,81	1,70	1,22	0,50	-0,97
8	Lombok Utara	2,37	2,26	2,61	2,22	2,57	2,56	0,19
9	Kota Mataram	0,50	0,52	0,38	0,43	0,47	0,22	-0,28
10	Kota Bima	0,34	0,26	0,49	0,65	0,31	0,41	0,07
Provinsi NTB		0,66	0,72	0,73	0,65	0,63	0,74	0,08

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

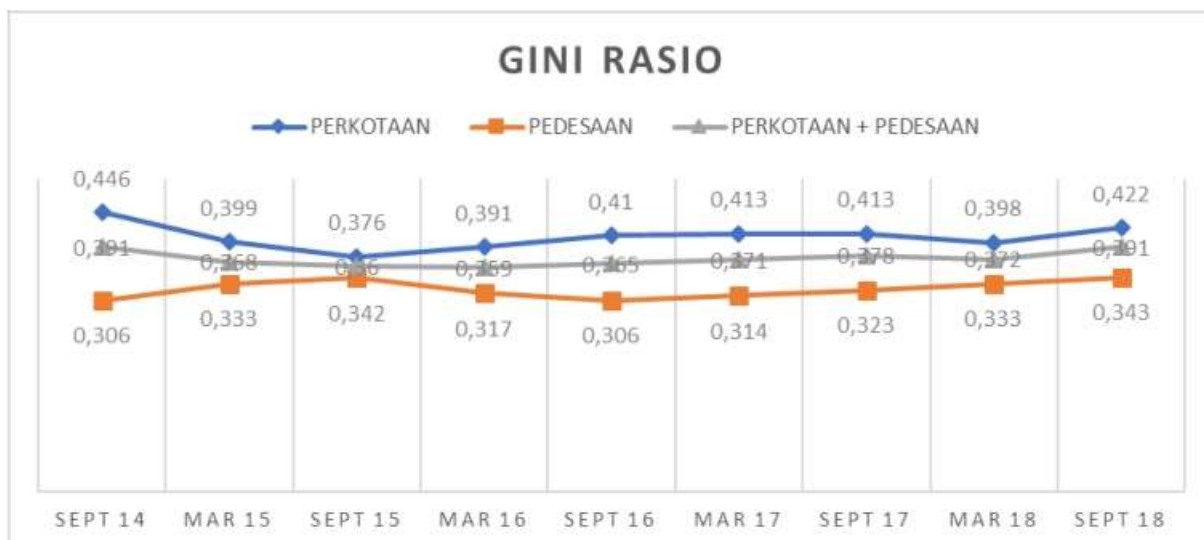
Posisi P2 Provinsi NTB pada tahun 2013-2018 masih berada di atas nilai capaian nasional, namun secara tren menunjukkan kondisi yang relevan dan cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018, nilai P2 tertinggi ditempati oleh

Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 2,56 poin diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat dengan 0,95 poin. Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan 0,23 poin dibandingkan kondisi pada tahun 2013.



Gambar 12 Peta Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2017
 Sumber: BPS Provinsi NTB

Selanjutnya, tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di Provinsi NTB ditunjukkan oleh nilai Gini Ratio. Indeks gini di perdesaan dan perkotaan berfluktuasi dari tahun 2013-2018. Ketimpangan ekonomi atau indeks gini di Provinsi NTB selama periode Maret 2016 – Maret 2017 mengalami peningkatan 0,012 poin. Indeks gini NTB di bulan Maret 2016 sebesar 0,360 poin, sementara di Maret tahun 2017 sebesar 0,371 poin. Ironisnya, ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi itu justru terjadi di daerah perkotaan. Faktor yang berpengaruh besar terhadap meningkatnya tingkat ketimpangan ekonomi selama periode September 2016 – Maret 2017 adalah berdasarkan survey sosial ekonomi (Susenas), terjadi penurunan pengeluaran perkapita perbulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah, dibandingkan dengan pengeluaran perkapita perbulan penduduk kelompok 20 persen teratas.



Gambar 13 Indeks Gini Perkotaan, Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2018

Indeks Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 menurun 0,015 point dibanding Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,413, hal ini berbanding terbalik pada daerah pedesaan yakni pada Maret 2018 tercatat 0,333 naik 0,01 point dibanding Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,323. Ketimpangan ekonomi di daerah pedesaan pada Maret 2018 yang menunjukkan perekonomian masyarakat di pedesaan lebih adil dan merata dibandingkan dengan perkotaan. Ketimpangan ekonomi di desa relatif lebih baik, tidak setinggi tren tiga tahun terakhir di daerah perkotaan, hal ini mengindikasikan masyarakat di daerah pedesaan kesejahteraannya lebih merata.

Bab IV Determinan Kemiskinan Daerah

4.1. Analisis Akar Permasalahan

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang tidak henti-hentinya dibicarakan dan merupakan salah satu ukuran kesuksesan dalam pembangunan. Permasalahan kemiskinan, sangat berkaitan erat dengan budaya kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, tidak ada kepakaran (skill), akses permodalan, terbatasnya lapangan pekerjaan, lingkungan sosial dan sumber daya alam. Di dalam kegiatan pembangunan, masalah akan muncul secara terus menerus dan dalam bentuk yang bermacam-macam. Penyebabnya, juga berbeda sehingga diperlukan proses identifikasi masalah untuk menentukan mana yang prioritas, mengingat fiskal yang terbatas.

Melalui pemberlakuan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilaksanakan pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) maupun pihak lainnya (Swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil). Kebijakan dan program tersebut telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dalam bentuk perbaikan taraf hidup masyarakat miskin ataupun munculnya masyarakat miskin baru.

Pemahaman utama Kemiskinan adalah gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Pemahaman yang lain mencakup gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, serta gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Kemiskinan secara umum diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar, dan dikatakan dibawah garis kemiskinan apabila pendapat seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - hari. Kemiskinan disebabkan oleh dua faktor diantaranya faktor yang disebabkan oleh manusia itu sendiri dan kemiskinan yang disebabkan non manusia. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor manusia berupa kurangnya keterampilan, pola hidup konsumtif, sikap pesimis, kesenjangan kaya miskin, adat

istiadat setempat, pendidikan yang rendah, populasi yang tinggi, kerjasama yang kurang, dan pengangguran serta sempitnya lapangan kerja. Sedangkan faktor dari non manusia adalah keadaan alam yang kurang subur/sempit/terisolir/fasilitas umum kurang dan tidak stabilnya harga hasil bumi dalam suatu daerah yang menyebabkan industrialisasi dan perekonomian berkembang dengan minim.

Dari pengertian kemiskinan di atas terdapat 6 (enam) bidang yang perlu diperhatikan pemerintah NTB untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yakni: 1. Bidang Pendidikan, 2. Bidang Kesehatan, 3. Bidang Infrastruktur dasar, 4. Bidang ketenagakerjaan, 5. Bidang ketahanan pangan, dan 5. Bidang ekonomi. Keenam bidang tersebut sangat berkaitan satu dengan lainnya sehingga semua bidang tersebut harus dikerjakan secara bersama-sama guna mempercepat penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

Evaluasi terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah ada dimaksudkan untuk mengambil pelajaran demi perbaikan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan. Lebih dari itu diharapkan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di masa mendatang tidak mengulang kesalahan yang sama. Inisiatif dan peran kalangan swasta untuk membantu penanggulangan kemiskinan juga telah lama ada. Penyediaan lapangan kerja yang dengan sendirinya memberi pendapatan kepada para pekerja. Disamping itu ada pula program dana hibah, sumbangan-sumbangan, dan santunan sosial. Demikian juga halnya dengan inisiatif kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Melalui kerjasama dengan donor luar negeri, aktifis LSM umumnya merancang program pemberdayaan masyarakat berskala kecil baik dari aspek sasaran, fokus program dan jangkauan.

Kelemahan utama dari kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat (LSM) maupun kalangan swasta secara umum antara lain: belum terdapat sinergi; belum sepenuhnya dikelola dengan baik oleh penduduk setempat dan menjadi milik mereka; belum terdapat kesatuan; tidak berkelanjutan; dan kurang mendapat kemudahan pemerintah yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Sehingga dengan pemetaan indikator ini diharapkan permasalahan kemiskinan di masyarakat dapat diberikan sentuhan-sentuhan program oleh pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Permasalahan kemiskinan lain yakni belum adanya penggunaan satu basis data terpadu antara pihak pemerintah dengan LSM/NGO; belum terintegrasi program yang ada antara pihak pemerintah, LSM/NGO, dan pihak swasta; sasaran dan

program yang masih kurang tepat, sehingga penanggulangan kemiskinan di NTB masih belum sesuai dengan permasalahan kemiskinan yang terjadi di setiap daerah dan; masih tinggi konflik kepentingan dari penentu kebijakan sehingga mengabaikan kondisi permasalahan kemiskinan di NTB.

4.2. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi

Dengan berlakunya otonomi daerah telah mendorong persaingan daerah-daerah di dalam pengelolaan sumberdaya daerah. Empat aspek pokok yang selalu mewarnai permasalahan pembangunan di daerah yaitu Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Buatan (SDB) dan Sumber Daya Sosial (SDS). Antara satu dengan lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi.

Pemanfaatan sumberdaya yang cenderung masih belum optimal, sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan sekaligus keberlangsungan kehidupan manusia. Pada aspek SDA, pemanfaatan potensi masih relatif terbatas, kurang terarah, kurang terpadu dan relatif tidak berkesinambungan. Hal ini menyebabkan pemanfaatan potensi SDA belum mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah secara optimal dan sekaligus belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang antara lain tercermin dari tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi karena masih lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.

Kondisi dan permasalahan kemiskinan di setiap wilayah sangat beragam dan spesifik, untuk itu butuh kebijakan dan strategi yg berbeda. Begitu juga kondisi keparahan kemiskinan dari setiap wilayah sangat beragam sehingga ada wilayah yang mendesak segera di tangani dan ada juga wilayah yang masih bisa ditunda penanganannya. Keadaan wilayah ini dapat dikategorikan menjadi 4 Prioritas dengan warna yang berbeda. Prioritas I digambarkan dengan warna merah, Prioritas II dengan warna kuning, Prioritas III dengan warna hijau dan Prioritas IV dengan warna biru. Prioritas I dengan warna merah merupakan wilayah yang diutamakan dalam melakukan penanggulangan, barulah diikuti dengan wilayah Prioritas II, dan Prioritas III. Wilayah dengan Prioritas IV yang digambarkan dengan warna biru merupakan keadaan normal, yang dimana wilayah tersebut terdapat jumlah penduduk miskin rendah dan program yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

1. Pendidikan

Pendidikan bertujuan untuk menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu biasanya akan memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan di masa mendatang. Jadi, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemiskinan saat ini sudah dipandang dari sudut yang berbeda-beda, dan perspektif yang digunakan, maka batasan kemiskinan juga bergeser. Dengan menggunakan pandangan kuantitatif dan materialistik, maka kemiskinan telah dibataskan sebagai "ketidakmampuan untuk meraih standard hidup minimal". Menurut definisi baru, kemiskinan bukan lagi sekedar masalah kesenjangan pendapatan (*income discrepancy*), tetapi lebih kompleks lagi menyangkut ketidakberdayaan (*incapability*), ketiadaan pengetahuan dan keterampilan (*lack of knowledge and skills*) dan kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (*scarcity of capital and resource*) (Alhumani, 2006), atau *human capability* (Sen, 2000). Elemen dasar *human capability* adalah pendidikan yang memainkan peranan sentral dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Salah satu indikator untuk melihat pendidikan penduduk adalah angka buta huruf. Semakin tinggi angka buta huruf dalam suatu daerah wilayah, maka semakin rendah mutu dan kualitas SDM di daerah tersebut. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

Angka buta huruf penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2013 sampai tahun 2017 tidak stabil, dengan menurunnya angka buta huruf sebesar 0,18 persen namun ada kecenderungan menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Capaian buta huruf tahun 2017 sebesar 12,86 persen, artinya pada tahun 2017 angka melek huruf di NTB sebesar 87,14 persen penduduk usia 15 tahun keatas mampu membaca dan menulis seperti tabel di bawah ini.

Tabel 23 Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Di Kabupaten/Kota Se NTB Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Angka Buta Huruf 15+ (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	18,06	17,98	15,55	18,62	15,04
2	Lombok Tengah	21,06	21,51	21,26	19,06	18,26
3	Lombok Timur	11,66	10,71	14,38	12,53	14,34
4	Sumbawa	6,96	8,38	5,92	7,46	6,95
5	Dompu	9,5	10,73	8,48	8,26	8,42
6	Bima	7,84	9,75	7,62	9,52	10,59
7	Sumbawa Barat	5,96	5,55	6,4	5,46	5,37
8	Lombok Utara	19,95	19,53	18,62	18,96	16,54
9	Kota Mataram	5,62	6,41	6,74	7,26	8,29
10	Kota Bima	3,83	3,58	4,28	4,21	6,78
Provinsi		12,81	13,04	13,03	12,94	12,86

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Dari tabel di atas dilihat bahwa angka buta huruf tertinggi berada di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu sebesar 18,26 persen, diikuti Kabupaten Lombok Utara sebesar 16,54 persen dan Kabupaten Lombok Barat sebesar 15,04 persen. Sedangkan angka buta huruf terendah yakni Kab. Sumbawa Barat 5,37 sebesar, Kota Bima sebesar 6,78 persen dan Kab. Sumbawa 6,95. Sejak tahun 2014-2017 angka buta huruf mengalami penurunan sebanyak 0,18 persen. Penurunan angka buta huruf ini sebagai implikasi dari meningkatnya rata-rata lama sekolah, APS, APK dan APM serta menurunnya angka drop out. Tetapi angka buta penduduk usi 15 tahun keatas pada tahun 2017 melebihi target yang awalnya 10,85% namun yang terealisasi sebanyak 12,86% untuk Provinsi NTB.

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%)
 Sumber: BPS (Susenas)
 Nusa Tenggara Barat - 2017

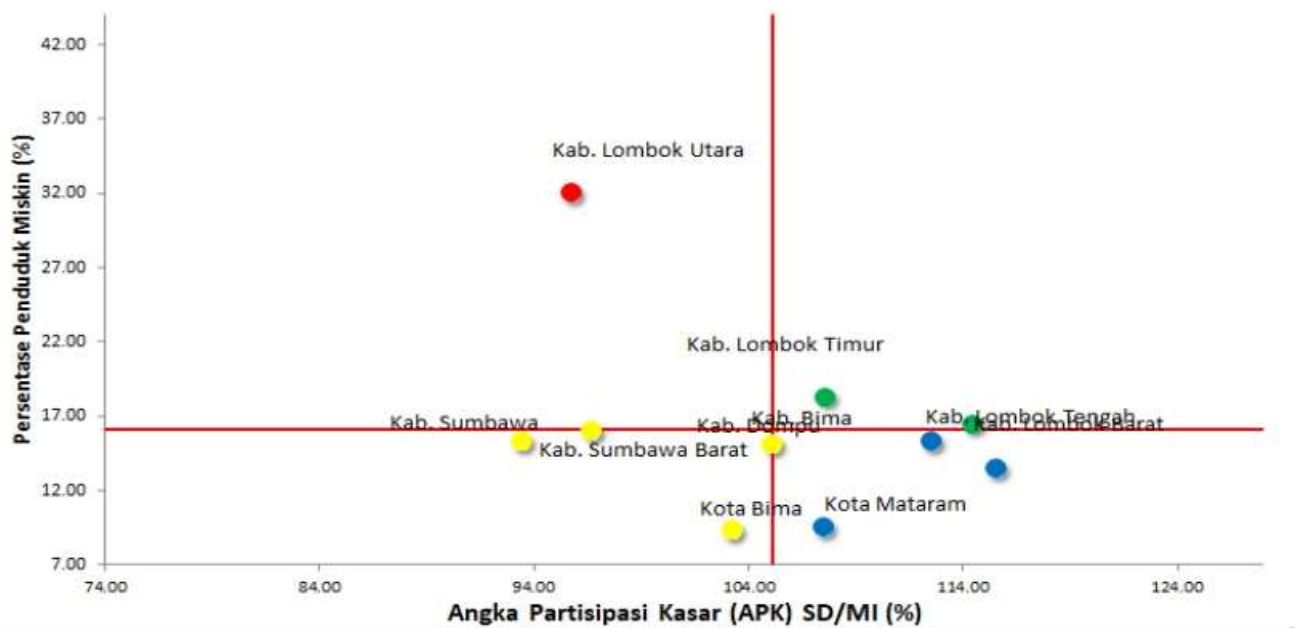


Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki prioritas di tingkat Kabupaten/Kota dengan angka buta huruf tertinggi pada kabupaten Lombok Barat (15,04), Lombok Timur (14,34), dan Lombok Utara (16,54), sedangkan Lombok Tengah menjadi prioritas kedua dengan dengan presentase 18,26 dengan angka buta huruf tinggi diikuti presentasi pendudukan miskin rendah. Sedangkan pada Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram angka buta huruf penduduk usia 15 tahun keatas relative rendah. Dengan adanya permasalahan buta huruf yang menjadi tantangan nyata penanggulangan kemiskinan pada ketiga Kabupaten tersebut maka berbagai program prioritas dalam rangka menangani permasalahan tersebut harus di prioritaskan pada ke-3 Kabupaten tersebut.

**Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) dan
Persentase Penduduk Miskin (%)
Nusa Tenggara Barat - 2017**

Sumber :BPS (Susenas)



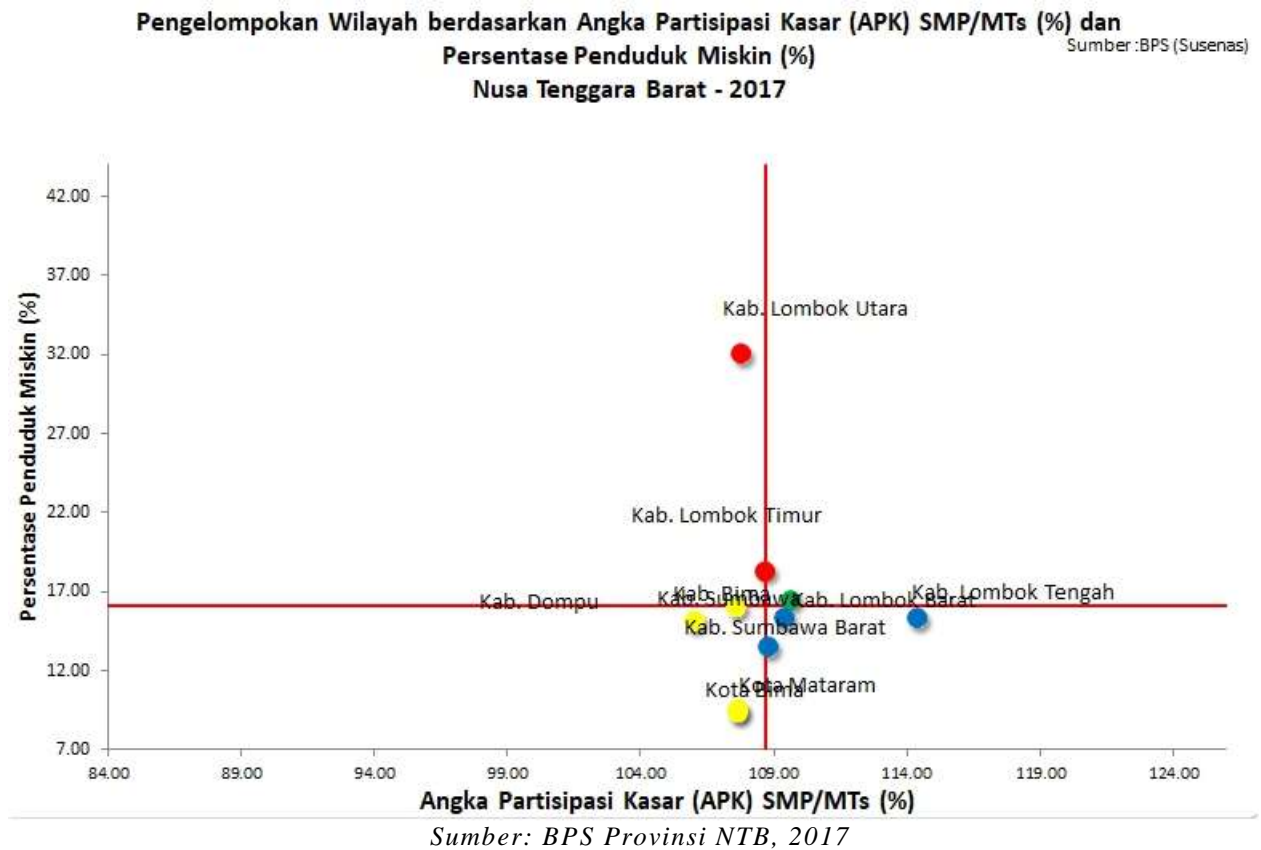
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

PRIORITAS I	Kab. Lombok Utara
PRIORITAS II	Kota Bima, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu
PRIORITAS III	Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah
PRIORITAS IV	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Bima

Kabupaten Lombok Utara menunjukkan, Persentase Kemiskinan Tinggi (7,63) diikuti oleh persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI yang Rendah (115,23). Dengan kata lain, kondisi kemiskinan di Kab. Lombok Utara diperparah dengan kondisi permasalahan pendidikan yaitu masih ditemukan anak berusia 7 hingga 12 Tahun belum bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) ini yang mejadi prioritas utama.

Prioritas kedua dengan Angka Kemiskinan Rendah diikuti Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI rendah yakni Kab. Sumbawa (106,73), Kab. Sumbawa Barat (104,10), Kota Bima (116,05) dan Kab. Dompu (113,11). Hal ini dapat mengindikasikan kemungkinan permasalahan kemampuan daya tampung dari fasilitas pendidikan, permasalahan akses ke fasilitas pendidikan, rendahnya kesadaran untuk mendorong agat anak di usia Sekolah dasar sudah masuk sekolah, dan tingginya angka putus sekolah.

Sedangkan persentase Angka Partisipasi Kasar APK (SD/MI) yang tinggi diikuti dengan rendahnya Tingkat Persentase Kemiskinan dapat dijumpai pada Kota Mataram (103,58), Kab. Bima (117,90) dan Kab Lombok Barat (108,10). Hal ini juga menunjukkan wilayah tersebut daya tampung dan akses ke fasilitas pendidikan cukup memadai bagi peserta didik, dan besarnya kesadaran warganya terhadap pendidikan.

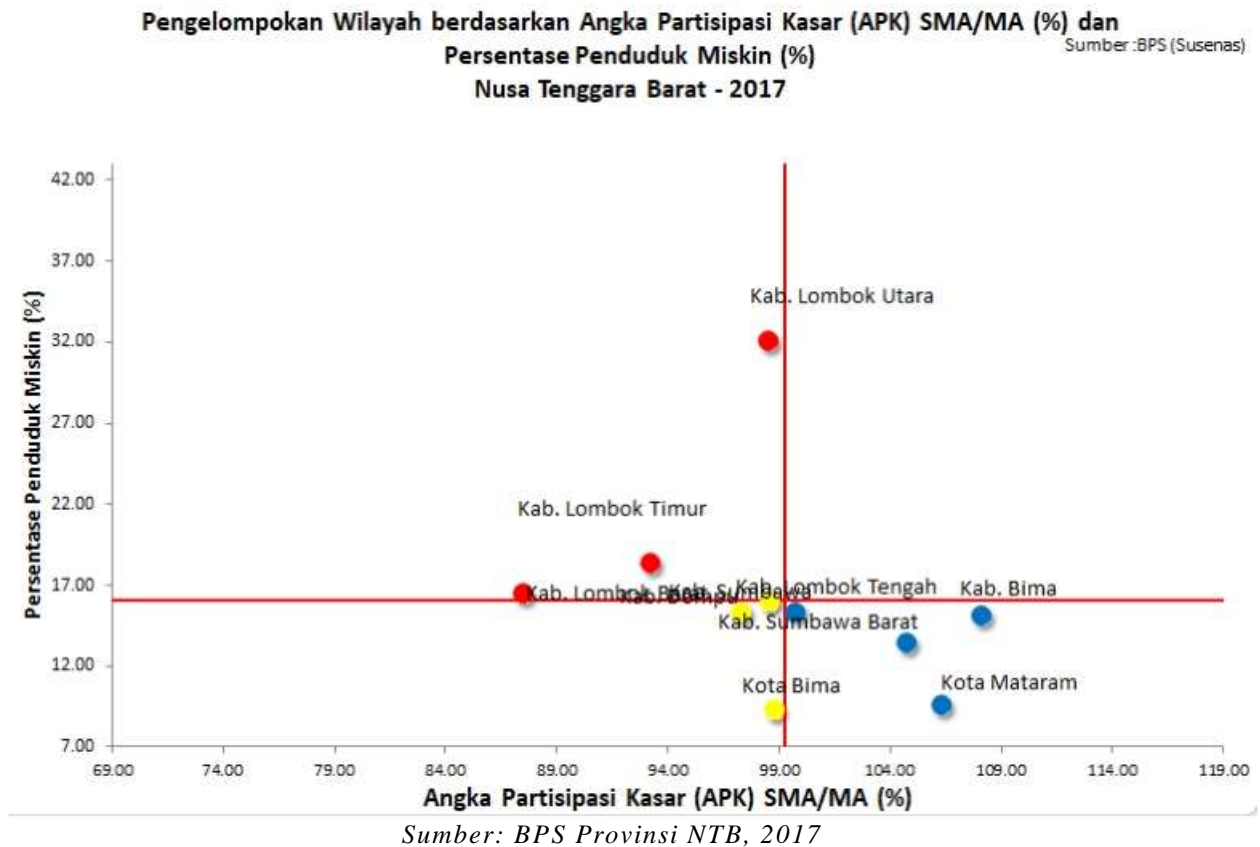


PRIORITAS I	Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur
PRIORITAS II	Kota Bima, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu
PRIORITAS III	Kab. Lombok Tengah
PRIORITAS IV	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Bima

Meski ditemukan kondisi hampir sama dengan APK Sekolah Dasar, di Kabupaten Lombok Utara masih ditemui kondisi tingginya Persentase Penduduk Miskin diikuti oleh tingkat Angka Partisipasi Kasar (SMP/MTs) rendah yakni 95,64, ditambah lagi dengan APK rendah pada Kab. Lombok Timur (95,38). Namun secara persentase masih lebih baik dari APK SD/MI pada kabupaten yang sama di tingkat Angka Partisipasi Kasar (SMP/MTs.)

Demikian juga dengan nilai rendahnya Persentase Penduduk Miskin diikuti rendahnya nilai APK pada Kab. Sumbawa (96,77), Kab. Sumbawa Barat (100,27),

Kota Bima (98,69) dan Kab. Dompu (97,91). Hal ini menunjukkan indikasi bahwa hampir semua lulusan sekolah dasar melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan fasilitas pendidikan SMP/MTs di hampir semua wilayah di NTB telah memiliki kemampuan dalam daya tampung terhadap peserta didik.

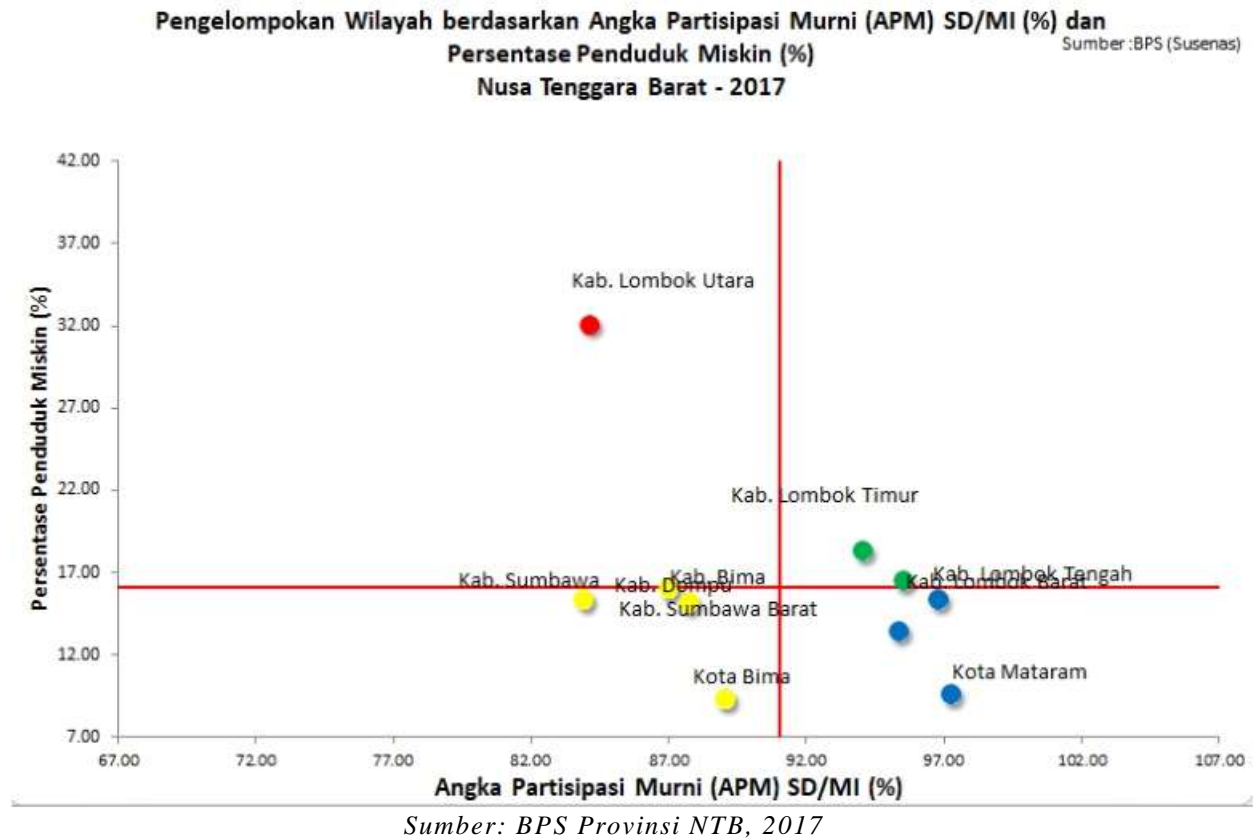


PRIORITAS I	Kab. Lombok Utara, Kab Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah
PRIORITAS II	Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa
PRIORITAS III	-
PRIORITAS IV	Kota Mataram, Kab. Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa Barat

Kabupaten Lombok Utara memiliki tingkat Persentase Penduduk Miskin tinggi namun terkait persentase APK SMA/MA (80,74) rendah, sedangkan dengan tingkat Persentase Penduduk Miskin rendah diikuti APK SMA/MA tinggi terdapat pada Kab. Lombok Timur (94,02) dan Kab. Lombok Tengah (105,81). Hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten Lombok utara memiliki kemampuan penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA yang lebih baik dibandingkan dengan dua Kabupaten yang memiliki Tingkat Partisipasi Kasar tinggi dengan Persentase Penduduk Miskin yang rendah.

Lain halnya dengan Kota/Kabupaten yang memiliki tingkat Pesentase Penduduk Miskin rendah diikuti dengan rendahnya nilai APK (SMA/MA) yakni

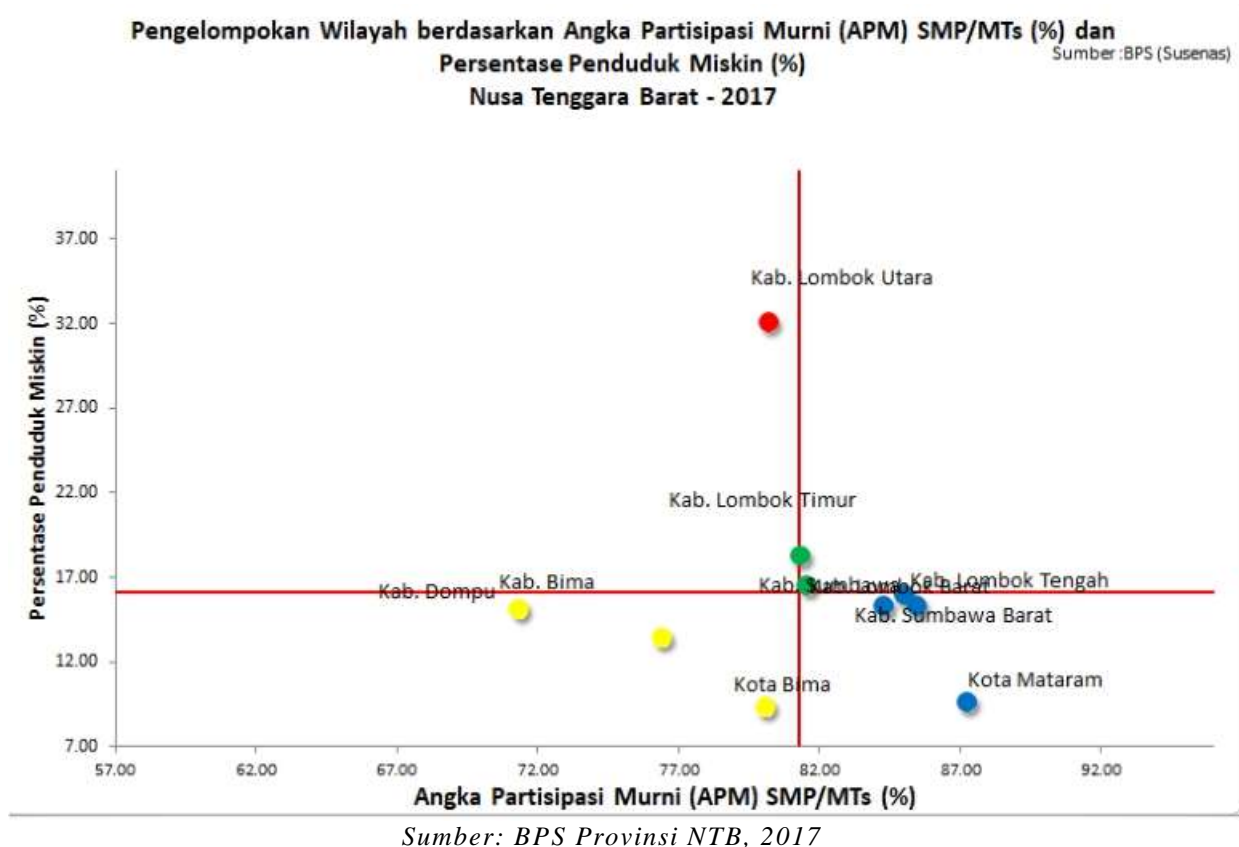
Kota Bima (101,67), Kab. Dompu (103,02) dan Kab. Sumbawa (83,96). Kondisi Secara umum pada seluruh Kab/Kota di NTB dengan tingkat partisipasi dalam jenjang SMA mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan terdapat permasalahan perilaku atau kendala ketersediaan Fasilitas.



PRIORITAS I	Kab. Lombok Utara
PRIORITAS II	Kota Bima, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima
PRIORITAS III	Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat
PRIORITAS IV	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah

Di Kabupaten Lombok Utara masih terdapat kondisi dengan Persentase Penduduk Miskin tinggi dan persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI rendah (99,48), hampir kurang lebih 15 persen warga Kab. Lombok Utara pada usia sekolah dasar tidak dapat bersekolah tepat waktu. Jika dibandingkan dengan Kota Mataram yang menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tinggi (98,68) dapat dikatakan hampir semua peserta didik dalam level jenjang pendidikan SD di Kota Mataram dapat bersekolah sesuai dan tepat waktu. Jika dihubungkan dengan rendahnya angka kemiskinan di daerah tersebut dapat dikatakan di Kota Mataram warganya lebih mampu membiayai kebutuhan biaya sekolah anak anaknya karena telah mampu membiayai kebutuhan dasar hidupnya.

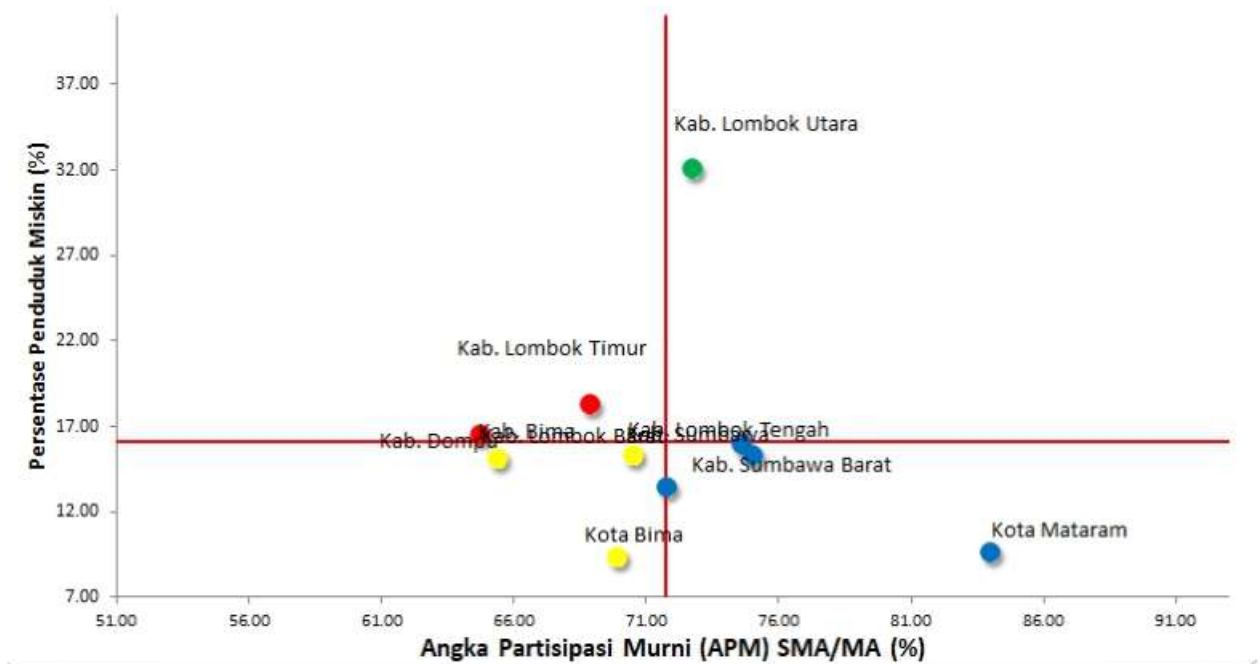
Kabupaten yang menjadi prioritas kedua dengan Persentase Penduduk Miskin rendah dengan Angka Partisipasi Murni (APM) rendah yakni Kota Bima (99,70), Kab. Sumbawa (99,14), Kab. Dompu (99,09) dan Kab Bima (100,00). Walaupun nilai pada Angka Partisipasi Murni (APM) tinggi tetapi angka kemiskinan pada daerah tersebut yang menjadi perioritas utama.



PRIORITAS I	Kab. Lombok Utara
PRIORITAS II	Kota Bima, Kab. Bima, Kab. Dompu
PRIORITAS III	Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa
PRIORITAS IV	Kota Mataram, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat

Di Kabupaten Lombok Utara masih terdapat kondisi dengan Persentase Penduduk Miskin tinggi dan nilai APM SMP/MTs rendah yakni 81,87, hampir kurang lebih 20 persen warga Kab. Lombok Utara, tidak dapat bersekolah tepat waktu pada usia sekolah Menengah Pertama. Namun hal tersebut masih relatif lebih baik dari Kab. Dompu (87,85), Kota Bima (99,34) dan Kab. Bima (88,46). Hal ini mengindikasikan ada permasalahan ketersediaan fasilitas dan akses pada jenjang SMP/MTs, permasalahan ketersediaan guru pengajar, hal lain menunjukkan beratnya kendala dua kabupaten tersebut terkait Wajib Belajar 9 Tahun.

**Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan
Persentase Penduduk Miskin (%)**
Nusa Tenggara Barat - 2017
Sumber: BPS (Susenas)



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

PRIORITAS I	Kab. Lombok Timur, Kab. Bima
PRIORITAS II	Kab. Dompu, Kota Bima, Kab. Lombok Barat
PRIORITAS III	Kab. Lombok Utara
PRIORITAS IV	Kota Mataram, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Tengah

Meski Kabupaten Lombok Utara memiliki kondisi Persentase Penduduk Miskin tertinggi, namun memiliki nilai APM SMA lebih baik dan konsisten yakni 49,04 maka yang menjadi prioritas utama dengan nilai Presentase Penduduk Miskin tinggi diikuti nilai APM tinggi yaitu Kab. Lombok Timur (64,94), dan Kab. Bima (78,69). Sedangkan untuk prioritas kedua dengan kondisi Persentase Penduduk Miskin rendah diikuti APM rendah terdapat pada Kab. Dompu (71,65), Kota Bima (75,14), dan Kab. Lombok Barat (59,93). Secara keseluruhan terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni ketika jenjang pendidikan semakin ke atas terkait di seluruh kabupaten.

Dari penjelasan diatas, program yang disarankan untuk dilaksanakan dalam menunjang tingkat Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni lebih baik yaitu melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk setiap sekolah. Disamping itu, mendorong pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada kepala rumah tangga, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program

Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerangi buta huruf bagi penduduk usia 15 tahun ke atas adalah memperluas jangkauan program keaksaraan fungsional dasar, keaksaraan fungsional mandiri, menambah tutor keaksaraan yang terlatih, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk memerangi buta huruf dan menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah gerakan moral masyarakat dan melakukan kerjasama/MoU dengan berbagai komponen/elemen masyarakat yang kompeten menangani Pemberantasan Buta Aksara (PBA). Selain itu terdapat program PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yaitu pendidikan non formal bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan di jalur persekolahan (formal), seperti Kejar Paket A, B dan C. Pendidikan Luar Sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak dapat diperoleh di dalam pendidikan sekolah yang dilakukan seperti private, les, training, kursus, try out.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan alat ukur untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal yang merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi berupa: Partisipasi sekolah; Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; Ijasah tertinggi yang dimiliki dan Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. BPS telah mengeluarkan metode penghitungan indikator pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas diganti menjadi rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas. Indikator pendidikan yang baru ini diharapkan dapat menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir dan dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak turun.

Pada tingkat Kabupaten/Kota nilai angka rata-rata lama sekolah tahun 2016 cenderung lebih rendah di Pulau Lombok. Hal ini terlihat dari peta spasial di bawah yang menunjukkan bahwa nilai capaian di pulau Lombok jauh lebih gelap. Daerah dengan nilai capaian angka harapan lama sekolah terendah terdapat di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.



Gambar 14 Peta Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2016
 Sumber: BPS Provinsi NTB, 2016

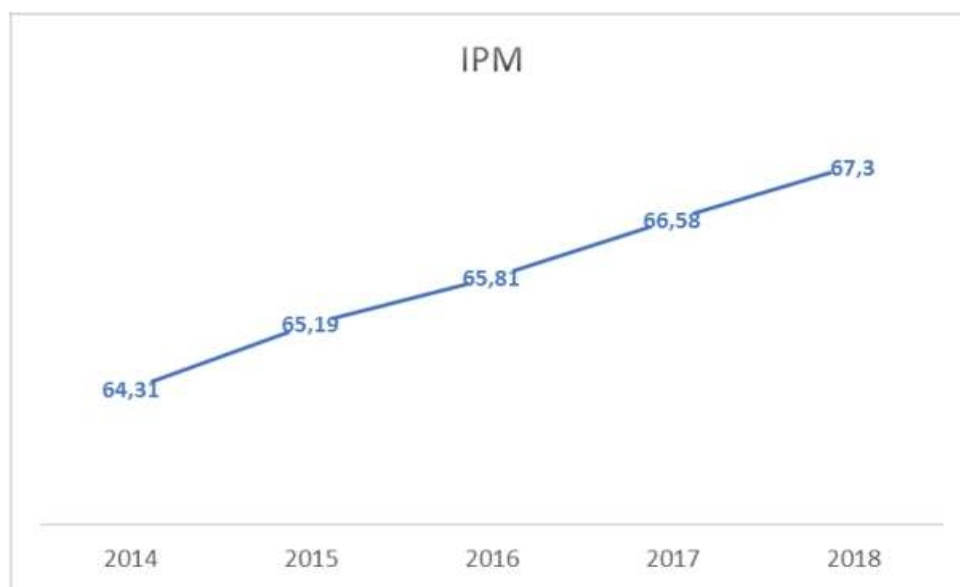
Daerah dengan nilai angka rata-rata lama sekolah tertinggi ada di Kota Bima dan Kota Mataram. Ketersediaan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kondisi ekonomi adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi rata-rata lama sekolah.

Strategi intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah antara lain:

- a. Memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah dengan memberikan Beasiswa Siswa Miskin (BSM), dan beasiswa untuk SMP Terbuka;
- b. Pemberian subsidi ke sekolah selama ini telah ditutupi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah (BOS);
- c. Menjangkau seluruh anak usia sekolah, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan terisolir sekalipun dengan program SD-SMP Satu Atap, Program PAKET A, B dan C;
- d. Memberikan kesadaran kolektif kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan dengan melibatkan toga, toma dan todat;
- e. Menambah fasilitas pendidikan baik itu berupa pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi gedung dan ruang kelas, membangun dan melengkapi laboratorium, perpustakaan sekolah untuk memenuhi target setiap Kecamatan di Provinsi NTB telah memiliki minimal 1 SMA dan 1 SMK;

- f. Mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan implikasi hukum dan komitmen penganggaran penyelenggaraan pendidikan di provinsi NTB.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan perkembangan pembangunan non fisik suatu daerah dalam jangka panjang yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara tergolong negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pengukuran IPM memberikan manfaat diantaranya adalah: 1) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia; 2) menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) digunakan sebagai salah satu dasar penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

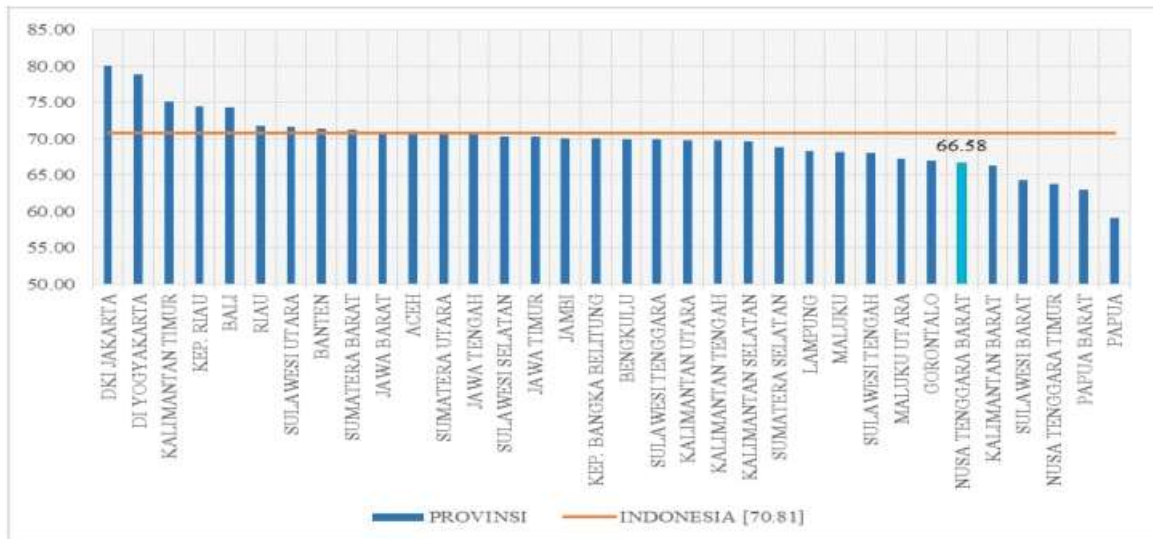


Gambar 15 Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2014-2018
Sumber: Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018

IPM NTB meningkat dari 64,31 pada tahun 2014 menjadi 67,3 tahun 2018. Meski begitu, IPM NTB masih berada pada kategori IPM sedang, dengan laju pertumbuhan mencapai 1,17 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, level IPM Provinsi NTB memang masih berada di bawah Nasional. namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan IPM, NTB termasuk yang paling progresif selama periode tahun 2010 – 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 1,22 persen per tahun atau berada di urutan ketiga tercepat secara nasional, sehingga NTB juga

menjadi salah satu provinsi yang berstatus top movers atau percepatan IPM yang sangat baik.

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan pertumbuhan IPM tertinggi dengan 5,72% atau meningkat sebesar 3.60 poin, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan 5,29% atau meningkat 3.53 poin dan peringkat ketiga diikuti oleh Provinsi Lampung dengan pertumbuhan 5.21% dengan peningkatan 3.38 poin seperti yang disajikan pada table berikut ini.



Gambar 16 Posisi Relatif IPM Tahun 2017
 Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan dan penurunan di tahun 2018, sebagai berikut:

- Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 65,87 tahun pada tahun 2018, meningkat 0,32 tahun dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 65,55 tahun.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) menurun sebesar 0,03 tahun di tahun 2018 menjadi 13,47, dibandingkan pada 2017 yang sebesar 13,5 tahun.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan selama 7,03 tahun (setara kelas VII SLTP) di tahun 2018, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 6,9 tahun.
- Pengeluaran per kapita masyarakat yang disesuaikan telah mencapai Rp.10.284.000 pada tahun 2018, meningkat sebesar Rp.407.000 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp.9.877.000.

Membaiknya IPM NTB itu disebabkan banyak faktor seperti indikator AHH, karena pelayanan kesehatan semakin baik. Demikian halnya dengan angka HLS dan RLS membaik karena pelayanan pendidikan semakin baik artinya perbaikan pelayanan dasar selama ini mulai menunjukkan hasil. Seperti, kualitas guru dan

sarana prasarana sekolah. Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Rendahnya kualitas pendidikan berimbas terhadap rendahnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya untuk meningkatnya kualitas guru. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti pelatihan, pembekalan, dan pemberdayaan guru tentu.

Peningkatan sarana belajar mengajar juga menjadi faktor penting dalam peningkatan pendidikan. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar, dengan kata lain sarana prasarana menunjang kualitas belajar siswa. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru, akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Peningkatan sarana belajar mengajar juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kompetensi guru yang akan berimbas positif terhadap peningkatan kualitas siswa didik. Oleh karena itu semakin meningkatnya kualitas guru dengan sarana dan prasarana maka kualitas pendidikan pun akan meningkat secara signifikan. Berikut tabel Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun keatas.

Tabel 24 Komponen IPM Provinsi NTB Tahun 2013-2018

No	Komponen Ipm	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	64,74	64,9	65,38	65,48	65,55	65,87
2	Indeks Pendidikan :						
A	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,47
B	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,54	6,67	6,71	6,79	6,9	7,03
3	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	8,95	8,99	9,24	9,58	9,88	10,284
	IPM	63,8	64,3	65,2	65,8	66,6	67,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2018

Rata-rata Lama Sekolah merupakan alat ukur untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal yang merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk

tahun yang mengulang). Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi berupa: Partisipasi sekolah; Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; Ijasah tertinggi yang dimiliki dan Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Namun seiring dengan kemajuan zaman, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas dianggap sudah tidak relevan lagi untuk menggambarkan indeks pembangunan manusia suatu daerah. Atas dasar itulah, BPS mengeluarkan metode penghitungan indikator pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas diganti menjadi rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas. Indikator pendidikan yang baru ini diharapkan dapat menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir dan dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak turun. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikannya. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 25 Perkembangan Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2014 – 2018

NO	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010-2018					Peningkatan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Lombok Timur	6,06	6,15	6,26	6,32	6,45	0,39
2	Lombok Barat	5,63	5,69	5,93	6,15	6,16	0,53
3	Lombok Tengah	5,52	5,54	5,6	5,95	5,96	0,44
4	Lombok Utara	4,97	5,22	5,47	5,54	5,81	0,84
5	Sumbawa	7,31	7,52	7,53	7,54	7,72	0,41
6	Sumbawa Barat	7,44	7,68	8,05	8,18	8,24	0,8
7	Dompu	7,45	7,83	8,1	8,11	8,12	0,67
8	Bima	7,29	7,36	7,45	7,58	7,59	0,3
9	Kota Mataram	9,04	9,05	9,25	9,32	9,43	0,39
10	Kota Bima	9,58	9,96	10,13	10,14	10,3	0,72
Nusa Tenggara Barat		6,67	6,71	6,79	6,9	7,03	0,36

Sumber: BPS Indonesia

Dari tabel di atas terlihat bahwa daerah dengan peningkatan tertinggi tahun 2014-2018 adalah Kabupaten Lombok Utara sebesar 0,84%, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bima dengan peningkatan sebesar 0,30%.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan adanya kegiatan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang paling mendasar untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Penyelenggaran urusan pemerintah bidang kesehatan bisa dilihat dari capaian indikator angka usia harapan hidup, yang dihitung menggunakan variabel angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi.

Tabel 26 Jumlah Kasus Kematian Bayi Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mataram	44	39	34	25	44	58
2	Lombok Barat	90	60	42	38	31	28
3	Lombok Utara	52	40	82	59	86	87
4	Lombok Tengah	255	199	192	192	242	230
5	Lombok Timur	593	482	460	467	346	226
6	Sumbawa Barat	27	21	28	24	17	17
7	Sumbawa	83	73	75	66	30	74
8	Dompu	29	33	35	30	40	43
9	Bima	97	100	91	80	74	79
10	Kota Bima	29	22	17	25	19	24
NTB		1.299	1.069	1056	1006	929	866

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2018

Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi NTB tahun 2018 tertinggi di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 230 kasus, diikuti Lombok Timur 226 kasus, dan di Kabupaten Lombok Utara sebesar 87 kasus, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 17 kasus. Namun secara keseluruhan, angka kematian bayi di Provinsi NTB terus mengalami penurunan dari 1.299 kasus pada tahun 2013 menjadi 866 kasus pada tahun 2018.

Tabel 27 Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2013-2018

Indikator	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Proporsi (per 1.000 KH)	12,6	10,3	10,35	9.86	9.00	7,91

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2018

Proporsi kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan kondisi positif yaitu dari 12,6 kematian per 1.000 KH menjadi 7,91 kematian per 1.000 KH. Pelayanan ibu hamil hingga melahirkan telah berhasil menekan angka kematian bayi meskipun masih cukup banyak kasus kematiannya.

Tabel 28 Jumlah Kasus Kematian Ibu Provinsi NTB Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mataram	14	9	10	11	6	9
2	Lombok Barat	10	7	5	5	4	5
3	Lombok Utara	2	6	2	2	3	2
4	Lombok Tengah	20	18	16	26	24	24
5	Lombok Timur	35	37	28	20	22	34
6	Sumbawa Barat	5	4	1	1	4	1
7	Sumbawa	15	15	10	7	4	12
8	Dompu	2	2	12	6	4	0
9	Bima	11	8	8	9	8	8
10	Kota Bima	3	5	3	5	6	4
NTB		117	111	95	92	85	99

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2018

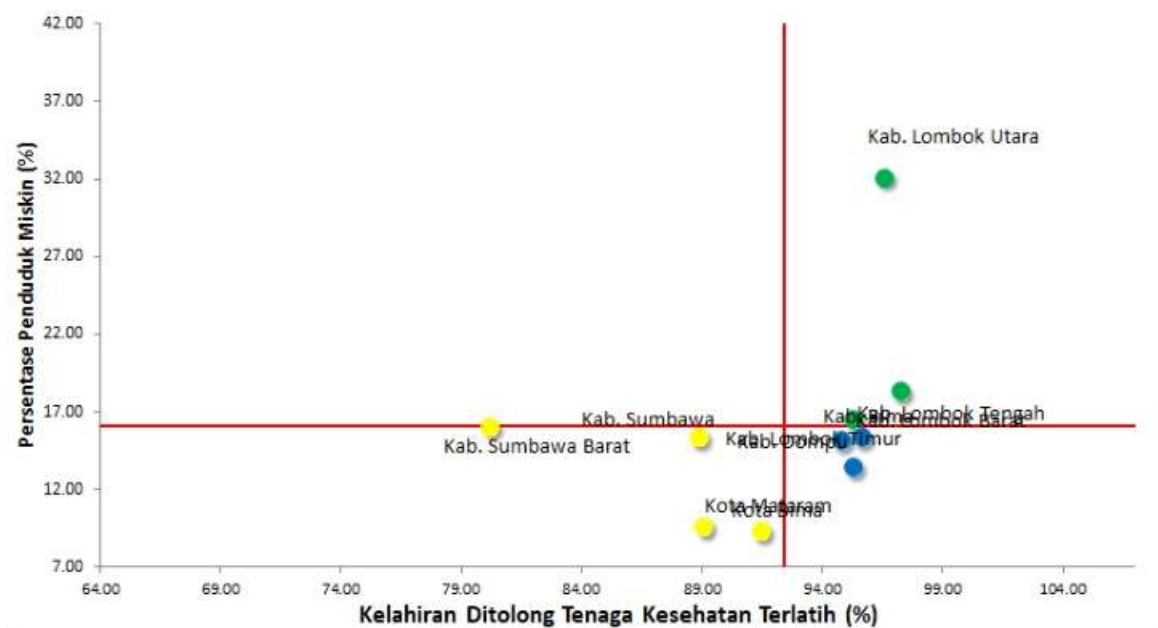
Angka kematian ibu pada tahun 2013 di NTB sebanyak 117 kasus kemudian terus menurun hingga menjadi 99 kasus pada tahun 2018. Kabupaten Lombok Timur adalah Kabupaten tertinggi kematian ibu sebesar 34 kasus, diikuti Kabupaten Lombok Tengah sebesar 24 kasus dan Kabupaten Sumbawa sebesar 12 kasus.

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, Desa disetiap kelurahan melakukan kesiapsiagaan dengan membentuk Desa Siaga di masing-masing Kelurahan. Desa Siaga yang ada di Desa/Kelurahan memiliki kontribusi yang positif terhadap capaian target Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi NTB. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program pengembangan desa siaga yang sudah dimulai tahun 2006. Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat Desa dan Kelurahan dalam

memecahkan masalah-masalah kesehatan. Pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2017 tercatat dari 1.137 Desa/kelurahan dan 1.085 Desa (95,43%). Hal ini menandakan bahwa Desa dan Kelurahan di Provinsi NTB telah memulai upaya mewujudkan desa dan kelurahan Siaga.

Informasi mengenai tingginya jumlah kematian ibu bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer). Salah satu upayanya adalah melalui pembuatan pedoman Rencana Aksi Nasional (RAN) program percepatan penurunan AKI, yang memuat program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, bahkan penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%)
 Sumber: BPS (Susenas)
 Nusa Tenggara Barat - 2017



Berdasarkan kuadran diatas, wilayah dengan kelahiran yang ditolong tenaga terlatih paling baik berada pada Kabupaten Lombok Timur (97.21%), Dompu (95.27%) dan Kabupaten Bima (94.78), sedangkan pada Kabupaten Lombok Barat (95.29%), Lombok Tengah (95.64%) dan Lombok Utara (96.53%) kelahiran yang ditolong dengan tenaga terlatih baik. Untuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (80.20%), Sumbawa (88.83%), Kota Mataram (89.06%) dan Kota Bima (91.44%) kelahiran yang ditolong dengan tenaga terlatih cukup baik.

a. Persentase Balita Gizi Buruk

Persoalan gizi dalam pembangunan kependudukan masih merupakan persoalan yang dianggap menjadi masalah utama dalam tatanan kependudukan dunia. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi salah satu butir penting yang menjadi kesepakatan global dalam Millenium Development Goals (MDGs). Pada tahun 2015 setiap negara secara bertahap mampu mengurangi jumlah balita yang bergizi buruk atau gizi kurang hingga 15 persen, dan dilanjutkan kembali dengan Sustainable Development Goals (SDGS) sampai dengan tahun 2025.

Di Indonesia, persoalan gizi ini juga merupakan salah satu persoalan utama dalam pembangunan manusia. Sebagai salah satu negara dengan kompleksitas kependudukan yang sangat beraneka ragam, Indonesia dihadapi oleh dinamika persoalan gizi buruk. Walaupun proses pembangunan di Indonesia telah mampu mengatasi persoalan ini, tetapi dilihat dari kecenderungan data statistik, masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan terutama yang menyangkut persoalan balita gizi kurang.

Menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi NTB. Mengurangi angka gizi buruk ini menjadi berat karena berkaitan erat dengan kemiskinan. Sementara penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Pemerintah Provinsi NTB. Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gizi buruk, yang berpengaruh juga pada Usia Harapan Hidup. Prevalensi kurang gizi di Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama dua tahun terakhir yakni dari 17,01 persen pada tahun 2015 menjadi 20,2 persen di tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 22,6 persen di tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

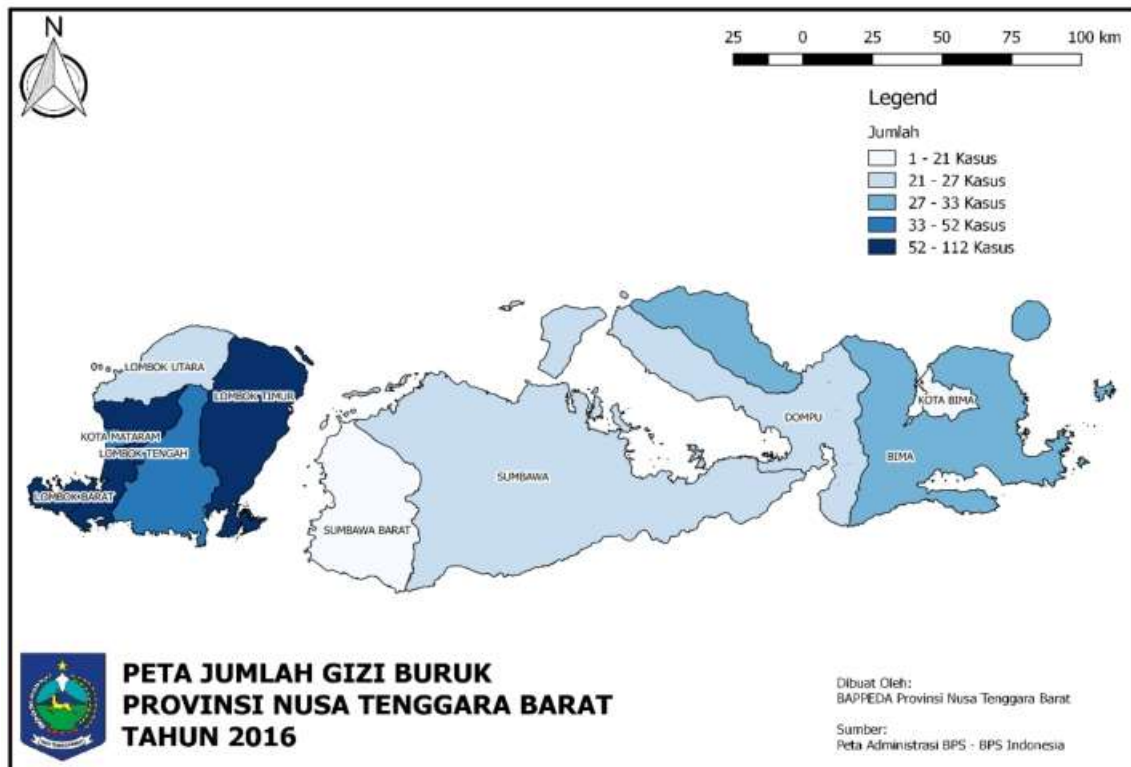
Tabel 29 Prevalensi Kurang Gizi Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalensi Kurang Gizi (%)	18,27	20,60	17,01	20,20	22,60	26,4

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2018

Status gizi seorang anak berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Masalah gizi akan cepat ditangani jika ditemukan sedini mungkin, baik di posyandu ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Kasus gizi kurang dan gizi buruk dipengaruhi oleh keaktifan orang tua menimbang anaknya dan melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya di posyandu. Upaya mengatasi persoalan gizi buruk di NTB dengan mengoptimalkan program penimbangan anak,

termasuk membebaskan biaya pengobatan jika ada kasus gizi buruk sehingga tidak lagi ada keluhan masalah ekonomi menjadi kendala penyembuhan anak gizi buruk. Selain itu dengan memberikan pelayanan ke masyarakat dan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK). Pada tabel diatas terjadi peningkatan realisasi penanggulangan kurang gizi yang tadi nya di tahun 2017 ditarget kan sebesar 15,5% meningkat menjadi 22,6%.



Gambar 17 Peta Jumlah Gizi Buruk Provinsi NTB Tahun 2016
Sumber BPS Povinsi NTB

Tingkat penemuan gizi buruk di Pulau Sumbawa relatif rendah, yang berada di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi daerah dengan jumlah penemuan kasus gizi buruk terendah pada tahun 2016. Sedangkan yang tertinggi berada di kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Mataram.

Melalui Program Generasi Emas NTB (GEN) dan program Aksi Seribu Hari (ASHAR), yang merupakan program terpadu berbagai sektor dengan fokus tumbuh kembang pada anak merupakan program unggulan yang sangat strategis dalam upaya mengatasi gizi kurang dan gizi buruk. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung program GEN dan menurunkan prevalensi kurang gizi antara lain:

a. Pembinaan Keluarga Sehat

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup sehat bagi keluarga binaan. Sasarannya adalah kelompok rentan masalah kurang gizi seperti ibu

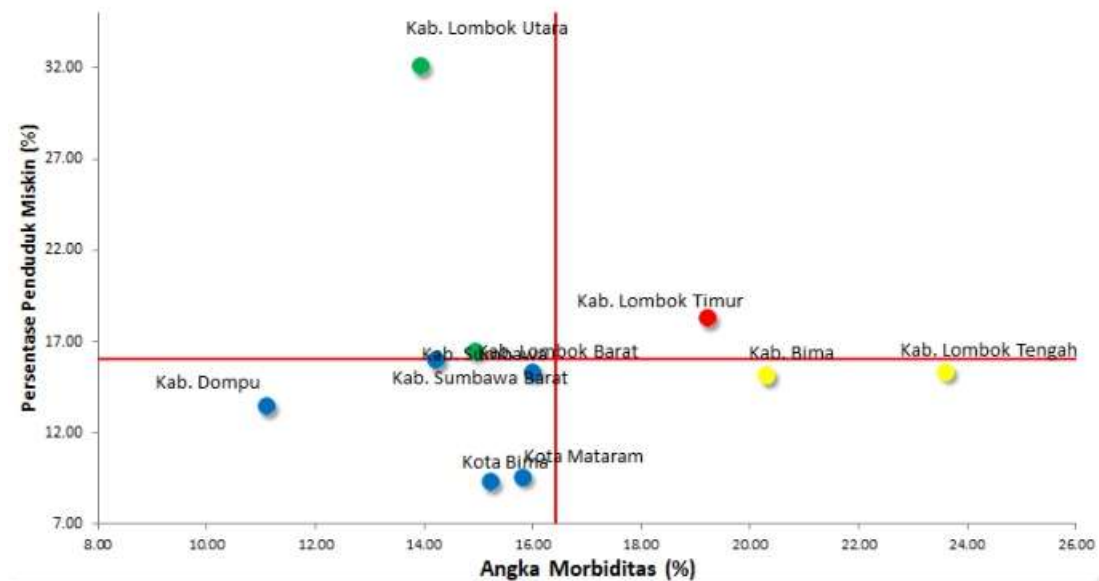
hamil, ibu menyusui, bayi dan balita; dengan melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan masalah gizi.

- b. Pendampingan ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai baduta di 100 Desa GEN di kabupaten/kota se-NTB oleh Mahasiswa dalam rangka ASHAR (Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan)
- c. Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Petugas Kesehatan dan Kader Posyandu terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak.
- d. Bekerjasama dengan lintas sektor sektor terkait seperti TP PKK, DP3AP2KB, DPMPD, Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB, Organisasi Profesi (PERSAGI, IDI, IBI dll), TOMA, TOGA, Forum Peduli ASI (FPA), Bappeda, Biro Administrasi Kesra, Biro Hukum, dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada sasaran prioritas seperti pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK, ibu menyusui dan lain-lain. Distribusi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita kurus di semua kabupaten/kota.

b. Angka Morbiditas

Morbiditas adalah keadaan sakit atau terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup. Morbiditas merupakan derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi yang mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang sering kali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang beresiko.

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Morbiditas (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%)
 Sumber: BPS (Susenas)
Nusa Tenggara Barat - 2017



Berdasarkan kuadran diatas Wilayah dengan angka morbiditas yang menjadi prioritas yaitu Lombok Timur (19.20%). Untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah menjadi prioritas kedua untuk angka morbiditas yaitu Kabupaten Bima dan Lombok Tengah, selanjutnya untuk prioritas ketiga Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat. Selanjutnya wilayah dengan angka morbiditasnya baik yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Mataram dan Kota Bima.

c. Korelasi Antara Tingkat Kemiskinan dengan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menyukkseskan pembangunan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Indikator kesehatan salah satunya ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang dari lahir selama hidupnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat karena dapat mencerminkan lama hidup dan kualitas hidup sehat seseorang. AHH yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi angka harapan hidup semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut. Panjangnya usia yang ditempuh seseorang tidak terlepas dari dukungan faktor kesehatan yang baik.



Gambar 18 Peta Angka Harapan Hidup Provinsi NTB Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas AHH Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan, pada tahun 2015 AHH NTB Sebesar 65,38 pada tahun 2017 naik menjadi 65.55. Hal ini diduga karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, memilih memeriksakan kesehatan dan mendapatkan pengobatan pada sarana kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Perbaikan kondisi kesehatan masyarakat juga didukung oleh beberapa faktor lain diantaranya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, angka kesakitan, dan ketersediaan sarana kesehatan.

Tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan social akan mempersulit terpenuhinya berbagai keperluan pangan bergizi atau kemampuan untuk menangkis penyakit. Oleh karena, itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

3. Bidang Infrastruktur dasar.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Proses pembangunan memiliki tiga tujuan yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006).

Pembangunan infrastruktur akan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial (Setiadi, 2006).

Salah satu pembangunan yang telah dilakukan yakni pembangunan jalan nasional 98 persen (mantap), provinsi 83 persen (mantap), kabupaten 59 persen (mantap). (*Sumber BPS 2017*). Faktor lain yang mempengaruhi infrastruktu yakni :

a. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Penduduk merupakan bagian yang sangat esensial dalam pembangunan bangsa maupun pembangunan suatu daerah, karena penduduk merupakan potensi pembangunan. Jika penduduk diberdayakan maka akan mampu dijadikan faktor pendorong bagi percepatan pembangunan dan membentuk penduduk sebagai model potensi pembangunan, sudah tentu harus diberikan ruang gerak pemberdayaan. Namun untuk memulainya maka harus diawali dengan diketahuinya jumlah dan struktur penduduk itu sendiri.

Untuk mengetahui struktur dan jumlah penduduk maka harus dicarikan suatu format metode yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenaran datanya. Sedangkan untuk memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penataan Administrasi Kependudukan yang dilakukan di Provinsi NTB sampai dengan Desember 2017, dari 3.757.949 penduduk wajib KTP telah dilakukan perekaman sebanyak 3.345.513 orang atau 89,02 persen, dengan KTP yang telah tercetak sebanyak 3.140.376 orang atau 83,57 persen. Rincian rekapitulasi administrasi kependudukan per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat S/D Bulan Desember 2017

No	Kabupaten /Kota	Wajib KTP	Rekam	%	Cetak	%
1	Kota Mataram	298.997	298.562	99,85	294.412	98,47
2	Lombok Barat	518.826	436.125	84,06	447.020	86,16
3	Lombok Utara	164.099	163.278	99,50	178.993	109,08
4	Lombok Tengah	752.644	639.703	84,99	574.193	76,29
5	Lombok Timur	925.143	800.001	86,47	667.437	72,14
6	Sumbawa Barat	93.416	91.796	98,27	87.920	94,12
7	Sumbawa	372.037	313.036	84,14	292.240	78,55
8	Dompu	150.840	146.840	97,35	139.376	92,40
9	Bima	380.168	357.469	94,03	362.350	95,31
10	Kota Bima	101.779	98.703	96,98	96.435	94,75
Total		3.757.949	3.345.513	89,02	3.140.376	83,57

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2017

Pelaksanaan kinerja administrasi kependudukan yang terlihat dari banyaknya wajib KTP yang belum melakukan perekaman yaitu terjadi di Kabupaten Lombok Timur hanya mencapai 72,14 persen, diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah sebesar 76,29 persen dan Kabupaten Sumbawa sebesar 78,55 persen. Menyikapi hal ini pemerintah telah melakukan program pendataan bagi masyarakat yang berumur 17 kebawah yang disebut Kartu Identitas Anak (KIA) untuk mendapatkan KTP sementara. Kebijakan ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan hak-hak seperti barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan

penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Luas hunian yang layak per anggota rumah tangga untuk tempat tinggal adalah minimal 10 (sepuluh) m² per anggota rumah tangga. Hasil Susenas Tahun 2017 menunjukkan bahwa tempat tinggal yang mempunyai hunian di bawah 10 (sepuluh) m² per anggota rumah tangga mencapai 22,84 persen. Sementara itu, luas lantai hunian per anggota rumah tangga yang lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) m² per anggota rumah tangga sebesar 77,16 persen.

Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, guna meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. Perkembangan jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani secara kumulatif selama tahun 2013-2017 mencapai 25.360 unit dengan perkembangan disajikan pada tabel berikut.

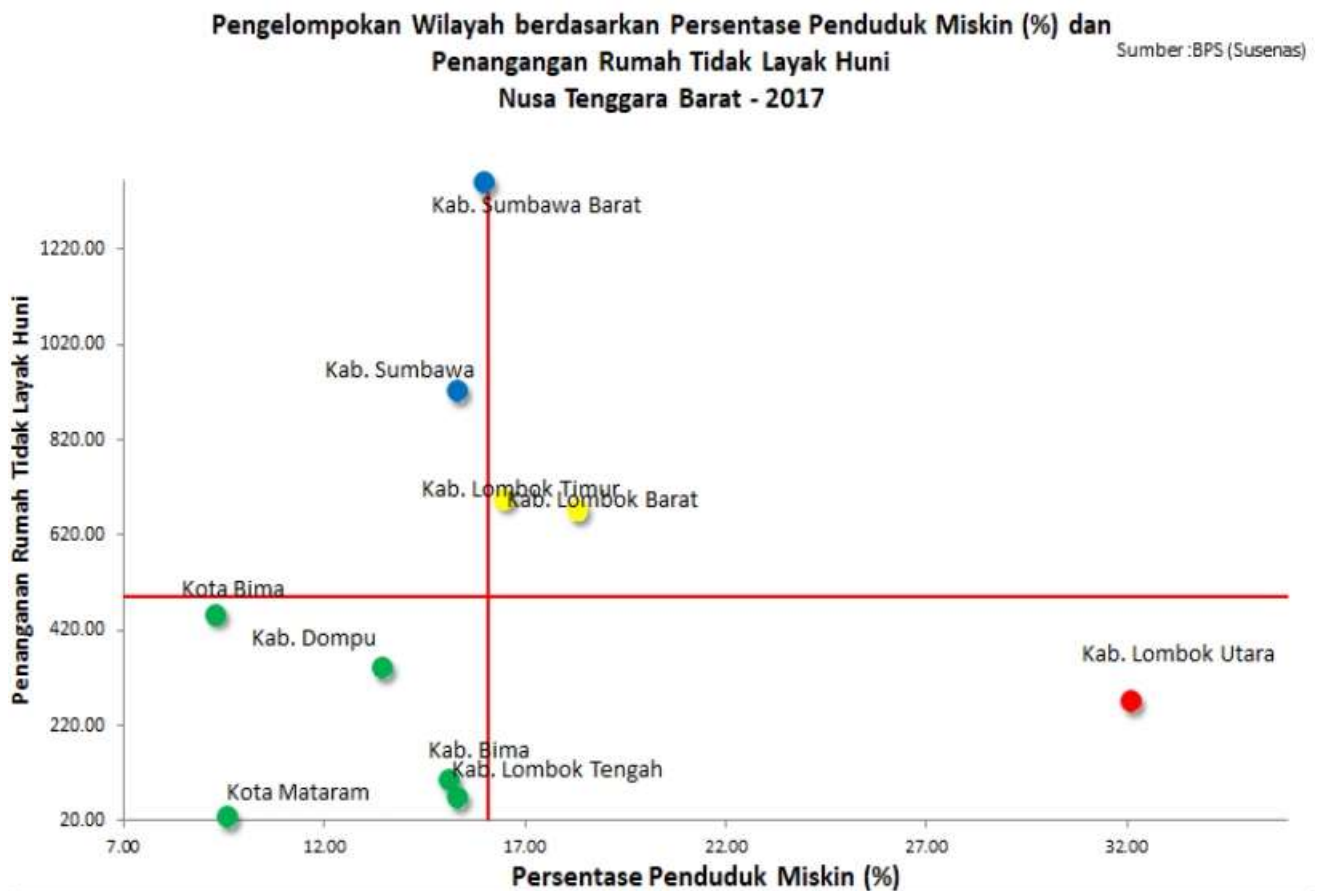
Tabel 31 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Mataram	532	25	23	26	32
2	Lombok Barat	3.276	153	116	158	160
3	Lombok Tengah	5.414	252	156	195	76
4	Lombok Utara	1.040	48	56	70	208
5	Lombok Timur	5.789	270	242	309	217
6	Sumbawa Barat	321	15	20	18	96
7	Sumbawa	2.069	96	61	76	52
8	Dompu	1.192	55	31	38	72
9	Bima	1.683	79	72	92	121
10	Kota Bima	155	7	23	26	47
Jumlah		21.471	1.000	800	1.008	1.081

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2013-2017

Target 1.073 Berdasarkan data Proyeksi Penduduk tahun 2017 di Nusa Tenggara Barat jumlah rumah Penanganan rumah layak huni terendah di Kota Mataram yaitu sebesar 32 unit, diikuti Kota Bima sebesar 47 unit dan Kabupaten Sumbawa

sebesar 52 unit. Tentunya ini diberikan berdasarkan angka kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota



Berdasarkan Kuadran diatas wilayah yang menjadi priorita utama yaitu Kab. Lombok Utara dengan Persentase Penduduk Miskin Tinggi dikuti dengan Penanganan Lumah Layak Huni (RTHL) rendah (208 unit). Sedangkan untuk prioritas kedua dengan Persentase Penduduk Miskin tinggi diikuti RTHL tinggi berada di wilayah Kab. Lombok Timur (217 unit) dan Kab. Lombok Barat (160 unit). Persentase Penduduk Miskin baik dikuti dengan Penanganan Lumah Layak Huni (RTHL) yang tepat terdapat di wilayah Kab. Sumbawa Barat (96 unit) dan Kab Sumbawa (52 unit).

Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya. Peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman juga menjadi pengaruh terhadap kemiskinan karena semakin banyak lahan yang dibangun menjadi lahan perumahan akan membuat masyarakat miskin tidak apat membeli rumah tersebut dikarenakan rendahnya penghasilan yang didapatkan dengan konsep perumahan.

c. Perhubungan

Perkembangan Kabupaten/Kota di Indonesia pada saat ini berada dalam tahap pertumbuhan urbanisasi yang tinggi sebagai akibat adanya laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat sehingga kebutuhan penduduk untuk melakukan perjalanan ataupun pergerakan akan meningkat pula, dimana hal ini menuntut adanya penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsekuensi atas keberhasilan tersebut terhadap pelayanan jasa transportasi, khususnya transportasi jalan raya adalah meningkatnya permintaan penyediaan jasa angkutan yang makin meluas dan dengan kualitas yang semakin meningkat pula. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan mobilitas seseorang meningkat sehingga kebutuhan pergerakannya pun meningkat melebihi kapasitas sistem prasarana transportasi. Kebutuhan akan mobilitas memiliki beberapa ciri yang berbeda seperti tujuan perjalanan, moda angkutan yang digunakan dan waktu terjadinya pergerakan. Sistem prasarana transportasi terbentuk dari sistem prasarana penunjang, sistem manajemen transportasi dan penggunaan beberapa jenis moda transportasi dengan berbagai macam operatornya.

Meningkatnya jumlah penduduk provinsi akan disertai dengan penambahan jumlah sarana angkutan darat baik angkutan publik yaitu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta angkutan umum, dan menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan.

Tabel 32 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2016

No.	Jenis Pelayanan	Unit	Seat
1	AKDP Lombok	170	3.197
2	AKDP Sumbawa dan Sumbawa Barat	102	2.469
3	AKDP Dompu	44	1.303
4	AKDP Bima	117	3.452

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB tahun 2016

Sedangkan untuk transportasi laut, terdapat beberapa pelabuhan yang melayani angkutan barang dan orang secara Liner (terjadwal) dan Trampo (Tidak Berjadwal) terdapat juga tiga rute yang melayani trayek perintis dan dianggarkan melalui Kementerian Perhubungan RI dimana rute tersebut melewati berbagai pelabuhan di wilayah Tengah dan Timur Indonesia.

d. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman berkontribusi terhadap 88 persen kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Bagi anak-anak yang bertahan hidup, seringnya menderita diare berkontribusi terhadap masalah gizi, sehingga menghalangi anak-anak untuk dapat mencapai potensi maksimal mereka. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan implikasi serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Air minum dan sanitasi layak merupakan indikator sasaran pembangunan milenium (MDG's). Air minum yang berkualitas (layak) merupakan air minum yang terlindung meliputi air leding (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat memanfaatkan sumur/mata air/air sungai/hujan/lainnya sebagai sumber air minum, yaitu sebesar 61,60 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan/air isi ulang untuk minum mencapai 21,05 persen dan 17,35 persen memanfaatkan leding sebagai sumber air minum baik dimasak terlebih dahulu maupun langsung diminum tanpa diproses terlebih dahulu. Di daerah perdesaan masih sedikit yang menggunakan leding sebagai sumber air minum, yaitu 12,69 persen. Sementara itu, sebagian besar rumah tangga (73,68 persen) di perdesaan masih menggunakan sumur/mata air/air sungai/hujan/lainnya dan hanya sedikit yang menggunakan air kemasan untuk sumber air minum yaitu sebesar 13,63 persen. Berbeda halnya dengan di perkotaan, sebesar 30,44 persen menggunakan air kemasan sebagai air minum, 23,24 persen rumah tangga mengakses leding sebagai sumber air

minum dan 46,32 persen mengakses sumur/mata air/air sungai/hujan/lainnya sebagai sumber air minum

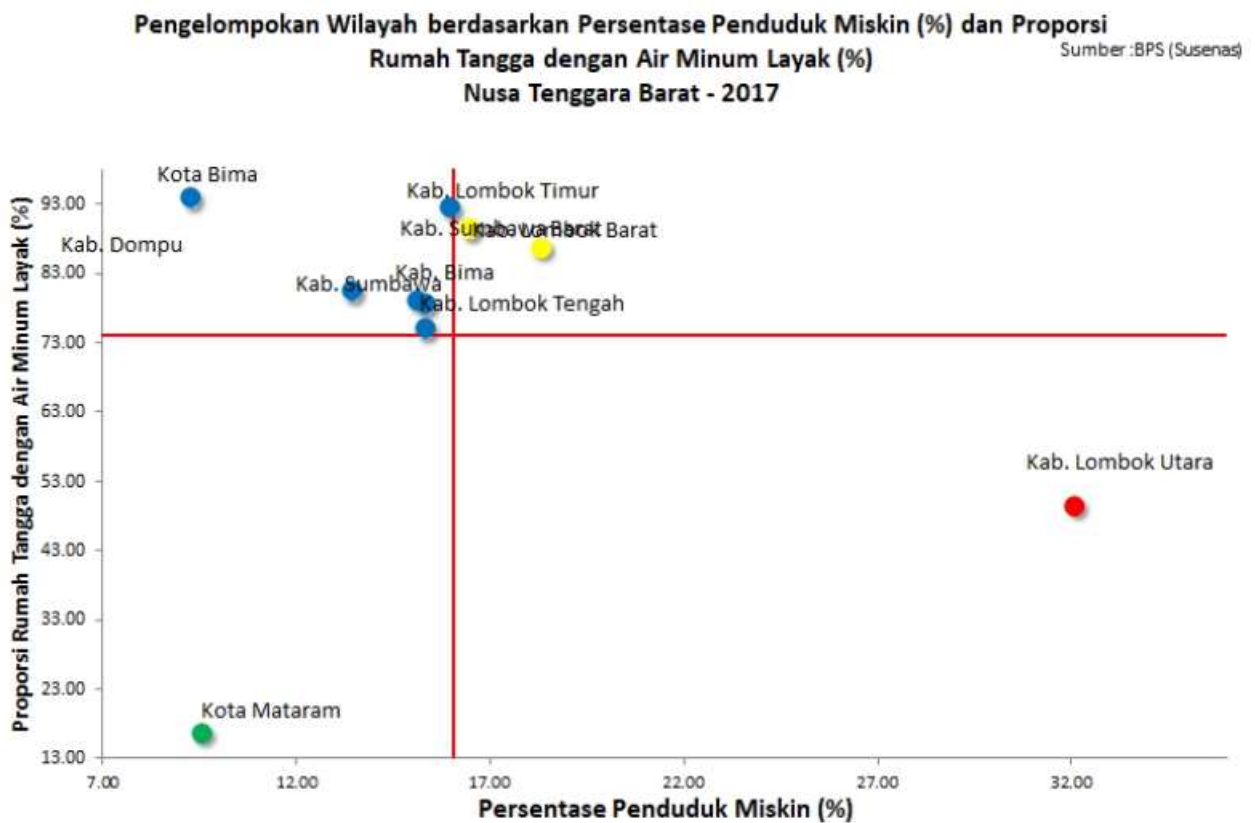
Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2017 sudah mencapai ratio rata-rata 85,55 persen yang terdiri atas perkotaan mencapai 90,65 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah mencapai 80,45 persen.

Tabel 33 Cakupan Air Bersih Perkotaan Dan Perdesaan

Cakupan Air Bersih	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Perkotaan (%)	80.23	82.09	83.25	89,95	90,65	92,66
Perdesaan (%)	72.15	74.80	75.57	78.47	80.45	82,49

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTB, Tahun 2017

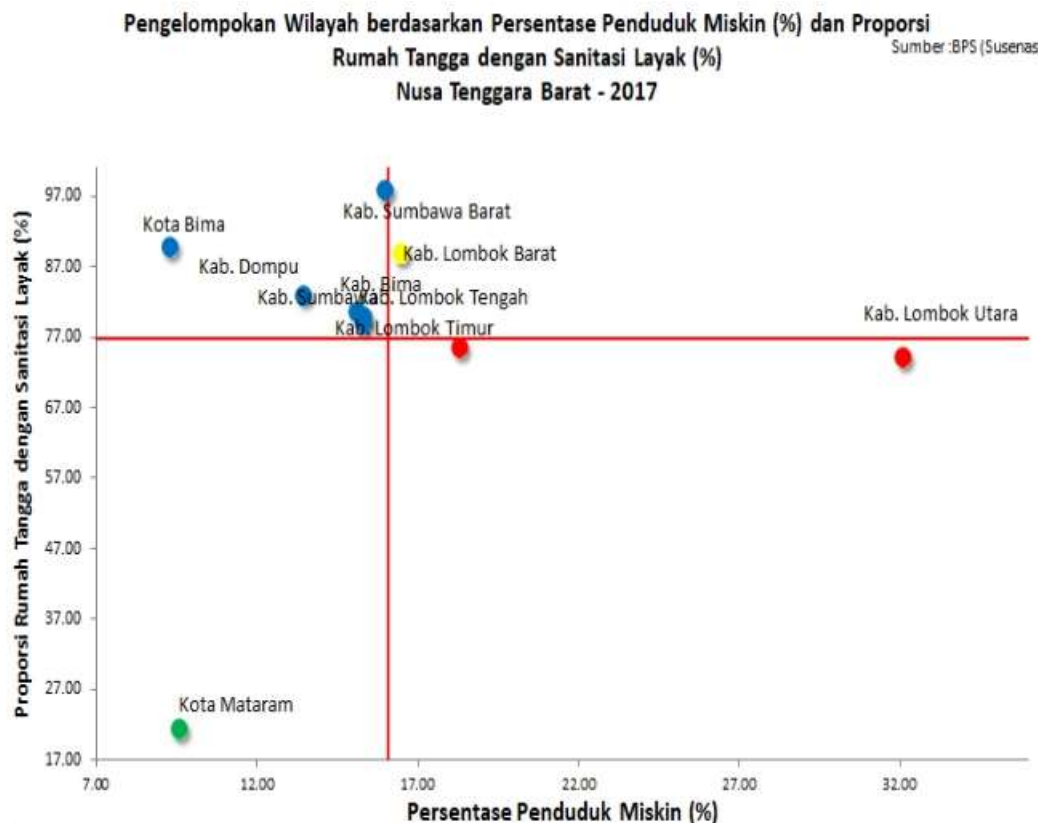
Cakupan air bersih di kawasan perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Cakupan air bersih pedesaan pada tahun 2018 sebesar 82,49% sedangkan perkotaan 92,66%. Target kota 87,56 desa 81,87



Berdasarkan kuadran diatas, yang menjadi prioritas Nusa Tenggara Barat berdasarkan persentase penduduk miskin dan proporsi rumah tangga dengan air minum layak yaitu kabupaten Lombok Utara. Kemudian untuk prioritas kedua yaitu kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa Barat, berturut-turut untuk prioritas ketiga ada kabupaten kota Bima, kabupaten Lombok Timur,

Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan untuk Kota Mataram proporsi rumah tangga dengan air minum layak relative tinggi.

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septik (septic tank)/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang digunakan sendiri atau bersama. Sanitasi yang layak penting bagi penduduk atau rumah tangga di daerah perkotaan maupun perdesaan karena menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Untuk fasilitas tempat buang air besar, rumah tangga yang telah memiliki jamban sendiri di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 62,06 persen, sebesar 16,54 persen mengakses ke jamban yang digunakan secara bersama (lebih dari satu rumah tangga) atau MCK (Mandi, Cuci, Kakus) komunal dan 21,40 rumah tangga tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Rumah tangga di daerah perkotaan sudah banyak yang memiliki jamban sendiri yaitu sebesar 70,28 persen. Sedangkan sebagian besar rumah tangga di daerah perdesaan yang menggunakan jamban milik sendiri sebesar 55,56 persen, rumah tangga yang masih akses ke jamban bersama atau MCK komunal sebesar 16,95 persen bahkan yang tidak menggunakan jamban atau tidak memiliki jamban sebesar 27,49 persen. Berikut Grafik Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak :



Dari grafik diatas yang menjadi prioritas utama dengan Presentase Penduduk Miskin tinggi diikuti Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak rendah yakni Kab. Lombok Utara (73,96%) dan Kab. Lombok Timur (75,40%). Hal ini dapat disebabkan kurangnya sarana penunjang dan kurangnya pengadaan alat di daerah tersebut.

e. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan sebagai sumber daya ekonomis yang paling utama yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan. Dalam waktu yang akan datang kebutuhan listrik akan terus meningkat seiring dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk, jumlah investasi, perkembangan teknologi termasuk didalamnya perkembangan dunia pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. Listrik pada saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat selain air bersih. Berikut ini rasio ketersediaan daya listrik tahun 2013-2017. Daerah yang sedikit menerima listrik yakni Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat dan Kab. Tengah.

Tabel 34 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Daya terpasang (MW)	367.711	390.121	393.589	446.592	443.280
2	Kebutuhan Daya (MW)	229.491	252.193	272.637	306.237	328.110
3	Rasio (1/2)	1,60	1,55	1,44	1,46	1,35

Selama 5 tahun terakhir kebutuhan daya listrik terus meningkat, hal ini disebabkan pertumbuhan jumlah pelanggan setiap tahunnya meningkat signifikan. Meskipun demikian jumlah pasokan listrik masih melebihi kebutuhan daya yang tersedia. Kecukupan daya listrik di NTB didukung oleh terbangunnya beberapa pembangkit tenaga listrik baru di beberapa lokasi di NTB. Rasio elektrifikasi target 72,67 realisasi 85,1

Kebutuhan akan tenaga listrik dari pelanggan/masyarakat selalu bertambah dari waktu ke waktu. Untuk tetap dapat melayani kebutuhan tenaga listrik dari para pelanggan, maka sistem tenaga listrik harus dikembangkan seiring dengan kenaikan kebutuhan akan tenaga listrik dari para pelanggan/masyarakat. Kebutuhan listrik di NTB terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan berkembangnya penduduk dan perkembangan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga listrik. Produksi listrik pada tahun 2015 mencapai 1.558,05 juta Kwh meningkat dari tahun sebelumnya yang

mencapai 1.491,78 juta Kwh. Listrik yang terjual juga mengalami peningkatan, dengan besaran mencapai 1.402,29 juta Kwh dengan jumlah pelanggan pada Tahun 2016 mencapai 1.032.862 pelanggan.

Tabel 35 Jumlah Pelanggan Listrik Dari PLN Cabang Mataram, Sumbawa dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2016

Tahun	2013	2014	2015	2016
Pelanggan PLN	874.611	943.299	1.023.233	1.032.862

Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) merupakan prosentase penduduk (KK) NTB yang dapat menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah KK yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100%. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2017.

Tabel 36 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	RT Berlistrik Non PLN	RE non PLN (%)	RT Berlistrik PLN	RE PLN (%)	RE Total (%)
1	Mataram	130.587	-	-	149.445	114,44	114,44
2	Lombok Utara	60.711	2.439	4,02	53.649	88,37	92,39
3	Lombok Barat	192.401	2.811	1,46	158.628	82,45	83,91
4	Lombok Tengah	280.437	3.551	1,27	254.112	90,61	91,88
5	Lombok Timur	349.735	3.598	1,03	310.516	88,79	89,81
6	Sumbawa Barat	36.932	1.179	3,19	33.352	90,31	93,5
7	Sumbawa	118.175	3.961	3,35	119.000	100,7	104,05
8	Dompu	60.457	1.979	3,27	62.744	103,78	107,06
9	Bima	121.111	2.989	2,47	105.800	87,36	89,83
10	Kota Bima	42.331	76	0,18	37.067	87,56	87,56
	Total	1.392.877	22.583	1,62	1.284.314	92,21	92,83

Sumber :

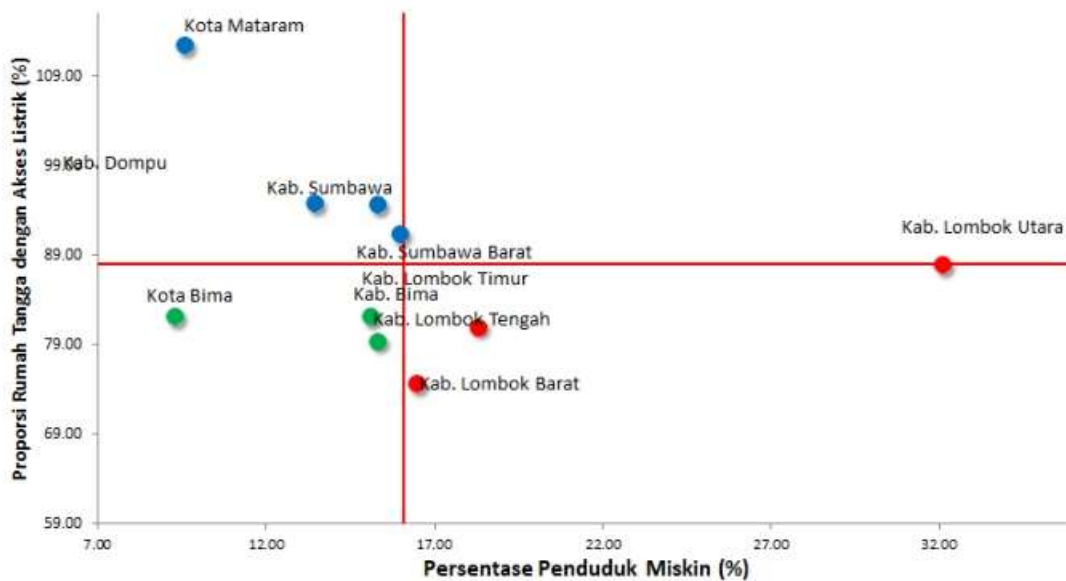
(1) Badan Pusat Statistik, Tahun 2017 (diolah)

(2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2018

(3) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, 31 Desember 2018

Dari tabel di atas diketahui sampai akhir tahun 2018 jumlah penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 1.284.314 KK atau 92,83% dari jumlah penduduk sebanyak 1.392.877 KK. Dengan kata lain masih ada sekitar 1,62% (108.563 KK) penduduk NTB belum menikmati layanan listrik.

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)
 Sumber: BPS (Susenas)
 Nusa Tenggara Barat - 2017



Berdasarkan kuadran diatas, yang menjadi prioritas Nusa Tenggara Barat untuk Proporsi Rumah Tangga Miskin dengan Akses Listrik yaitu Kabupaten Lombok Barat (74,58), Kab. Lombok Tengah (79,34) dan Lombok Utara (87,87). Sedangkan untuk Kab. Sumbawa (94,58), Kota Mataram (112,35) dan Kab. Sumbawa Barat (91,24) proporsi rumah tangga dengan akses listrik relative tinggi.

Selama 5 tahun terakhir dilakukan terobosan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik baik melalui jaringan PLN maupun Non PLN antara lain:

- ✦ Program “Listrik Murah dan Hemat” yaitu memberikan sambungan listrik gratis pada masyarakat yang sudah dilalui oleh jaringan listrik PLN namun belum dapat menikmati listrik.
- ✦ Pembangunan Penerangan Jalan Umum Lighting Emitting Diode (PJU-LED) jaringan listrik PLN di sepanjang jalan Negara mulai Pelabuhan Lembar hingga Pelabuhan Kayangan. Pembangunan penerangan jalan umum juga dilaksanakan mulai dari pelabuhan Poto Tano hingga pelabuhan Sape di ujung timur Pulau Sumbawa yang akan menjadi pelita di sepanjang ruas jalan negara.
- ✦ Program “Desa Mandiri Energi”, yaitu dengan membangun fasilitas kebutuhan energi masyarakat secara mandiri bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN, melalui pemanfaatan sumber energi

terbarukan sesuai potensi setempat. Contohnya adalah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik yang tersebar maupun terpusat (komunal) dan hybrid PLT Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagalistrikan cukup tinggi karena merupakan usaha padat modal dan padat teknologi. Target ini akan mencakup layanan listrik konvensional PT. PLN dan layanan Energi Baru Terbarukan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN, karena minimnya akses menuju wilayah tersebut. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut diperoleh melalui pembangunan sarana dan prasarana bidang ketenagalistrikan baik yang bersumber dari Pembangkit PLN on grid maupun dari sumber energi baru terbarukan off grid.

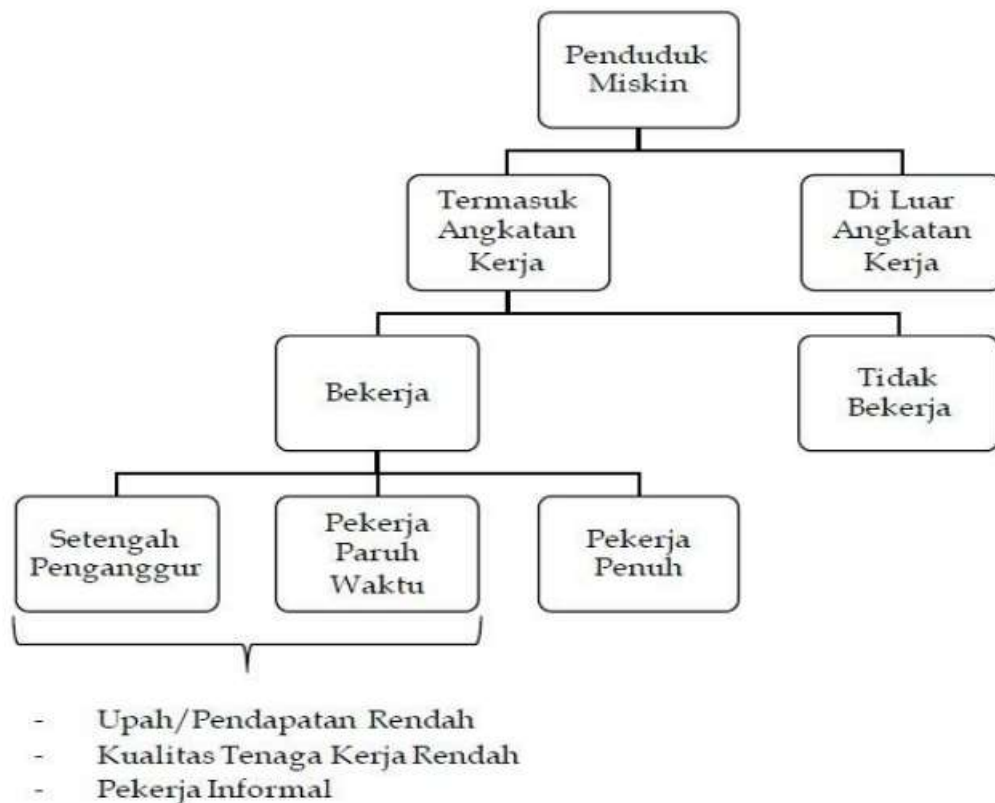
Di NTB ada 99,43 persen rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan baik PLN (99,02 persen) maupun non PLN (0,41 persen). Hal ini berarti bahwa masih ada sebesar 0,57 persen rumah tangga yang belum bisa menikmati fasilitas listrik.

4. Bidang ketenagakerjaan

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Penduduk miskin dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu penduduk miskin yang berada dalam angkatan kerja dan penduduk miskin yang berada di luar angkatan kerja. Penduduk miskin yang berada di luar angkatan kerja biasanya memiliki ketergantungan secara ekonomi terhadap penduduk yang berada dalam angkatan kerja. Sedangkan penduduk miskin yang berada dalam angkatan kerja terbagi dua yaitu penduduk miskin yang bekerja dan penduduk miskin yang tidak bekerja. Penduduk miskin yang tidak bekerja, sangat jelas bahwa kemiskinannya disebabkan ketiadaan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama dan di negara berkembang seperti Indonesia yang tidak memiliki jaminan asuransi bagi penganggur, jumlah

kelompok ini tidak begitu besar. Sebaliknya yang paling menarik adalah penduduk



miskin yang bekerja di mana pekerjaan yang dimilikinya tidak mampu memberikan penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Kelompok terakhir ini disinyalir memiliki proporsi terbesar dari seluruh penduduk miskin yang ada.

Penduduk miskin yang bekerja dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu kelompok setengah penganggur, pekerja paruh waktu dan kelompok yang bekerja penuh. Setengah penganggur adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu tetapi masih mencari pekerjaan, sedangkan pekerja paruh waktu pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu dan tidak mencari pekerjaan. Selebihnya adalah pekerja penuh yaitu pekerja dengan jam kerja di atas 35 jam seminggu. Baik penduduk miskin yang setengah menganggur, bekerja paruh waktu maupun yang bekerja penuh, ketiganya memiliki ciri upah/pendapatan yang diterima pekerja cukup rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah serta umumnya bekerja di sektor informal. Kondisi inilah yang diduga diantara penyebab mereka terjebak dalam kondisi kemiskinan.

Gambar 19 Kerangka Analisis Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

a. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat, yang diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran.

Tabel 37 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017

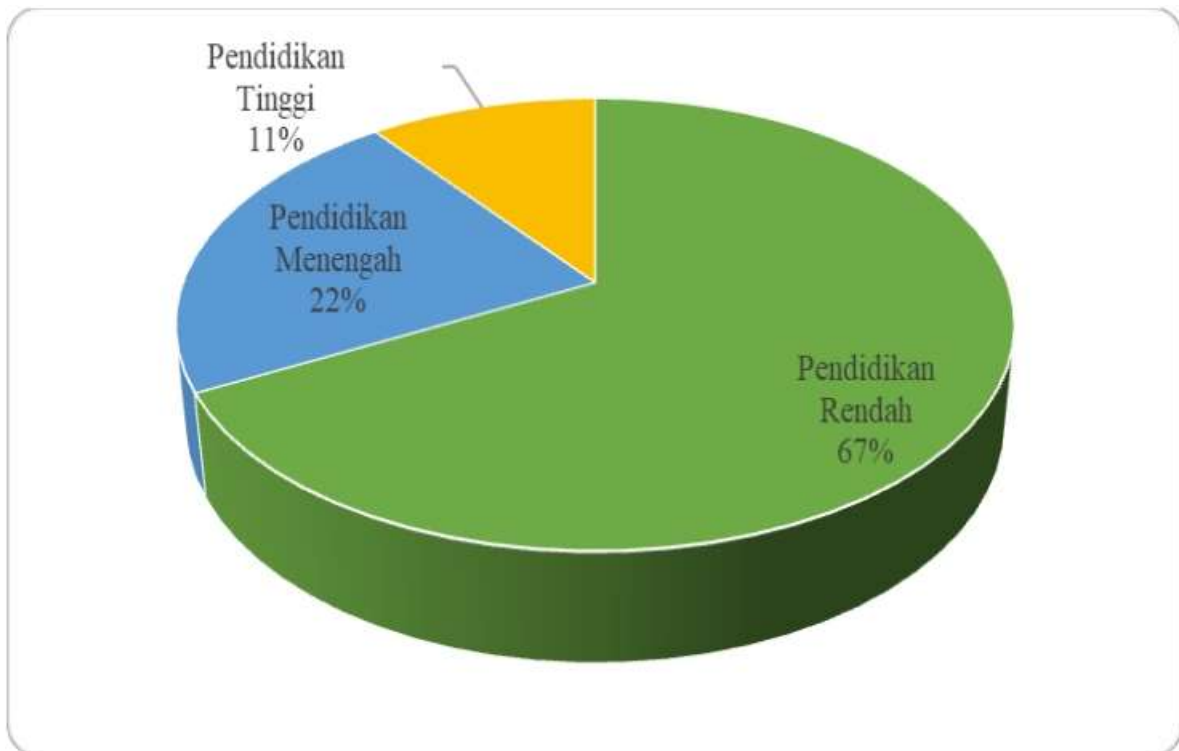
Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian	45,29	43,13	39,01	38,90	29,69
Industri	8,05	8,89	9,38	8,87	14,05
Konstruksi	5,33	5,01	7,36	6,51	6,73
Perdagangan	18,88	20,20	21,58	19,39	23,28
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3,55	3,90	3,28	4,71	4,76
Keuangan	1,52	1,40	1,14	1,76	3,1
Jasa Kemasyarakatan	15,62	15,51	16,47	17,24	16,92
Lainnya	1,76	1,97	1,77	2,62	1,47

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan lapangan usaha pada periode Agustus 2013 – Agustus 2017, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi NTB adalah pertanian, kemudian diikuti oleh perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan industri sedangkan yang paling rendah menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha listrik, gas dan air. Tabel berikut memberikan informasi mengenai proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha.

Hal yang menarik adalah adanya penurunan persentase atau porsi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dari 45,29% menjadi 29,69%. Hal ini berbanding lurus dengan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian yang juga menunjukkan tren yang menurun.

Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2017 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 1.559.978 orang (67,34%). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 513.943 orang (22,18%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 242.799 orang (10,48%) mencakup 41.481 orang berpendidikan Diploma dan 201.318 orang berpendidikan Universitas.



Gambar 20 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB Tahun 2017

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB 2018

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang bekerja di Provinsi NTB masuk dalam pendidikan rendah, hal ini akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan yang diperoleh. Dengan kualifikasi pendidikan seperti itu, maka upah yang diperoleh cenderung akan relatif rendah dan kesejahteraan yang minim.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahun membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB selama periode tahun 2013 – 2017 cenderung menurun dari 5,38 persen di tahun 2013 menjadi 3,32 persen atau setara dengan 79.449 orang di tahun 2017, berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,50 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka NTB tahun 2017 lebih rendah 0,62 point jika dibandingkan tahun 2016.

Tabel 38 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2013-2017

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,38	5,75	5,69	3,94	3,32

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,32%. Dalam kurun waktu 6 tahun (2012-2017), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 1.91% lebih tinggi dari penurunan pada tingkat nasional yaitu 0,63% pada periode yang sama. Target 4,82

Tabel 39 Kondisi Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2016- 2017

No	Keterangan	2016	2017
1	TPT Penduduk Umur Muda (persen)	14,72	11,25
2	Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Dewasa	9,2	6,11
3	Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur	66,59	52,3

Sumber: BPS Provinsi NTB

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penganggur terbuka masih berada pada penganggur orang dewasa.



Gambar 21 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2017
Sumber BPS Provinsi NTB

Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan 2017, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu berada di bawah nasional. Meningkatnya aktivitas

perekonomian pada beberapa sektor perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi faktor pendorong (driving forces) dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumbawa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Lombok. Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah dengan TPT tertinggi pada tahun 2017.

c. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran dari suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan serapan tenaga kerjanya semakin besar sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi semakin meningkat, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat dan ini akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi tingkat ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada data BPS Provinsi NTB diketahui bahwa selama periode tahun 2013 – 2018 jumlah angkatan kerja di NTB terus mengalami peningkatan dari 2.094.608 orang di tahun 2013 menjadi 2.237.381 orang di tahun 2018 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 40 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angkatan kerja	2.094.608	2.221.810	2.255.879	2.464.331	2.396.169	2.237.381
	Laki-laki	1.219.062	1.277.350	1.311.367	1.342.716	1.363.798	1.269.780
	(%)	-58,2	-57,49	-58,13	-54,49	-56,92	-56,75
	Perempuan	875.546	944.460	944.512	1.121.615	1.032.371	967.601
	(%)	-41,8	-42,51	-41,87	-45,51	-43,08	-43,25
	r (%)	0,28	3,53	1,53	9,24	-2,77	-6,63
2	Pengangguran	112.708	127.710	128.376	97.021	79.449	83.260
	Laki-laki	72.284	81.886	88.294	61.129	51.471	51.199
	(%)	-64,13	-64,12	-68,78	-63,01	-64,78	-61,50
	Perempuan	40.424	45.824	40.082	35.892	27.978	32.058

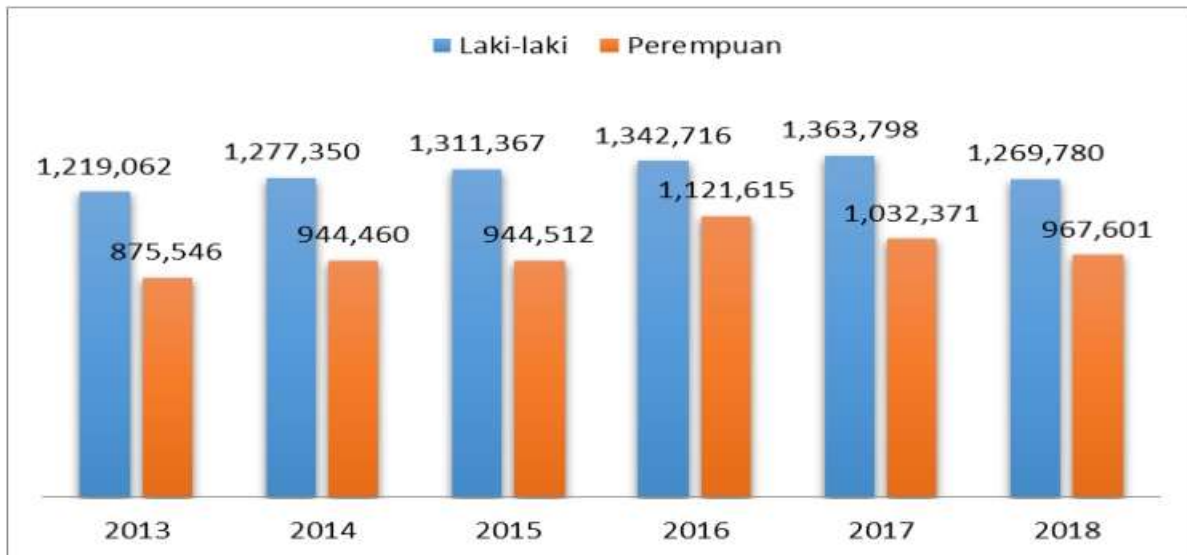
No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(%)	-35,87	-36,88	-31,22	-36,99	-35,22	-38,50
	r (%)	2,51	12,3	0,52	-24,42	-18,11	4,80
3	TPT (%)	5,38	5,75	5,69	3,94	3,32	3,72

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang bertahap. Peningkatan inventaris sumber daya manusia secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong pada peningkatan Produk Domestik Bruto Riil yang ditunjukkan oleh peningkatan stok kapital, neraca perdagangan dan konsumsi rumah tangga.

Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh pendidikan formal yang dimiliki, pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja. Pendidikan merupakan investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan human capital melalui pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas kerja, di mana peningkatan produktivitas tersebut pada gilirannya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, pendidikan juga diperlukan dalam peningkatan teknologi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara mikro individu maupun rumah tangga, pendidikan (dan juga pelatihan) akan meningkatkan keahlian, kompetensi, kinerja dan daya saing individu dalam dunia kerja yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan upah dan pendapatan.

Jumlah angkatan kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, meskipun secara tren menunjukkan tren yang positif.



Gambar 22 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2018
Sumber: BPS Provinsi NTB

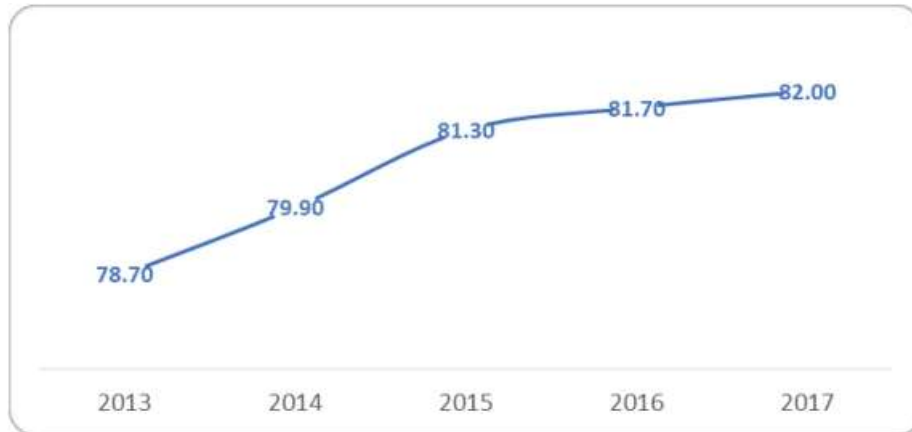
Data ini sejalan dengan kondisi dimana peran serta perempuan dalam ekonomi dan politik yang tercermin dari indikator IPG dan IDG masih cenderung rendah.

5. Bidang ketahanan pangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. PPH menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor

100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989). Metode ini terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020. Perkembangan capaian PPH di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 23 Perkembangan Pola Pangan Harapan Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk NTB sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan kualitas yang terus membaik atau mengarah ke konsumsi yang beragam dengan skor PPH mendekati 100. PPH dihitung dengan mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan berdasarkan data susenas yang dipersentase kemudian dikalikan dengan kecukupan konsumsi energi pangan sebesar 2.000 (Kkal/kap/hari) dan kecukupan konsumsi protein (52 gram/kap/hari). Perkembangan kualitas konsumsi pangan penduduk NTB tahun 2013 sd 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 41 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2013-2017

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Konsumsi Aktual Tahun (gr/kap/hari)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi-padian	275	396,0	354,7	356,3	344,2	363,2
	Beras		323,6	321,9	321,4	320,9	320,6
2	Umbi-umbian	100	21,6	24,1	19	19	22,1
3	Pangan Hewani	150	114,6	108,4	118,4	115,4	87,9
4	Minyak dan Lemak	20	15,6	18,5	21,2	18,9	21,0
5	Buah/Biji Berminyak	10	5,4	3,9	4,7	3,3	3,4
6	Kacang-	35	21,2	22,2	23	20,4	21,6

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Konsumsi Aktual Tahun (gr/kap/hari)				
			2013	2014	2015	2016	2017
	kacangan						
7	Gula	30	17,0	14,6	17,2	11,9	16,7
8	Sayur dan Buah	250	260,6	275,4	269	251,9	197,2
9	Lain-lain	-	-	100,3	57,4	68,1	85,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa konsumsi aktual padi-padian masih di atas konsumsi ideal sebesar 275 gr/kapita/hari, terutama konsumsi beras yang masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan salah satunya karena belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat. Tingginya konsumsi protein sumbangan kelompok pangan padi-padian (beras) mencapai 72,0 persen, padahal protein beras memiliki kandungan 98 persen indeks glikemik. Indeks Glikemik adalah zat yang mempercepat merubah karbohidrat menjadi gula, sehingga menyebabkan masyarakat banyak menderita penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, kolesterol tinggi, darah tinggi, obesitas (kegemukan). Alternatif lain sumber karbohidrat yang perlu ditingkatkan konsumsinya adalah umbi-umbian. Berdasarkan data di atas konsumsi umbi-umbian masih jauh di bawah konsumsi ideal. Perkembangan konsumsi padi-padian dan umbi-umbian penduduk NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 24 Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2013-2017
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Subsistem ketahanan pangan yang sangat menentukan ketersediaan pangan adalah subsistem ketersediaan pangan. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 mensyaratkan penyediaan pangan setara energi, adalah minimal sebesar 2.200 kal/kapita/hari dan protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Ini adalah ukuran penilaian jumlah zat gizi yang diperlukan setiap

individu untuk hidup sehat dan beraktifitas. Ketersediaan energi dan protein di Provinsi NTB tahun 2013-2017 cukup fluktuatif, namun selalu melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan. Secara keseluruhan ketersediaan energi mengalami peningkatan mencapai 3,74 persen/tahun dan 3,03 persen/tahun untuk protein. Perkembangan ketersediaan energi dan protein tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 42 Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Uraian	Ketersediaan Energi dan Protein					Peningkatan Pertahun (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Energi (kalori/kapita/hari)	4.745,00	4.380,00	3.991,00	5.011,83	5.310,97	3,74
2	Protein (gr/kapita/hari)	126,46	115,84	135,17	118,07	137,52	3,03

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Selain menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi, penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dalam mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan terutama pada saat terjadi bencana, paceklik serta menjaga stabilitas harga. Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kuatnya ketahanan pangan suatu wilayah atau daerah. Perkembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di Provinsi NTB tahun 2013 s.d 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 43 Cadangan Pangan Provinsi NTB 2013-2017

No	Uraian	Cadangan Pangan (Ton Beras)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi NTB	167,04	156,55	156,21	164,77	137,18
2	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	87,54	84,19	70,93	592,33	145,73
3	Cadangan Pangan Masyarakat	980,99	608,51	755,41	112,32	163,00
Jumlah		1.235,57	849,25	982,55	869,42	445,91

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan, dilakukan pemantauan harga pangan ditingkat pengumpul, sebagai upayaantisipasi jika terjadi gejolak harga untuk dilakukan operasi pasar pada saat harga pangan sudah melebihi batas toleransi yang ditentukan. Perkembangan harga

pangan di tingkat pengumpul tahun 2013-2017 di Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 44 Perkembangan Harga Pangan ditingkat Pengumpul di Provinsi NTB Tahun 2013-2017

Tahun	Harga (Rp)						
	Beras Super/ Premiu	Beras Medium	Jagung Pipilan	Kedelai Lokal	Minyak Goreng Curah	Daging Sapi	Cabe Rawit
2014	9.000	8.508	3.992	9.433	12.025	99.308	30.142
2015	9.000	8.969	4.052	8.854	11.167	106.979	32.146
2016	9.646	8.958	5.313	8.979	11.760	117.292	29.041
2017	9.309	9.173	5.200	9.551	12.500	115.000	26.250
Rata-rata	9.239	8.902	4.639	9.204	11.863	109.645	29.395
Peningkatan Pertahun (%)	1,23	2,57	10,17	0,55	1,49	5,14	-4,21

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Pemantauan arus keluar masuk komoditas bahan pangan dari dan menuju Provinsi NTB dilakukan secara rutin setiap bulan menggunakan tenaga Enumerator yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan laut. Melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan laut lokasi pemantauan yaitu Pelabuhan Lembar, Labuhan Haji, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Sape, Benete, Kempo dan Pelabuhan Bima.

Pemantauan arus keluar masuk komoditas strategis dilakukan terhadap 18 komoditas, yaitu: gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe, kacang tanah, kacang hijau, tepung terigu, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, sapi potong, kerbau potong, tembakau, jambu mente, rumput laut dan pakan ternak, dengan hasil seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 45 Arus Keluar Masuk Komoditas Pangan Strategis Tahun 2013-2017

No	Komoditas / Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan	
1	Beras	51	785.241		
	2013	1	96.546	Masuk:	Bali
	2014	13	116.057	Keluar :	Bali, Makassar, NTT, Sumba, Surabaya, Jakarta, Banjarmasin
	2015	24	553.830		
	2016	-	25		
	2017	13	18.783		
2	Jagung	161	1.260.466		

No	Komoditas / Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan	
	2013	3	203.204	Masuk :	NTT, Bali
	2014	9	179.624	Keluar :	Surabaya, Bali, Bajo, Ende, Gresik, Jakarta, Probolinggo, Kupang, Makassar, Jawa Barat, Banjarmasin, Padang, Madiun, Banyuwangi, Kediri, Cirebon,
	2015	7	348.137		
	2016	54	13.001		
	2017	88	516.500		
3	Kedelai	16.369	34.739		
	2013	2.730	21.601	Masuk :	Surabaya dan Banyuwangi
	2014	3.265	4.666	Keluar :	Surabaya, Lab. Bajo, Banjarmasin, Makassar, Marpokot, Bali, Surabaya
	2015	5.206	6.758		
	2016	2.926	230		
	2017	2.242	1.484		
4	Bawang Merah	597	133.236,00		
	2013	97	31.974	Masuk :	Brebes, Surabaya, Probolinggo, banyuwangi, Malang, Mojosari, Makassar, Kudus, Bali
	2014	162	25.665		
	2015	64	37.547	Keluar :	Surabaya, Bali, Banjarmasin, Bau-bau, Gorontalo, Kupang, Makassar, Marpokot, Maumere, Merauke, Reo, Labuan Bajo, Waikabuba, Ende, Bejawa, Jakarta, Sorong, Probolinggo
	2016	96	509		
	2017	178	37.541		
5	Bawang Putih	2.031	179		
	2013	591	33	Masuk :	Bali, Banyuwangi, Malang,
	2014	614	55		

No	Komoditas / Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan	
					Surabaya, Jakarta, Demak
	2015	490	35	Keluar :	Bajawa, NTT
	2016	222	0		
	2017	114	56		
6	Cabai Rawit	454	16.149		
	2013	135	3.124	Masuk :	Sulteng, Jatim, Maluku, Jabar, NTT, Sulsel, Jateng, Sulut, Sultra, Kaltim, Gorontalo, Riau, Bali
	2014	144	2.301		
	2015	76	2.960	Keluar :	Surabaya, Bali, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kep. Riau, Kalteg, Sumatera Selatan, Jambi, DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, Jatim, Kalbar, Kalsel, Sulut, Jambi, Kaltim, Jateng
	2016	49	1.051		
	2017	50	6.713		
7	Daging Ayam	1036	24		
	2013	226	0	Masuk :	Jatim, Bali
	2014	147	6	Keluar :	Makassar, Bali
	2015	23	1		
	2016	204	0		
	2017	436	17		
8	Telur Ayam	11.283	22		
	2013	997	1	Masuk :	Bali
	2014	1.894	18	Keluar :	NTT
	2015	1.246	3		
	2016	3349	0		
	2017	3.797	0		
9	Sapi Potong	2	116.694		
	2013	0	43.074	Masuk :	Manggarai Barat
	2014	0	38.906	Keluar :	Bekasi, Banjarmasin, Balikpapan, Pulau Pinang, Palangkaraya
	2015	0	18.655		
	2016	0	538		
	2017	2	15.521		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Selain ketersediaan, distribusi, dan harga pangan yang stabil, keamanan pangan segar juga perlu dijamin agar masyarakat dapat memperoleh dan mengkonsumsi pangan yang aman. Keamanan pangan telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdagangan produk pangan. Penyediaan pangan yang cukup disertai terjaminnya keamanan, mutu dan gizi pangan yang dikonsumsi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Tuntutan konsumen akan keamanan pangan yang juga turut mendorong kesadaran produsen menuju persaingan sehat yang berujung pada jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Untuk menjamin bahwa penanganan pangan hasil pertanian dilaksanakan dengan baik, maka unit usaha pangan hasil pertanian harus mendapatkan pengakuan jaminan mutu pangan hasil pertanian. Pengakuan tersebut diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dinyatakan mampu dan memenuhi persyaratan. Sertifikasi Prima 3 dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang memberikan jaminan mutu dan aman dikonsumsi. Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi prima tersebut adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat/konsumen, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Kegiatan Sertifikasi Prima dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi NTB yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 321 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009.

Dalam Upaya meningkatkan daya saing produk agribisnis dalam perdagangan domestik dan internasional, penerapan sistem jaminan /manajemen mutu dan keamanan pangan produk (food safety) agribisnis terutama untuk produk segar adalah sangat penting dan menjadi suatu keharusan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran konsumen semakin meningkat terhadap keamanan pangan produk terutama produk segar, yang semakin mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan.

Kendati selama ini, produk pangan segar tak bersertifikat lancar proses pemasaran, kedepan, tak berlaku lagi. Apalagi sekarang sudah memasuki era pasar bebas Asean (MEA) yang mau tak mau menuntut pangan segar itu bermutu dan bersertifikat. Sejumlah provinsi di negeri ini, termasuk luar negeri sudah menerapkannya.

6. Bidang ekonomi

a. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat pada umumnya jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi. Hal ini secara khusus mengacu pada pemahaman anggota dan masyarakat akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat yang dapat diperoleh dengan menjadi anggota atau tidak menjadi anggota.

Setelah melalui berbagai kebijaksanaan pengembangan koperasi pada masa orde baru yang bias pada dominasi peran pemerintah, serta kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya peran koperasi dalam masyarakat Indonesia, bagaimana prospeknya, dan bagaimana strategi pengembangan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang. Melihat sifat dan kondisi krisis ekonomi saat ini serta berbagai pemikiran mengenai usaha untuk dapat keluar dari krisis tersebut, maka koperasi dipandang memiliki arti yang strategis pada masa yang akan datang.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengukur kinerjanya melalui tiga indikator kinerja pokok, yakni:

- ✦ Pembentukan 1.000 koperasi berkualitas, sampai dengan tahun 2017 terbentuk 758 koperasi berkualitas.
- ✦ Penumbuhan 5.000 Wira Usaha Baru sampai tahun 2017 telah tercipta sebanyak 4.427 Wira Usaha Baru
- ✦ Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syari'ah, sampai dengan tahun 2017 KSP Pola syari'ah yang telah terbentuk sebanyak 260 unit.

Selain itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM juga telah didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan konsultan pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, networking dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM. Jumlah KUMKM yang sudah difasilitasi sejak Januari sampai Desember 2017 sebanyak 624 UMKM dan 31 Koperasi serta 9 kampung UMKM digital, sedangkan jumlah KUMKM yang berkunjung langsung ke Kantor PLUT KUMKM sebanyak 147 orang.

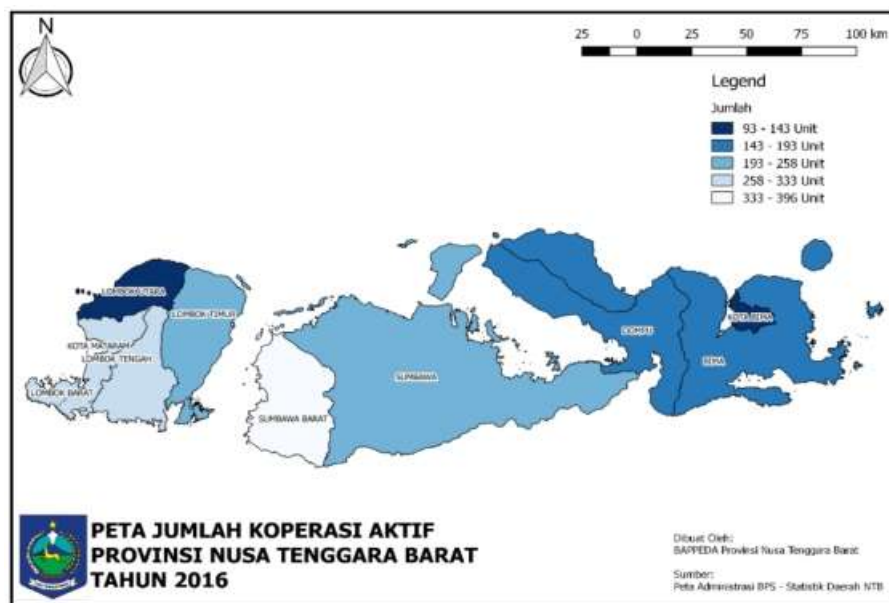
Pada Tahun 2017 telah diinisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dan telah mendapat respon positif dari Bapak Gubernur dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. BLUD KUMKM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan permodalan Koperasi dan UMKM.

Tabel 46 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi	3.728	3.851	3.966	4.077	4.187	4.157
2	Jumlah Koperasi Aktif	3.225	2.627	2.283	2.412	2.472	2.405
3	Persentase Koperasi Aktif	86,51	68,22	57,56	59,16	59,04	57,85

Sumber: Statistik Daerah Provinsi NTB (diolah)

Meskipun secara jumlah meningkat, namun persentase koperasi aktif terus menunjukkan penurunan, artinya makin banyak koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2012, persentase koperasi aktif sebesar 86,51% kemudian menurun hingga mencapai 57,85% pada tahun 2017.



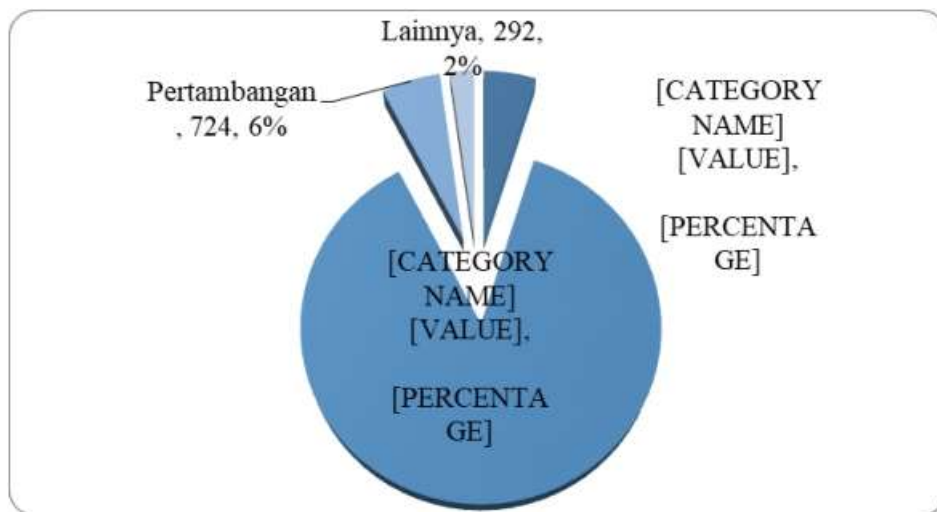
Gambar 25 Peta Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi NTB Tahun 2016
Sumber BPS Provinsi NTB

Setidaknya ada empat variable penyebab kemiskinan struktural; *pertama*, variable ketersediaan insentif dan disinsentif. *kedua*, variable distribusi asset produksi yang tidak merata. *Ketiga*, variable struktur ekonomi sosial masyarakat. *Keempat*, variable kebijakan fiskal dan moneter pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Pelaksanaan koperasi yang berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan memiliki tujuan utama yaitu menyejahterakan anggota. Sistem SHU, simpan pinjam dan konsep-konsep lainnya di dalam koperasi setidaknya bisa melawan empat variable penyebab kemiskinan diatas. Sehingga masyarakat yang menjadi anggota koperasi setidaknya lebih beruntung dengan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh koperasi sebagai upaya keluar dari jeratan kemiskinan.

b. Penanaman Modal

Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama dalam peningkatan investasi. Minat investasi di Provinsi NTB dalam rentang waktu 2013-2017 terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sebanyak 13.242 izin yang didominasi perizinan di sektor pertanian dan peternakan sebesar 87%. Jumlah izin per sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 26 Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan selama periode tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Perkembangan jumlah izin dan non izin berdasarkan bidang perizinan selama periode tahun 2013-2017, disajikan pada tabel berikut.

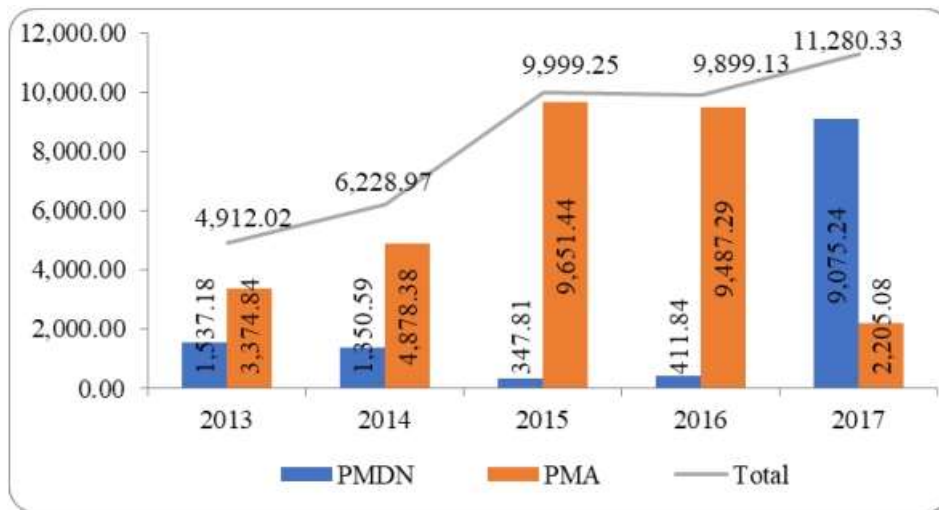
Tabel 47 Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2013 – 2017

No	Bidang Perizinan	Izin dan Non Izin					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Penanaman Modal	13	2	7	6	10	38
2	Perikanan Dan Kelautan	6	4	27	208	400	645
3	Pertanian dan Perternakan	395	1.437	3.426	3.449	2.836	11.543
4	Koperasi dan UMKM	0	1	6	7	2	16
5	Pekerjaan Umum	0	0	1	2	1	4
6	Kehutanan	5	4	24	64	19	116
7	Lingkungan Hidup dan Penelitian	2	2	10	13	25	52
8	Perindustrian	0	0	0	1	0	1
9	Perdagangan	0	0	0	1	2	3
10	Perkebunan	0	0	0	5	2	7
11	Perhubungan Komunikasi Dan Informatika	0	0	1	11	26	38
12	Pertambangan	5	0	197	209	313	724
13	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	2	8	12	22
14	Kesehatan	0	0	7	7	14	28
15	Pariwisata	0	0	3	0	2	5
Jumlah		426	1.450	3.711	3.991	3.664	13.242

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah tergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta, tapi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pelayanan investasi yang tercermin pada kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses perizinan investasi dilakukan. Pelayanan investasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu semakin baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai investasi selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Gambar 27 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 (Rp.Milyar)



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Perkembangan realisasi investasi berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 48 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

Tahun	Jenis Investasi (Rupiah)		Total (RUPIAH)
	PMDN	PMA	
2013	1.537.177.711.419	3.374.844.350.000	4.912.022.061.419
2014	1.350.586.547.701	4.878.381.520.000	6.228.968.067.701
2015	347.805.000.000	9.651.444.000.000	9.999.249.000.000
2016	411.835.602.836	9.487.292.016.600	9.899.127.619.436
2017	9.075.242.457.981	2.205.084.068.287	11.280.326.526.268
Jumlah	12.722.647.319.937	29.597.045.954.887	42.319.693.274.824

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB

Realisasi investasi di Provinsi NTB Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2013 realisasi investasi sebesar Rp. 4,91 Trilyun menjadi Rp. 6,23 Trilyun di Tahun 2014, dan terus meningkat sampai Tahun 2017 mencapai Rp. 11,28 Trilyun. Laju investasi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup tinggi, namun di Tahun 2016 laju investasi tumbuh sebesar 1 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh perekonomian global yang mengalami kontraksi sepanjang tahun 2016, tapi pada tahun 2017 laju investasi kembali mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 13,95 persen.

Terdapat sepuluh sektor yang cukup banyak diminati oleh Investor untuk berinvestasi di Provinsi NTB. Realisasi investasi menurut sektor berdasarkan jenis penanaman modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 49 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

No	Sektor	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pariwisata	136.137,14	347.186,42	149.700,55	-	284.646,06	917.670,18
2	Perhubungan/ Transportasi	1.331.073,52	326.902,30	35.000,00	36.000,00	-	1.728.975,82
3	Perdagangan	-	-	-	63.611,06	161.794,53	225.405,58
4	Pertanian	-	30.303,31	17.956,33	-	-	48.259,64
5	Perkebunan	-	172.503,14	103.852,91	177.181,61	-	453.537,67
6	Kehutanan	-	4.000,00	11.000,00	-	-	15.000,00
7	Perikanan	25.397,45	12.519,50	2.743,82	71.632,69	-	112.293,47
8	Pertambangan Energi Kelistrikan	22.521,70	72.051,90	3.017,69	50.590,01	8.258.850,02	8.407.031,32
9	Industri	1.663,38	322.966,84	6.356,41	11.213,65	125.292,50	467.492,77
10	Jasa Lainnya	20.384,52	62.153,13	18.177,29	1.606,58	244.659,34	346.980,87
	Jumlah	1.537.177,71	1.350.586,55	347.805,00	411.835,60	9.075.242,46	12.722.647,32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas, realisasi investasi PMDN menurut sektor tahun 2013-2017 mencapai Rp.12,7 Trilyun dengan investasi tertinggi di sektor pertambangan, energy & kelistrikan sebesar Rp. 8,4 Trilyun atau 66,08%, kemudian diikuti sektor perhubungan/transportasi mencapai Rp.1,73 Trilyun atau 13,59 persen, disusul sektor pariwisata sebesar Rp. 917,67 Milyar atau 7,21 persen, diikuti sektor industri sebesar Rp. 467,49 Milyar atau 3,67 persen dan investasi terendah berada pada sektor kehutanan sebesar Rp.15 milyar atau 0,12 persen.

Realisasi investasi PMA menurut sektor di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 mencapai Rp. 29,59 Trilyun, dengan realisasi investasi terbesar di sektor pertambangan, energy & kelistrikan sebesar Rp. 16,58 Trilyun atau 56,05%, diikuti sektor pariwisata mencapai Rp.7,49 Trilyun atau 25,34 persen, disusul sektor jasa lainnya mencapai Rp. 4,87 Trilyun atau 16,44 persen dan terendah sektor pertanian yang hanya sebesar Rp.3,19 atau 0,01 persen, sedangkan sektor perhubungan/transportasi dan kehutanan tidak mencatatkan investasi pada periode tahun 2013-2017. Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah, Provinsi NTB sebagai salah satu daerah agraris, ditengah berbagai tantangan pembangunan di sektor pertanian, perlu meningkatkan investasi disektor pertanian terutama industry pengolahan hasil-hasil pertanian. Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 50 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

No	Sektor	Realisasi Investasi PMA (Juta Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pariwisata	146.530,83	1.656.532,46	2.152.007,88	2.109.728,50	1.434.680,40	7.499.480,07
2	Perhubungan/ Transportasi	-	-	-	-	-	0
3	Perdagangan	2.858,00	18.568,77	20.481,46	9.049,86	37.916,89	88.874,99
4	Pertanian	-	-	-	3.188,01	-	3.188,01
5	Perkebunan	55.909,10	9.456,10	27.600,00	-	-	92.965,20
6	Kehutanan	-	-	-	-	-	0
7	Perikanan	9.552,04	25.000,00	14.567,23	173.244,36	63.017,19	285.380,83
8	Pertambangan Energi Kelistrikan	3.119.006,85	1.692.304,25	5.048.426,64	6.582.191,04	146.858,02	16.588.786,81
9	Industri	6.300,00	44.925,00	103.635,73	3.537,84	12.856,68	171.255,26
10	Jasa Lainnya	34.687,53	1.431.594,94	2.284.725,03	606.352,40	509.754,89	4.867.114,79
	Jumlah	3.374.844,35	4.878.381,52	9.651.444,00	9.487.292,02	2.205.084,07	29.597.045,95

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan lokasi, realisasi investasi PMDN di Provinsi NTB periode Tahun 2013-2017 tertinggi berada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp.6,96 Trilyun atau 54,75 persen, hal ini karena perubahan status investasi perusahaan tambang dari PMA menjadi PMDN sejak tahun 2017. Lokasi investasi terbesar berikutnya adalah Kabupaten Lombok Barat mencapai Rp.2,36 Trilyun atau 18,54 persen, diikuti Kota Mataram sebesar Rp.1,10 Trilyun atau 8,70 persen dan terendah di Kabupaten Bima sebesar Rp.31,95 Milyar atau 0,25 persen. Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 51 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2017

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kota Mataram	414.222,15	292.714,10	927,08	39.348,82	359.252,99	1.106.465,14
2	Lombok Utara	48.493,59	80.829,71	9.097,44	436,06	5.600,00	144.456,81
3	Lombok Barat	60.820,00	302.621,77	59.285,38	97.201,94	1.839.250,71	2.359.179,81
4	Lombok Tengah	276.148,10	154.559,57	151.830,03	111,77	3.991,20	586.640,67
5	Lombok Timur	207.111,08	6.478,10	-	1.342,00	798,03	215.729,21
6	Sumbawa Barat	207.111,08	-	1.498,42	66.592,91	6.688.619,56	6.963.821,96
7	Sumbawa	22.721,40	46.166,41	17.956,33	24.580,71	177.729,96	289.154,80
8	Dompu	138.074,05	465.953,25	105.964,91	177.181,61	-	887.173,83
9	Bima	24.402,21	1.263,64	1.245,40	5.039,79	-	31.951,03
10	Kota Bima	138.074,05	-	-	-	-	138.074,05
	Jumlah	1.537.177,71	1.350.586,55	347.805,00	411.835,60	9.075.242,46	12.722.647,32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Sedangkan Realisasi Investasi PMA periode Tahun 2013-2017 terbesar juga berada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp.16,92 Trilyun atau

mencapai 57,17 persen dari total investasi sebesar Rp.29,59 Trilyun. Hal ini dikarenakan investasi sampai Tahun 2016 di Perusahaan Tambang Batu Hijau masih dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Realisasi PMA terbesar selanjutnya berada di Kabupaten Lombok Barat dengan nilai sebesar Rp.3,93 Trilyun atau 13,28 persen, disusul Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp.3,84 Trilyun atau 12,99 persen. Investasi PMA terendah pada periode tahun 2013-2017 berada di Kota Bima yang hanya sebesar Rp.3,9 Juta. Perkembangan realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 52 Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2017

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi Investasi PMA (Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kota Mataram	58.159,00	411.619,75	106.207,15	495.188,14	383.881,48	1.455.055,51
2	Lombok Utara	82.616,40	741.006,10	1.583.893,76	813.970,82	622.281,09	3.843.768,17
3	Lombok Barat	79.462,80	967.929,56	1.602.899,67	555.104,73	723.950,69	3.929.347,45
4	Lombok Tengah	8.308,20	382.437,68	821.022,36	708.216,98	224.031,21	2.144.016,44
5	Lombok Timur	-	61,39	493.793,20	204.126,95	167.600,43	865.581,96
6	Sumbawa Barat	3.119.006,85	2.211.571,93	4.939.815,40	6.626.090,75	24.003,99	16.920.488,92
7	Sumbawa	27.291,10	158.568,17	3.878,39	9.748,21	49.386,98	248.872,85
8	Dompu	-	5.186,94	96.406,83	4.966,72	3.625,99	110.186,47
9	Bima	-	-	3.527,24	69.878,72	6.318,23	79.724,19
10	Kota Bima	-	-	-	-	3,99	3,99
	Jumlah	3.374.844,35	4.878.381,52	9.651.444,00	9.487.292,02	2.205.084,07	29.597.045,95

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Dalam rangka memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah melakukan pelayanan sesuai dengan standar perizinan. Perkembangan jenis perizinan dan waktu penyelesaiannya Tahun 2013-2017, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 53 Perkembangan Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan Tahun 2013 – 2017

NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU (HARI)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	3	3	3	3
2	Izin Usaha Penanaman Modal	7	7	6	6	3
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3	3	3	3	3
4	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	7	7	6	6	3
5	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3	3	5	5	3

NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU (HARI)				
		2013	2014	2015	2016	2017
6	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	7	7	5	5	3
7	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	10	10	7	7	3
8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	7	7	6	6	3

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan laju investasi adalah:

- ✦ Memperbaiki secara terus menerus sistem layanan perijinan serta mempermudah proses perijinan;
- ✦ Mengirim nota pengingat kepada perusahaan-perusahaan tentang kewajiban LKPM dan menjemput bola bagi perusahaan yang belum menyampaikan LKPM;
- ✦ Sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan langsung di tempat/lokasi;

Guna meningkatkan investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi para Investor antara lain melalui : Perijinan yang tidak dipungut biaya; mempermudah prosedur dan waktu pengurusan izin investasi; sinkronisasi dan harmonisasi mekanisme serta mempermudah prosedur yang sama dalam pemberian izin pelaksanaan investasi di masing-masing kabupaten/kota melalui Forum PTSP; dan memfasilitasi perusahaan yang bermasalah di lokasi kegiatan melalui Satgas Penanaman Modal.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diukur dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat. Nilai IKM tahun 2015 sebesar 79,14, meningkat di tahun 2016 menjadi 79,64 dan mencapai 80,98 ditahun 2017 yang seluruhnya masuk dengan kriteria BAIK dengan rentang nilai 62,51-81,25.

c. Perdagangan

Meningkatnya ragam produk yang ada di pasar domestik saat ini tidak lepas dari peranan perdagangan internasional yang semakin terbuka. Ketika berbagai regulasi yang sifatnya menghambat sepakat dikurangi, pasar semakin terbuka luas dan lalu lintas barang pun semakin tinggi. Dalam keterbukaan, suatu pihak dapat mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak diproduksinya.

Dalam keterbukaan pula, sumberdaya akan teralokasi pada sektor-sektor dimana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Di era modern dan era globalisasi ini sudah tidak ada negara yang mampu menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkan. Tidak setiap negara memiliki kesamaan dalam sumber alam yang diperlukan untuk industrinya. Hasil bumi yang dihasilkan juga beragam dari masing-masing negara sehingga harus berhubungan dengan luar negeri dalam memenuhi kebutuhan yang makin banyak. Berbagai situasi dan keadaan di atas, maka tampaknya perlu dibahas secara lebih mendalam mengenai peran perdagangan internasional bagi pembangunan bangsa.

Total ekspor Provinsi NTB secara kumulatif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai sebesar 2.611.932,995 ton dengan nilai US\$ 4.849.343.689,315, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 54 Perkembangan Ekspor Tahun 2013 – 2017

Tahun	Volume (Ton)	Nilai (Us\$)
2013	274.454,93	402.568.348,66
2014	190.182,92	307.601.681,16
2015	827.651,70	1.560.043.159,81
2016	785.694,63	1.581.791.827,98
2017	533.948,82	997.338.671,71
Jumlah	2.611.933,00	4.849.343.689,32

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2013-2017

Komoditi ekspor yang mendominasi perolehan devisa pada tahun 2013–2017, terdapat tiga komoditi yakni Konsentrat Tembaga, Mutiara, dan Kerajinan Buah Kering selalu menempati 5 besar komoditi ekspor NTB. Lima komoditi ekspor teratas setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 55 Perkembangan Jenis Komoditi yang Mendominasi Perolehan Devisa

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US \$ Ribu)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Konsentrat Tembaga	401.724,59	305.668,71	1.532.170,49	1.580.767,76	996.194,05
2	Mutiara	479,06	1.056,97	1.616,55	153,40	302,42
3	Kerajinan Buah Kering	-	193,90	215,17	218,98	226,19
4	Udang Vannamei	-	-	564,16	378,99	516,43
5	Gerabah	51,35	37,79	-	59,71	44,19
6	Kerajinan Kayu	2,17	-	-	-	-
7	Kerajinan Rotan	-	83,41	-	-	-
8	Jagung	-	-	24.860,24	-	-

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US \$ Ribu)				
		2013	2014	2015	2016	2017
9	Buah Kering	272,63	-	-	-	-
10	Komoditi Lainnya	38,56	560,91	616,54	2,99	55,49
	Total Ekspor	402.568,35	307.601,68	1.560.043,16	1.581.791,83	997.338,67

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2013-2017

Negara Tujuan ekspor Daerah NTB selama periode 2013-2017 tercatat Jepang, Korea Selatan, dan China secara konsisten selalu berada pada lima besar nilai ekspor terbesar. Lima negara dengan nilai ekspor terbesar selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 56 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor (US \$ Ribu)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jepang	188.457,62	163.813,05	665,72	760.931,80	331.324,67
Korea Selatan	131.019,12	107.728,62	390,27	260.788,53	147.004,76
China	636,12	34.636,48	58,23	78.07,03	-
Philipina	-	-	264,77	435.044,32	452.107,73
India	-	106,16	-	-	65.955,73
Jerman	81.694,75	-	-	-	-
Negara Lainnya	748,76	1.317,38	100,47	46.954,15	945,78
Total Ekspor	402.556,36	307.601,68	1.479,45	1.581.791,83	997.338,67

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2017

d. Perindustrian

Sektor industri masih memiliki peran strategis dalam perekonomian NTB. Hal ini terlihat dari kemajuan ekonomi kerakyatan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal dan mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya meningkatkan daya saing produk industri dengan menumbuhkan Industri Kecil Mengah (IKM), memfasilitasi sertifikasi halal dari MUI, bimbingan teknis desain produksi, fasilitasi pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain industri, merek, hak cipta), dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Perekembangan sentra industri formal NTB dari Tahun 2014-2017 sebesar 2,59 persen, sedangkan untuk industri non-formal memiliki perkembangan sebesar 2,19 persen. Pada tahun 2017, jumlah perusahaan

yang masuk ke dalam industri formal sebanyak 8,730 unit dan untuk industri non-formal sebanyak 72.113 unit. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 57 Perkembangan Industri NTB Tahun 2013-2017

No	JENIS	2013	2014	2015	2016	2017
A FORMAL						
1	Perusahaan (Unit)	11.688	7.337	7.897	8.425	8.730
2	Tenaga Kerja (Orang)	83.889	44.553	47.399	49.994	51.541
3	Nilai Investasi (Rp 000,-)	324.339.776	1.904.424.928	1.946.143.169	2.004.619.612	2.056.454.883
4	Nilai Produksi (Rp 000,-)	1.586.806.113	3.041.553.475	3.221.767.413	3.391.464.311	3.476.961.215
5	Nilai Bahan Baku/ Penolong (Rp 000,-)	750.945.015	1.434.843.752	1.527.844.467	1.593.964.930	1.633.424.893
B NON FORMAL						
1	Perusahaan (Unit)	73.995	73.741	74.800	74.894	72.113
2	Tenaga Kerja (Orang)	184.127	171.647	174.014	173.974	167.579
3	Nilai Investasi (Rp 000,-)	164.374.828	180.358.848	187.718.222	195.143.809	192.257.762
4	Nilai Produksi (Rp 000,-)	938.797.835	1.559.680.346	1.698.997.552	1.713.579.404	1.648.544.665
5	Nilai Bahan Baku/ Penolong (Rp 000,-)	465.525.832	839.780.706	902.970.266	912.902.093	919.937.816

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2013 - 2017

Bab V Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan

5.1. Acuan Analisis

Analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan berisi penjelasan tentang komposisi APBD berdasarkan Pendapatan dan Belanja. Lalu menjelaskan tentang sumber Pendapatan daerah sehingga dapat dijelaskan tentang bagaimana Derajat Otonomi Fiskal dan Kapasitas Fiskal daerah. Selanjutnya penjelasan tentang komposisi Belanja daerah untuk melihat apakah selama ini daerah telah membelanjakan anggaran sesuai dengan prioritas yang tepat sesuai dengan masalah pada setiap bidang. Setelah menjelaskan komposisi APBD, selanjutnya adalah melihat sejauh mana relevansi dan efektivitas APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah tersebut.

A. Strategi Pokok Penanggulangan Kemiskinan

Tinjauan kebijakan dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah berisi penjelasan tentang pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara nasional (per-klaster). Penjelasan dapat diberikan dalam bentuk pemetaan program penanggulangan kemiskinan di daerah berdasarkan klaster, berikut 13 program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan yakni :

1. Pengembangan BUMDES
2. Jamban Keluarga
3. Rumah Layak Huni (RTLH)
4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
5. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
6. Pengelolaan Bank Sampah
7. Pembangunan Sarana Air Bersih
8. Pengembangan Desa Wisata
9. Pengembangan Pertanian Konservasi
10. Sambungan Listrik Murah dan Hemat
11. Desa Berdaya Mandiri Pangan
12. Motorisasi nelayan/budidaya udang
13. Ketahanan keluarga berbasis Pendidikan, kesehatan dan Revitalisasi POSYANDU.

B. Prioritas Intervensi dan Wilayah

Mendasarkan prioritas intervensi wilayah maka lokus pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2017 diarahkan pada 10 kabupaten/kota yang tergolong tingkat kemiskinan tinggi dimana program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan target maupun sasaran penerima manfaat program melalui 7 program prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 58 Alokasi Belanja Dalam Mendorong Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Pada APBD Perubahan 2017.

No	Provinsi/Kab/Kota	Alokasi Anggaran							
		Pengembangan Bumdes	Jamban keluarga	RTLH	KUBE	KRPL	Pengelolaan sampah	Air Bersih	JUMLAH
	Target Se-NTB	480 DESA	3260 KK	20.000 UNIT	500 KUBE	400 KRPL	500 DESA	500 DESA	
	APBD PROV. NTB	3,300,000,000	1,700,000,000	52,989,000,000	2,000,000,000	1,575,000,000	1,750,000,000	7,700,000,000	71,014,000,000
1	KAB. BIMA	158,272,000	10,040,550,000	18,061,500,000	213,465,000	312,055,000	76,975,000	11,619,238,000	40,482,055,000
2	DOMPU	50,000,000	226,000,000	1,359,100,000	-	67,500,000	1,050,000,000	3,207,910,400	5,960,510,400
3	KAB. LOBAR	17,490,500	687,958,000	5,850,006,000	3,024,300,000	213,325,000	118,540,500	291,600,000	10,203,220,000
4	KAB. LOTIM	70,000,000	24,647,000,000	1,515,000,000	28,250,000	110,317,000	33,492,100	3,226,000,000	29,630,059,100
5	KAB. LOTENG	308,520,000	170,000,000	5,605,065,000	300,000,000	300,000,000	4,879,872,300	15,070,881,000	26,634,338,300
6	KAB. SUMBAWA	5,581,000,000	4,273,750,000	37,353,000,000	38,980,269,974	49,015,000	532,000,000	14,757,592,000	101,526,626,974
7	KOTA BIMA	-	2,463,299,999	57,614,750	83,360,000	148,565,000	766,779,000	19,599,250,000	23,118,868,749
8	KLU	3,222,400,000	5,135,325,000	1,245,000,000	702,912,000	-	470,000,000	919,350,000	11,694,987,000
9	KOTA MATARAM	-	3,617,000,000	8,561,000,000	250,000,000	191,684,500	197,100,000	9,582,140,000	22,398,924,500
10	KSB	2,300,000,000	28,283,725,000	9,650,980,000	10,000,000,000	720,000,000	834,681,700	7,461,960,000	59,251,346,700
	Jumlah	15,007,682,500	81,244,607,999	142,247,265,750	55,582,556,974	3,687,461,500	10,709,440,600	93,435,921,400	401,914,936,723

Tabel 59 Alokasi 13 Program Prioritas 2019

No	Program Prioritas	Target	Alokasi Dalam APBD 2019		Realisasi		Kesesuaian Dengan Desa Prioritas	
			Dana	Volume	Dana	Volume	Jumlah Desa Alokasi	Jumlah Desa Miskin
1	Pembangunan BUMDES	100 Desa	10.000.000.000				20 Desa	100 Desa
2	Jamban Keluarga	100%	2.000.000.000,00	8 Kabupaten Stunting (KSB dan Kota Mataram 100%)			8 Desa	100 Desa
3	Rumah Layak Huni							
4	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	47 Desa	2.300.000.000	47 Desa			-	100 Desa
5	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	54 KRPL	45.000.000	54 KRPL			38 Desa	100 Desa
6	Pengelolaan Sampah	74 Desa	1.110.000.000,00	74 Desa	224.489.000	49 Desa	5 Desa	100 Desa
7	Pembangunan Sarana Air Bersih	47 Desa	7.305.000.000,00	47 Desa	5.951.310.000,00	38 Desa	8 Desa	100 Desa
8	Pembangunan Desa Wisata	53 Desa	2.385.000.000	53 Desa				
9	Pembangunan Pertanian Konservasi	30 Koptan	200.000.000,00	30 Koptan	200.000.000,00	30 Koptan	2 Desa	100 Desa
10	Desa Berdaya	100 Desa	5.000.000.000					
11	Sambungan Listrik Murah Dan Hemat	100 Desa	1.687.500.000	950 RTS		950 RTS	8 Desa	100 Desa
12	Motorisasi Nelayan dan Budidaya Udang Vaname	85 Paket, 67 Unit, 10 Kelompok, 150 Buah, 67 Pcs	2.382.600.000	85 Paket, 67 Unit, 10 Kelompok, 150 Buah, 67 Pcs	1.095.800.000	19 Paket, 150 Buah, 15 Unit	5 Desa	100 Desa
13	Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan dan Revitalisasi Posyandu							

Tabel 60 Alokasi Belanja Dalam Mendorong Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Pada APBD Perubahan 2017.

Alokasi Anggaran		Jumlah Anggaran
Program dan Kegiatan penurunan angka kemiskinan		153.834.979.507,00
-	35 Program	
-	83 Kegiatan	
Program dan Kegiatan dari indikator pendukung penurunan angka kemiskinan		1.736.850.457.966,00
a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	18.876.451.050,00
b.	Pola Pangan Harapan	5.914.461.600,00
c.	Laju Investasi	67.846.473.489,00
d.	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13.800.213.750,00
e.	Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	559.089.547.140,00
f.	Ratio Elektrifikasi	10.206.810.650,00
g.	Cakupan Air Bersih	83.356.584.700,00
h.	Penanganan Rumah Tidak layak huni	167.077.684.429,00
i.	Cakupan Jamban Keluarga	4.528.724.000,00
j.	Rata-Rata Lama Sekolah	428.232.317.300,00
k.	Buta Huruf Penduduk Usia >15 th	4.173.296.251,00
l.	Usia Harapan Hidup	367.196.991.202,00
m.	Prevalensi Kurang Gizi	6.550.902.405,00
TOTAL		1.890.685.437.473,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran dana perubahan untuk bidang pendidikan mencapai Rp. 432.405.613.551,00 dengan subbidang Rata-Rata Lama Sekolah dan Buta Huruf Penduduk Usia >15 th, bidang kesehatan mencapai Rp. 387.548.107.357,00 dalam subbidang Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Prevalensi Kurang Gizi, dan Usia Harapan Hidup, bidang infrastruktur mencapai 824.259.350.919,00 dengan subbidang Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap, Ratio Elektrifikasi, Cakupan Air Bersih, Penanganan Rumah Tidak layak huni dan Cakupan Jamban Keluarga, bidang tenaga kerja mencapai 88.722.924.539,00 dalam subbidang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Investasi dan bidang pangan mencapai 5.914.461.600,00 yang mencakup Pola Pangan Harapan.

C. Rumah Tangga/Individu Sasaran

Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang

tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Strategi 4: Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti

ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

5.2. Analisis Struktur Pendapatan

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

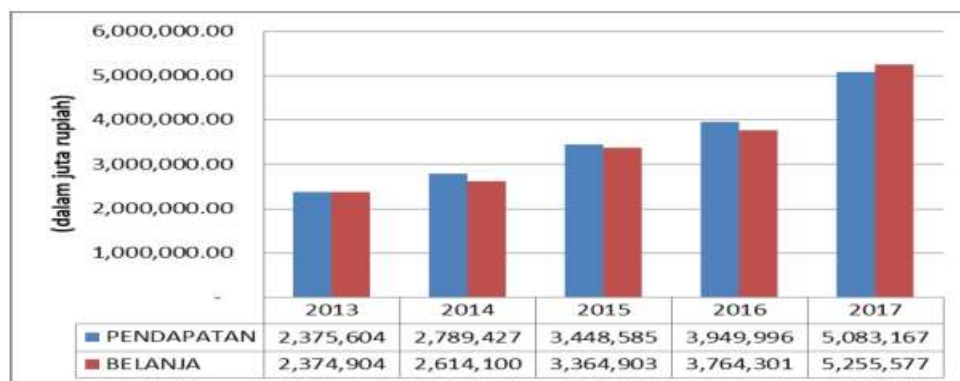
Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

APBD yang direncanakan setiap tahun pada dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang muncul

bila terjadi surplus atau defisit.

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar Rp. 2,375 triliun, mengalami peningkatan sebesar 17,42% menjadi Rp. 2,789 triliun pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, Pendapatan Daerah Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 23,63% atau menjadi Rp. 3,449 triliun dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 14,54% (Rp. 3,95 triliun). Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 28,69% atau menjadi Rp. 5,083 triliun).

Demikian juga dengan Belanja Daerah Provinsi NTB, trennya juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, Belanja Daerah Provinsi sebesar Rp. 2,374 triliun mengalami peningkatan menjadi Rp. 2,923 triliun (naik sebesar 10,07%) pada tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 3,365 triliun (naik sebesar 28,72%). Pada tahun 2016 naik sebesar 11,87% atau menjadi sebesar Rp. 3,764 triliun dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 39,62% atau menjadi sebesar Rp. 5,256 triliun. Pada grafik 5.1 di bawah ditunjukkan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2013 s.d. 2017.

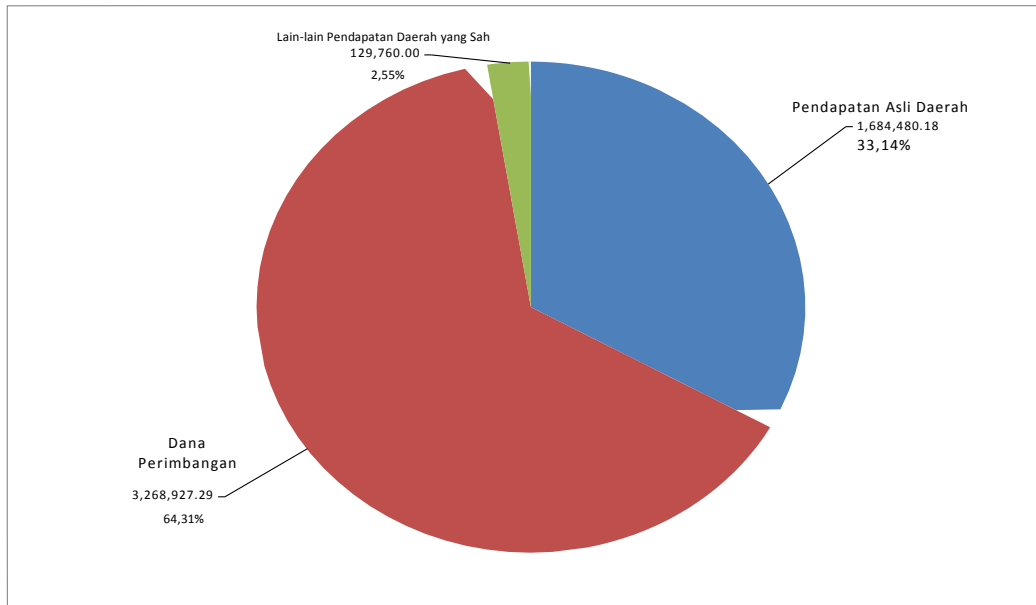


Gambar 28 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2013 s.d. 2017

Sumber Data: LKPK AMJ 2013 s.d. 2017

1. Pendapatan Daerah

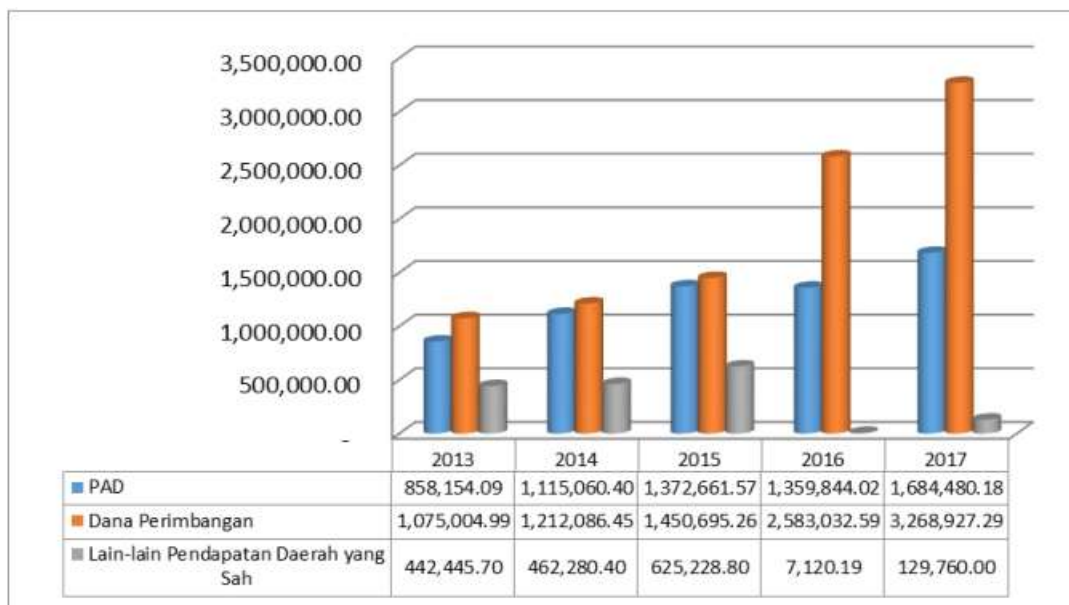
Komposisi Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi NTB terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Grafik 5.2 menunjukkan besarnya pendapatan dan persentase dari ketiga sumber Pendapatan pada APBD Provinsi NTB TA. 2017.



Gambar 29 Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 (Juta Rupiah)
Sumber Data: LKPK AMJ 2013 s.d. 2017

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 Dana Perimbangan mendominasi sumber Pendapatan Daerah Provinsi NTB yaitu sebesar 64,31% atau Rp. 3,27 triliun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 33,14% atau Rp. 1,68 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 2,55% atau Rp. 129,76 miliar.

Perkembangan komposisi setiap jenis Pendapatan Daerah pada tahun 2013-2017 trend-nya terlihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 30 Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013 s.d. 2017 (Juta Rupiah)
Sumber Data: LKPK AMJ 2013 s.d. 2017

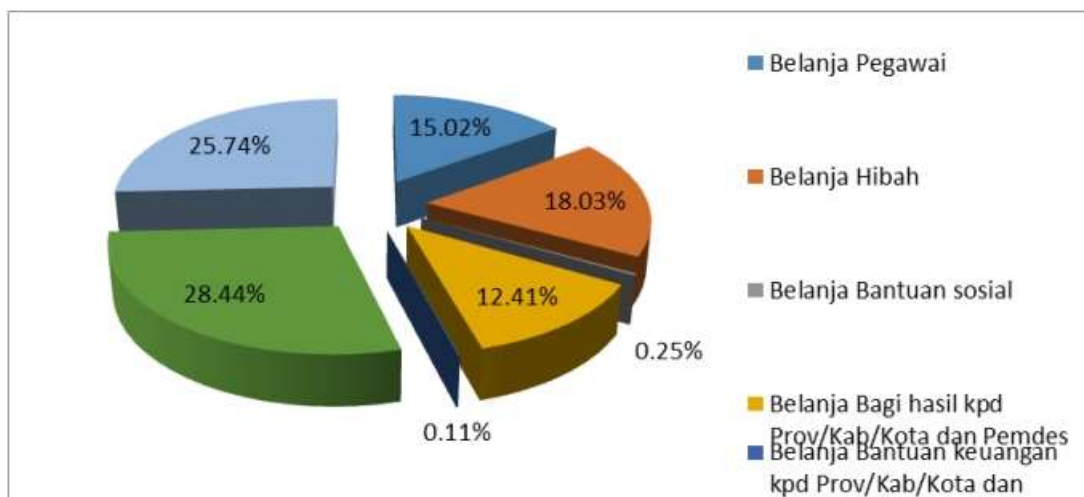
Dari grafik di atas terlihat bahwa Dana Perimbangan mendominasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB dari tahun 2013 s.d. 2017. Pada tahun 2013, Komposisi Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,08 triliun, tahun 2014 sebesar Rp. 1,21 triliun dan tahun 2015 sebesar Rp. 1,45 triliun. Tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 2,58 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp. 3,27 triliun.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB tahun 2013 s.d. 2017 cenderung mengalami tren yang fluktuatif. Tahun 2013 s.d. 2015 secara berturut-turut mengalami peningkatan dari Rp. 858,15 miliar tahun 2013 menjadi Rp. 1,12 triliun tahun 2014 dan 1,37 triliun tahun 2015. Akan tetapi, pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB mengalami penurunan menjadi Rp. 1,36 triliun. Mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi Rp. 1,68 triliun.

Demikian juga dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah cenderung mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2013 s.d. 2015 secara berturut-turut mengalami peningkatan dari Rp. 442,45 miliar tahun 2013 menjadi Rp. 462,68 tahun 2014 dan 625,23 miliar tahun 2015. Pada tahun 2014, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi Rp. 7,12 miliar. Dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi Rp. 129,76 miliar.

2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2017 mencapai Rp. 4,48 triliun dengan komposisi 5 besar didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar 28,44%, Belanja Modal sebesar 25,74%, Belanja Hibah sebesar 18,03%, Belanja Pegawai sebesar 15,02%, Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes sebesar 12,41%. Pada Grafik 5.4 di bawah ini digambarkan Komposisi Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2017.



Gambar 31 Komposisi Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2017
 Sumber Data: LKPK AMJ 2013 s.d. 2017

Tren Komposisi Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2013 s.d. 2017 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tabel 5.1 digambarkan perkembangan Komposisi Anggaran Belanja daerah Provinsi NTB tahun 2013 s.d. 2017.

Tabel 61 Perkembangan Komposisi Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTB
 Tahun 2013 s.d. 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Pegawai	585,415.94	597,483.04	630,162.22	641,725.11	672,841.40
Belanja Subsidi	197.77	248.50	-	-	-
Belanja Hibah	669,155.37	536,698.60	686,038.53	948,694.82	807,739.30
Belanja Bantuan social	55,886.88	25,477.06	30,622.90	32,734.21	11,313.28
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	215,435.74	454,803.32	435,441.05	462,284.30	556,232.89
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	67,066.84	38,517.99	12,762.28	13,234.65	4,871.05
Belanja tidak terduga	2,211.66	105.28	2,240.53	4,058.97	28.16
Belanja	365,547.77	543,439.39	677,203.97	888,701.89	1,274,412.

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Barang dan jasa					00
Belanja Modal	450,279.19	422,797.43	834,584.08	696,681.65	1,153,481.27
Total	2,411,197.16	2,619,570.61	3,309,055.55	3,688,115.59	4,480,919.35

Sumber Data: LKPK AMJ 2013 s.d. 2017

5.3. Analisis Pendapatan Daerah

1. Rasio Pajak (Tax Ratio)

Rasio pajak (tax ratio) di tingkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki. PDRB sangat erat kaitannya dengan potensi pajak daerah karena dapat menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut. PDRB yang akan digunakan dalam analisis ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan patokan harga pada setiap tahun. Nilai PDRB ini pada umumnya digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di suatu wilayah.

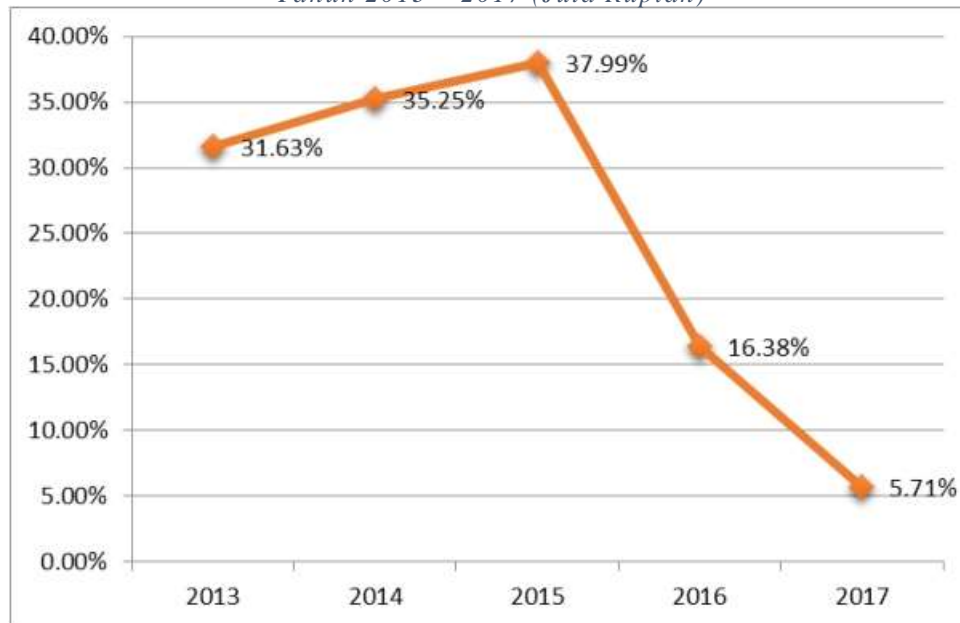
2. Ruang Fiskal (Fiscal Space)

Ruang fiskal (fiscal space) menunjukkan seberapa besar keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja. Perhitungan ruang fiskal daerah menggunakan rumus yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu keseluruhan Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah; Pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat; dan belanja yang sifatnya mengikat yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin (Belanja Pegawai). Idealnya porsi belanja rutin lebih kecil dari Belanja Modal. Memperbesar ruang fiskal daerah untuk Belanja Modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang

mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Selain itu, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di daerah juga terciptanya ruang fiskal.

Gambar 32 Perkembangan Ruang Fiskal Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah)



Sumber Data: LKPK AMJ 2013 s.d. 2017

Dari grafik di atas terlihat dengan jelas bahwa ruang fiskal Provinsi NTB dari tahun 2013 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2013 s.d. 2015 ruang fiskal Provinsi NTB mengalami peningkatan secara berturut-turut yaitu tahun 2013 sebesar 31,63%, naik menjadi 35,25% pada tahun 2014, dan naik menjadi 37,99% pada tahun 2015. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 ruang fiskal Provinsi NTB mengalami penurunan yang cukup tajam, karena pada tahun tersebut sumber pendapatan Provinsi NTB didominasi oleh Dana Perimbangan sebesar 65,39% pada tahun 2016 dan 64,31% pada tahun 2017 seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2013 s.d. 2017



Gambar 33 Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Tahun 2013 s.d. 2017

Sumber Data: LKPK AMJ 2013 s.d. 2017

Bab VI Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

6.1. Tinjauan Kebijakan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, bersifat multi dimensi dan merupakan tantangan besar dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. D upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk penduduk miskin itu sendiri, sehingga mereka mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan untuk hidup secara mandiri, layak dan bermartabat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 17.10% pada tahun 2015 menjadi 14.63% pada tahun 2018. Namun demikian, target penurunan angka kemiskinan masih menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi NTB. Target pengurangan angka kemiskinan pada tahun 2023 adalah 9.75%.

Mengingat arti pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan bagi perwujudan masyarakat yang sejahtera, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan kebijakan dan program sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 di dalamnya memuat visi pembangunan daerah yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju, dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 misi yaitu:

a. Terwujudnya masyarakat beriman, bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum, yang ditunjukkan oleh

1. Meningkatnya peranan lembaga pemerintah sebagai regulator yang diikuti dengan semakin menurunnya peranan sebagai pelaku kegiatan di masyarakat.

2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 3. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa, patriotik, dinamis dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
 4. Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang dinamis berkeadilan, aman, tertib dan harmonis.
 5. Makin mantapnya peranan budaya dalam pembangunan daerah.
- b. Terwujudnya masyarakat sejahtera, ditunjukkan oleh:**
1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita riil penduduk terus meningkat, tingkat pengangguran tidak lebih dari 5 persen dan angka kemiskinan di bawah 10 persen.
 2. Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.
 3. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari buta huruf, keterampilan lulusan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, rata-rata lama sekolah penduduk menjadi 12 tahun.
 4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari penyakit dasar, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup gizi kurang pada anak balita. Seluruh indikator kesehatan sama mendekati rata-rata nasional.
- c. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, ditandai oleh:**
1. Tingkat pembangunan yang semakin merata keseluruhan wilayah dan semua lapisan masyarakat. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Nusa Tenggara Barat.
 2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.

d. Terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah, ditandai oleh:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat di tandai dengan meningkatnya IPM serta tidak ada pertumbuhan penduduk karena kelahiran. Angka IPM Nusa Tenggara Barat harus sama/mendekati rata-rata nasional.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing.
3. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi yang dicirikan oleh terbentuknya hubungan antar desa satu sama lain di dalam dan keluar wilayah Nusa Tenggara Barat serta sentra-sentra produksi dengan pasar.
4. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang mampu mendukung dinamika ekonomi dan kehidupan masyarakat. Rasio elektrifikasi mencapai angka minimal 95 persen.
5. Meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan, ditunjukkan oleh:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam hayati untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah.
3. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi

lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

5. Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun geopark, Lombok as Eco Island (LECI) dan Sumbawa as Ecozone (SuEZ).

Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terlihat secara eksplisit pada visi pembangunan daerah jangka panjang tersebut yaitu dengan dicantumkan kata “sejahtera” sebagai cita-cita yang akan diwujudkan dalam pembangunan jangka panjang. Pengertian sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil), sosial dan spiritual atau telah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir batin, adil dan merata. Indikator yang digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Selain itu berbagai indikator yang akan dicapai antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan per-kapita pada tingkat yang lebih tinggi; terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kualitas pendidikan penduduk, kualitas kesehatan masyarakat, tersedianya jaringan infrastruktur perhubungan yang memadai, terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah, dan meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Selanjutnya apabila misi pembangunan dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan, termaksud dalam misi kedua yaitu “Terwujudnya masyarakat sejahtera”, melalui misi ini diharapkan mampu mewujudkan pengurangan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran, berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu, terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam hayati untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah. Implementasi misi kedua tersebut tentu didukung oleh misi-misi lainnya utamanya pada misi kesatu yaitu “Terwujudnya masyarakat beriman, bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum”, kemudian misi ketiga

“Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan” serta misi berikutnya yaitu misi keempat “Terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah” serta misi kelima “Terwujudnya pembangunan berkelanjutan”.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019

Memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat kurang mampu, tingginya tingkat ketimpangan dan tren penurunan tingkat kemiskinan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka target penurunan angka kemiskinan nasional pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 7% - 8%. Adapun arah kebijakan, strategi dan sasaran penanggulangan kemiskinan dirumuskan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan

- 1) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
- 2) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
- 3) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

b. Strategi

- 1) Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat kurang mampu terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial yang bersasaran.
- 2) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah terutama kerangka regulasi dan kebijakan sektor pertanian, perdagangan luar negeri, aturan logistik komoditas pangan, dan aturan monopoli.
- 3) Meningkatkan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu
- 4) Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu
- 5) Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu
- 6) Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan iklim investasi yang bersifat padat pekerja.

- 7) Meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap informasi lapangan pekerjaan, peningkatan pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja
- 8) Memperkuat konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.
- 9) Advokasi kepada penduduk kurang mampu tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutama penduduk kurang mampu dan rentan.

c. Sasaran

- 1) Meningkatnya investasi padat pekerja sehingga memperluas kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu (decent job);
- 2) Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
- 3) Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas;
- 5) Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia;
- 6) Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu

Selanjutnya berdasarkan RPJMN Tahun 2015 – 2019, dalam Buku III tentang Agenda Pembangunan Wilayah khususnya berkenaan dengan capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2010 hingga 2018 (September).

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023.

Pada kurun waktu pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023 merupakan RPJMD tahap ke 4, dimana RPJMD ini adalah untuk melanjutkan pelaksanaan RPJMD tahap ke 3 yang menitikberatkan pada pemantapan peningkatan produktifitas dan daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu dan teknologi. Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat, berakhir dan telah dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya. Sedangkan dalam RPJMD tahap ke 4 ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan sejalan kemajuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023 merupakan RPJMD yang dirancang dan akan dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pelaksanaan pemilihan umum secara serentak pertama di Indonesia. Dalam RPJMD ini terdapat visi pembangunan, yaitu **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang.”**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan sebagaimana tercermin dalam cita-cita yang ada dalam visi tersebut yakni kesejahteraan diwujudkan dalam pembangunan jangka panjang. Masyarakat sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terjaga dan lestari, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Nusa Tenggara Barat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling

pengertian dan tenggang rasa; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut ditempuh melalui 6 misi. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan telah dirumuskan secara khusus dalam misi ketiga yaitu: “Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas yang Memberi Nilai Tambah”. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berkaitan dengan misi ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga: Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas yang Memberi Nilai Tambah

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA, dll.) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	a. Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja	a. Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja
			b. Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		b. Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan	a. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja b. Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan
		c. Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata
		d. Peningkatan kuantitas dan kualitas atraksi pariwisata dalam rangkaian festival	Meningkatkan kualitas atraksi pariwisata
3	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	a. Pengkajian dan penerapan teknologi permesinan, teknologi pengolahan pangan, teknologi digital dan industri kreatif, serta teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan	a. Pengujian dan sertifikasi alat produksi b. Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis
		b. Peningkatan daya saing produk industri	a. Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			c. Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah
4	Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	a. Optimalisasi Koperasi dan KUKM serta industri kreatif	a. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan koperasi
			b. Memperbaiki akses yang menunjang ekonomi produktif termasuk akses modal usaha dan keuangan bagi rakyat
		b. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat	Mengembangkan BUMDes Potensial
		c. Peningkatan kesejahteraan petani	Mendorong petani memiliki penghasilan tambahan
		d. Revitalisasi desa miskin yang memiliki potensi menjadi desa wisata	Mendorong desa-desa miskin yang memiliki potensi sumber daya untuk menjadi desa wisata
		e. Pengembangan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal	a. Mengembangkan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal
		b. Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas serta partisipasi masyarakat Desa	
5	Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial dan kesehatan	Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	penduduk miskin		bagi masyarakat miskin
6	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	a. Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak	a. Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
			b. Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan
		b. Penyambungan listrik murah dan hemat	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik
		c. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman	a. Meningkatkan kualitas sanitasi
			b. Meningkatkan kualitas rumah layak huni
	c. Menurunkan luasan kawasan kumuh		
7	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Peningkatan distribusi dan kewaspadaan pangan	Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan

Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 terdapat berbagai program pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung misi ketiga ini, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
4. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
5. Pengawasan Ketenagakerjaan
6. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

7. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
8. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
9. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
10. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
11. Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
12. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
13. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
14. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
15. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
16. Peningkatan Kesejahteraan Petani
17. Pengembangan Destinasi Pariwisata
18. Pengelolaan Hutan
19. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
20. Peningkatan peran perempuan di pedesaan
21. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
22. Jaminan Sosial
23. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
24. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
25. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
26. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
27. Pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah
28. pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
29. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
30. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar
31. Pengembangan Perumahan
32. pengembangan Permukiman
33. Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)

Selanjutnya terkait dengan program prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan dari program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, terdapat 13 Program prioritas dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mendukung misi ketiga yang difokuskan pada:

- 1) Pengembangan Bumdes,

- 2) Jamban Keluarga,
- 3) Rumah Layah Huni,
- 4) Kelompok Usaha Bersama (KUBE),
- 5) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL),
- 6) Pengelolaan Sampah (Bank Sampah),
- 7) Pembangunan Sarana Air Bersih,
- 8) Pengembangan Desa Wisata,
- 9) Pengembangan Pertanian Konservasi,
- 10) Sambungan Listrik Murah dan Hemat,
- 11) Desa Berdaya,
- 12) Motorisasi nelayan /budidaya udang vaname,
- 13) Ketahanan keluarga berbasis Pendidikan, kesehatan dan Revitalisasi POSYANDU.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023. Untuk level organisasi perangkat daerah, RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai bentuk penyusunan rencana strategis perangkat daerah (PD). Momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini untuk mengintegrasikan perencanaan yang tertuang dalam dokumen SPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 kedalam RPJMD.

4. Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Millenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target tujuan global, TPB/SDGs lebih bertujuan menuntaskan seluruh target dari tujuan global.

Sustainable Development Goals (SDGs) terdiri dari tujuh belas tujuan dengan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan

- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan Berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10) Berkurangnya Kesenjangan
- 11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
- 13) Penanganan Perubahan Iklim
- 14) Ekosistem Lautan
- 15) Ekosistem Daratan
- 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Ringkasan status pencapaian target SDGs untuk Tujuan ke-1 Tanpa Kemiskinan, dapat dilihat pada tabel 58 berikut:

Tabel 63 Status Pencapaian Target SDGS untuk Tujuan Ke-1 Tanpa Kemiskinan

Indikator		Baseline 2017	Target SDGs					Sumber
			2019	2020	2021	2022	2023	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	14,75 (2018)	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75	BPS/Susenas, BDT
1.2.2*	Penduduk Miskin	737460 (2018)	640.118	593.564	547.010	500.456	453.902	BDT
Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Dinas Kesehatan bidang kesehatan (BPJS) / P BPJS	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPS

Indikator		Baseline 2017	Target SDGs					Sumber
1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan / PSJSN-K	68,83	77,67	82,18	85,99	89,29	92,21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas / PDMMR	5,7	6,8	7,4	8,0	8,6	9,2	Dinas Sosial Provinsi NTB
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat	165.362	360.201	396.221	435.844	479.429	527.372	Dinas Sosial Provinsi NTB
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat,								
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan/ P Salifaskes	85.72 (2016)	87,13	87,60	88,07	88,54	89,01	BPS/Susenas
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap / PIDL	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BKKBN / BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia)
1.4.1.(c)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BKKBN / BPS (Survei Demograf

Indikator		Baseline 2017	Target SDGs					Sumber
	Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin /CPR-SC							i dan Kesehatan Indonesia
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML	69.58 (2016)	75,61	76,87	77,95	78,90	79,75	BPS/Susenas
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/P LSL	58.31 (2016)	65,79	67,39	68,78	70,00	71,09	BPS/Susenas
1.4.1. (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan / P RTKP	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPS/Susenas
1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan /Laki-laki di SD/MI/ sederajat / APM SD	100,57 (2017)	100,22	100,39	100,54	100,67	100,78	BPS/Susenas
1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan /Laki-laki di	94,84 (2017)	102,81	102,41	102,96	103,36	103,60	BPS/Susenas

Indikator		Baseline 2017	Target SDGs					Sumber
	SMP/MTs/sederajat / APM SMP							
1.4.1. (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan /Laki-laki di SMA/MA/sederajat / APM SMA	106,99 (2017)	95,02	96,30	97,50	98,70	100	BPS/Susenas
1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran / PKAL	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPS/Susenas
1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN / PSPU	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPS/Susenas
Target 1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana								
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPBD Provinsi NTB
1.5.1. (e)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPBD Provinsi NTB
1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	PM	PM	PM	PM	PM	PM	DIBI/ JIUPAS NA
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan	2	1	-	-	-	-	BPBD Provinsi NTB

Indikator		Baseline 2017	Target SDGs					Sumber
	n risiko bencana (PRB)							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	1.045.554 (2018)	1.791.528	2.537.502	3.283.476	4.029.450	4.775.424	Bappeda Provinsi NTB

5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023

Dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2019-2023. Penyusunan SPKD berpedoman pada Perpres 15 tahun 2010, Inpres 1 tahun 2010 dan Inpres 3 tahun 2010 yang diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 20125 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018-2023. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) pada hakekatnya merupakan arah dan kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan hingga tahun 2023. SPKD ini disusun berdasarkan deskripsi masalah dan analisa kondisi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Beberapa isu dan permasalahan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat adalah:

- 1) Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan banyaknya jumlah penduduk miskin;
- 2) Tingginya jumlah pengangguran;
- 3) Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- 4) Belum meratanya pelayanan kesehatan dasar;
- 5) Belum berimbangnya kondisi layanan pendidikan dasar antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 6) Bencana alam;

- 7) Masih rendahnya realisasi penanaman modal;
- 8) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan;
- 9) Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;
- 10) Lemahnya partisipasi masyarakat miskin;
- 11) Besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup masyarakat miskin;
- 12) Masih rendahnya akses usaha kecil dan mikro terhadap permodalan usaha dan pasar ekspor;
- 13) Belum optimalnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah (*good governance*); dan
- 14) Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- 15) Program/kegiatan belum sinergis dan terintegrasi;
- 16) Belum sepenuhnya menggunakan satu basis data;
- 17) Banyaknya program/kegiatan yang sasarannya tidak tepat;
- 18) Masih adanya program/kegiatan yang belum sesuai dengan kebutuhan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- 19) Masalah terbatasnya pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; masih rendahnya pemahaman stakeholder pembangunan terkait program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang pro poor.
- 20) Belum optimalnya kegiatan pendampingan bagi kelompok sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.

Adapun kebijakan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, terukur, sinergis, berkesinambungan dan terencana, serta berkelanjutan yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama.

Tabel 64 Keterkaitan Permasalahan, Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat

No.	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program
1.	Menurunnya tingkat investasi	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA, dll.) untuk peningkatan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	a.Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja	a. Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		b.Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja		Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
		c.Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja	b. Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
		d.Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan	c. Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
		e. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
				Program Pengembangan Kemitraan
				Program Koordinasi Pemasaran Pariwisata

No.	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program
		f. Meningkatkan kualitas atraksi pariwisata	d. Peningkatan kuantitas dan kualitas atraksi pariwisata dalam rangkaian festival	Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata
3.	Kurangnya sarana industry kecil dan menengah	a. Pengujian dan sertifikasi alat produksi	a. Pengkajian dan penerapan teknologi permesinan, teknologi pengolahan pangan, teknologi digital dan industri kreatif, serta teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
b. Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			
c. Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan	b. Peningkatan daya saing produk industri	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM		Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah		
e. Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri		
4.	Menurunnya	a. Meningkatkan	a. Optimalisasi	Program

No.	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program
	tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat	kualitas kelembagaan dan pengembangan koperasi	Koperasi dan KUKM serta industri kreatif	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
b. Memperbaiki akses yang menunjang ekonomi produktif termasuk akses modal usaha dan keuangan bagi rakyat	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
c. Mengembangkan BUMDes Potensial	b. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		
d. Mendorong petani memiliki penghasilan tambahan	c. Peningkatan kesejahteraan petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
e. Mendorong desa-desa miskin yang memiliki potensi sumber daya untuk menjadi desa wisata	d. Revitalisasi desa miskin yang memiliki potensi menjadi desa wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
f. Mengembangkan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal	e. Pengembangan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Hutan - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 		
g. Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas serta partisipasi masyarakat Desa	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan		
		Program Peningkatan		

No.	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program
				Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5.	Kurangnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial dan kesehatan	Program Jaminan Sosial Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
6.	Belum terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	a. Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	a. Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak	Program Pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah
		b. Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (4)
		c. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik	b. Penyambungan listrik murah dan hemat	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
		d. Meningkatkan kualitas sanitasi	c. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman	Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar
		e. Meningkatkan		Program

No.	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program
		kualitas rumah layak huni		Pengembangan Perumahan
		f. Menurunkan luasan kawasan kumuh		Program pengembangan Permukiman
7.	Belum terpenuhinya pola ketahanan pangan dan konsumsi pangan	Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan	Peningkatan distribusi dan kewaspadaan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)

Pendekatan klaster juga dilaksanakan dalam penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi klaster 1 klaster 2, dan klaster 3. Pendekatan Klaster ini berupaya untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, memberikan akses untuk mengurangi kerentanan dan minimnya akses untuk meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat, dan terdapat program yang mendukung penanggulangan kemiskinan sebagaimana Perpres No. 15 Tahun 2010. Berikut penjelasan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk klaster :

- **KLASTER I, KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA**

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan

hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

Penerima Manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Jenis Program Klaster I



Tabel 65 Program OPD terkait JAMKESMAS

Perangkat Daerah	Program Unggulan
DINAS KESEHATAN	1. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Kegiatan : Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
	- JKN NTB
	-Jaminan persalinan (Ibu bersalin dan bayi dengan komplikasi yang belum mempunyai jaminan kesehatan baik dari JKN/PBI atau JKN NTB
	2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat
	-Pengadaan ambulans untuk yayasan dan pondok pesantren (8 Unit) -Pembangunan Poskestren (2 Unit)
Kegiatan : Pengendalian dan Penanganan Kesehatan	
-Pengadaan PKPR (Pelayanan kesehatan peduli remaja) Kit (10 unit)	

Perangkat Daerah	Program Unggulan
	<p>3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan : Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat -Pengadaan bahan dan obat gizi (berupa pemberian vitamin A)</p> <p>4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan : Peningkatan Penanggulangan Jamban Keluarga -Pemberian reward bagi desa, kecamatan dan kabupaten Basno -Pembangunan sarana MCK bagi kelompok masyarakat Kegiatan : Pengadaan bahan penanggulangan KLB -Pengadaan bahan penanggulangan KLB</p> <p>5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Masyarakat dan Generasi Muda Kegiatan : Pengembangan UKBM dan Generasi Muda -Pemberian insentif bagi kader Posyandu berprestasi</p>
BKMM	<p>1. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin -Pelayanan operasi katarak</p>
RSI MUTIARA SUKMA	<p>1. Program upaya kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan -Pelayanan pasien sosial tidak mampu, terlantar yang gangguan jiwa</p>
RSU PROVINSI	<p>1. Program upaya kesehatan masyarakat - Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</p> <p>2. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin -Pelayanan operasi bibir sumbing -Pelayanan sunatan masal</p>
RS MANAMBAI	<p>1. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin -Pelayanan penduduk miskin dan yankes dasar</p>
Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(1 Program, 10 Kegiatan)	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
	Pengembangan cadangan pangan daerah
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan
	Pengembangan lumbung pangan desa
	Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
	Pelatihan pangan lokal
	Pengembangan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
	Pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)
	Pengembangan pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL
	Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung diversifikasi pangan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	-Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non-islam setara SD dan SMP
	Program Pendidikan Menengah
	-Penyediaan beasiswa Tk. SMA/SMLB, SMK, S1, S2, dan S3
	1. Bantuan Sosial Kepada Sekolah Swasta Untuk Bantuan Siswa Miskin

- **KLASTER II, KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya

melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.

b. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

c. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.

d. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan

program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

a. Wilayah

Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.

b. Sektor

Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Penerima Manfaat kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

Jenis Program Klaster II



Tabel 66 Program OPD Terkait PNPM

OPD	URAIAN
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
	I. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	a. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
	b. Peningkatan kemampuan lembaga petani
	c. Pengembangan komoditas unggulan daerah
	d. Pelatihan penerapan PHP dan pengendalian OPT
	II. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	a. Penanganan pasca panen dan pengolahan

OPD	URAIAN
	hasil pertanian
	b. Pengembangan diversifikasi tanaman
	c. Pengelolaan lahan dan air
	d. Pengembangan perbenihan/perbibitan
	e. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
	III. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
	a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan
	b. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
	c. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) petugas/petani perkebunan
	IV. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	a. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
	b. Pemeliharaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan
	V. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
	a. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	I. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
	a. Penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
	b. Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	c. Belanja hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat
	- Pengadaan sampan wisata desa pototano kecamatan Tano - Kabupaten Sumbawa Barat (1 Paket)
	- Pengadaan speedboat "Kelompok Wisata Bahari" Desa Gili Indah Kec. Pemenang KLU (1 Paket)
	II. Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
	a. Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing
	b. Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	c. Belanja Hibah barang yang diserahkan

OPD	URAIAN
	kepada masyarakat
	- Bantuan Perahu untuk Kelompok Pengawas (DAK) (6 Unit)
	- Pembangunan Pos POKMASWAS di Kempo Kabupaten Dompu (1 Paket)
	- Bantuan Perlengkapan personil POKMASWAS 6 Kelompok (6 Unit)
	III. Program pengembangan budidaya perikanan
	a. Penguatan dan pengembangan perikanan budidaya
	Belanja Hibah Barang/Jasa
	Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	- Pengembangan sarana budidaya eucheuma Sp. (Kel. ingin Maju, Kel. Panggung Mas, Kel. Gili Anak Kewo & Kel. Gili Ujung Mas Desa Serewe Kec. Jerowaru Kabupaten Lombok Timur) (1 Paket)
	- Pengadaan sarana aklimitasi rumput laut Kultur Jaringan Eucheuma Sp. di Kabupaten Lombok Timur (1 Paket)
	- Pengadaan sarana budidaya udang vanamei (Kel. Sumber Makmur Dusun Ujung Gol Desa Sekaroh- Kec. Jerowaru Kab. Lotim) (1 Paket)
	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
	- Pengadaan Pakan dan Bibit ikan "Kelompok Kolam Pemancingan Lestari" Lingkungan Pejarakan Kelurahan Pejarakan Karya Kec. Ampenan-Kota Mataram (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Ketinting "Kelompok Nelayan MARANNU" Desa Labuhan lalar Kecamatan Taliwang- Kabupaten Sumbawa Barat (1 Paket)
	- Pengembangan Budidaya Lele Sistem Bio Flock " Kelompok Kube Beriok Maju " Dusun Beneng Desa Tampak Siring Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah (Ketua : Muslim) (1 Paket)
	- Pengembangan Budidaya Lele Sistem Bio Flock " Kelompok Kube Sejahtera " Dusun Bangket Dalem Desa Kediri Selatan (Ketua: Mariana) (1 Paket)
	- Rehab Kolam Ikan Rakyat "Kelompok Budidaya Ikan Keleta Gemilang " Brang Rea -KSB (1 Paket)
	- Pengadaan Bibit dan Pakan Ikan "

OPD	URAIAN
	Kelompok Fish Permai " Kelurahan Panji Sari Kec. Praya Kab. Lombok Tengah (1 Paket)
	- Pengadaan Sarana Budidaya Mutiara "Kelompok Mutiara Kaung" Desa Pulau Buer Kec. Buer Kab Sumbawa (1 Paket)
	- Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Laut "Kelompok Bahari Lestari" Desa Pulau Bugin Kec. Alas Kabupaten sumbawa (1 Paket)
	- Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Laut "Kelompok Taruna Mandiri" Desa Kaung Kec. Buer -Kabupaten sumbawa (1 Paket)
	- Pembuatan Kolam Ikan (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Pakan Ikan "Kelompok Tani Ikan Nyelak" Desa Lenek Pesiraman -Kab. Lotim (1 Paket)
	IV. Program pengembangan perikanan tangkap
	a. Penguatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan tangkap
	Belanja Hibah Barang/Jasa
	Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	Belanja Barang Yang diserahkan ke masyarakat Bidang Perikanan Tangkap
	- Pembangunan & Pemasangan Rumah Ikan di Perairan Teluk Bima Kelurahan Tanjung Kota Bima (1 Paket)
	- Pengadaan Perahu Motor Pendukung Rumah Ikan di Kelurahan Tanjung Kota Bima (1 Paket)
	- Pengadaan Inverter Bagi nelayan (20 Unit)
	- Pengadaan Mesin tempel untuk kelompok nelayan " Mandiri " di kec. Alas Barat-Kab. Sumbawa (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin tempel Lombok timur (1 Paket)
	- Bantuan sarana penangkapan ikan (Kelompok perikanan putri duyung) Kel. Dodu, Kec.Rasanae Timur Kota Bima (1 Paket)
	- Pengadaan mesin ketinting (Kelompok Nelayan Tangkap Lekok Bandung) Desa Jero Waru Kab. Lotim (1 Paket)
	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat
	- Pengadaan Mesin Ketinting " Kelompok Nelayan Maju Bersama" Desa Sumi Kec.

OPD	URAIAN
	Lambu Kab. Bima (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Ketinting " Kelompok Nelayan Langit Biru" Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Ketinting " Kelompok Nelayan Angin Selatan " Kelurahan Bina Baru Kota Bima (1 Paket)
	- Pengadaan Pukat' Kelompok Nelayan Pulau Harapan" Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima (1 Paket)
	- Pengadaan Pukat " Kelompok Nelayan Lestari " Desa Simpasai Kec. Lambu Kab. Bima (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Ketinting Kelompok Anugrah Laut Dusun Kertasari Desa Kerta Sari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Ketinting Kelompok Nelayan Cinta Laut, Dusun Labuhan Lalar Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Perahu, Kelompok Usaha Nelayan Bersatu, Dusun Batu Kijio Desa Sekotong Timur Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Tempel dan Alat Tangkap " Kelompok Nelayan Mule Jati " Dusun Gili Belek Desa Pare Mas Kec. Jerowaru Kab. Lotim (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Tempel dan Alat Tangkap " Kelompok Nelayan Patoh Angen" Dusun Gili Belek Desa Pare Mas Kec. Jerowaru Kab. Lotim (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Tempel dan Alat Tangkap " Kelompok Nelayan Pantai Selatan" Dusun Gili Belek Desa Pare Mas Kec. Jerowaru Kab. Lotim (1 Paket)
	- Pengadaan Mesin Tempel dan Alat Tangkap " Kelompok Nelayan Cahaya Pijar" Dusun Gili Belek Desa Pare Mas Kec. Jerowaru Kab. Lotim (1Paket)
	- Pengadaan Mesin Tempel dan Alat Tangkap " Kelompok Nelayan Ombak Biru" Dusun Gili Belek Desa Pare Mas Kec. Jerowaru Kab. Lotim (1 Paket)
	- Pengadaan mesin Ketinting Kelompok Nelayan GITHA BAHARI Desa Kaung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa (1 Paket)

OPD	URAIAN
	- Pengadaan Mesin Ketinting " Kelompok Nelayan Tanjung Menangis " Dusun Poton Bako Desa Jero Waru Lauk Kec. Jero waru Kab. Lombok Timur (1 Paket)
	- Pengadaan Alat Tangkap Ikan " Kelompok Nelayan Harapan Baru" Dusun Tanak Song Desa Jenggale Kec. Tanjung - KLU (1 Paket)
	- Pengadaan alat Tangkap " Kelompok Nelayan Embun Pagi" Lingkungan Bugis Kel Bintaro Kecamatan Ampenan-Kota Mataram (1 Paket)
	- Pengadaan alat Tangkap " Kelompok Nelayan Garuda Laut" Lingkungan Bintaro Kel Bintaro Kecamatan Ampenan-Kota Mataram (1 Paket)
	V. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
	a. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	Belanja Hibah Barang/Jasa
	Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	Bantuan ke masyarakat
	- Bantuan Sarana Pengolahan di Kabupaten Bima untuk klp Annullah (Bandeng Presto) dan Klp bandeng Bima (Abon Bandeng) (2 Paket)
	- Bedah UPI (1 Paket)
	- Dukungan sarana pemasaran di sentra kuliner Ikan Segar di Nipah Kab. Lombok Utara (1 Paket)
	- Bantuan Sarana Pemasaran Ikan di Gili Matra (1 Paket)
	- Pengadaan Genset " Kelompok Usaha Mada Oi, Desa Simpasai Kab. Bima (1 Paket)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
(3 program, 5 kegiatan)	I. Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan
	a. Pembangunan Sarana dan prasarana pembibitan ternak
	b. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Ternak
	c. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak
	II. Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan
	a. Pembinaan dan pengolahan pemasaran

OPD	URAIAN
	hasil peternakan
	III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
	a. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
DINAS SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL	
	I. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
	a. Pengembangan pemanfaatan bidang ketenagalistrikan
	II. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
	a. Penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	I. Program Pengembangan Perumahan
	a. Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
	II. Program Pengembangan Permukiman
	a. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
	b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman masyarakat miskin

- **KLASTER III, KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMBERDAYAAN BERBASIS USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL**

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:

- a. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro

Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/ perbankan yang dijamin Oleh Pemerintah.

b. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar

Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.

c. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha

Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.

Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

Penerima Manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi

Jenis Program Klaster III



Tabel 67 Program ODP terkait KUR

OPD	URAIAN
DINAS KOPERASI UKM	
	I. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	a. Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis
	II. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

OPD	URAIAN
	a. Pengembangan Klaster Bisnis
	b. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
	c. Penyelenggaraan Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
	III. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	a. Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
	b. Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi
Dinas Perdagangan	
	I. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
	a. Penguatan Desain tas berbasis tenun dan batik sasambo
	II. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
	a. Isu-isu Perdagangan Internasional
	III. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	a. Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri
	b. Penguatan Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Import
	c. Pengembangan Kluster Produk Ekspor
	d. INATRADE
	e. Penguatan Regulasi Perdagangan Luar Negeri
	f. Penguatan Bagi UKM/Calon UKM yang Berorientasi/Berpotensi Ekspor/Eksporthir se-NTB
	IV. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	a. Pengembangan Pasar Lelang Daerah
	b. Peningkatan Pemahaman Perdagangan Dalam Negeri
	c. Operasi Pasar Rakyat
	V. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
	a. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

KLASTER IV, PROGRAM PRO RAKYAT LAINNYA

Program ini ditujukan menjadi program pro rakyat lainnya yang disasar lebih khusus lagi seperti kelompok miskin kita, nelayan dan sebagainya.

Jenis program ini yakni (1) Rumah Sangat Murah, (2) Program Air Bersih, (3) Program Listrik Murah Dan Hemat, (4) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, (5) Program Kendaraan Angkutan Umum Murah Serta (6) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

A. PEMETAAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah di berbagai tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) telah menetapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari 4 (empat) kelompok program atau kluster, yaitu :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berbagai program dalam rangka penanggulangan kemiskinan dimaksud dilaksanakan dalam berbagai bentuk sebagai berikut :

PROGRAM PUSAT :

1. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

BLSM merupakan salah satu bentuk kompensasi kepada rumah tangga miskin dan rentan akibat kenaikan harga BBM pada tahun 2013. BLSM bukanlah merupakan program jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, melainkan merupakan jalan keluar jangka pendek guna

menghindarkan penurunan daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan, pengurangan konsumsi makanan yang bergizi, penjualan aset rumah tangga, meningkatnya jumlah pekerja anak dan kegiatan lain yang bersifat merugikan. BLSM dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005 dan 2008.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Program ini bertujuan mengurangi beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

3. Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Program BSM merupakan bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari jenjang pendidikan dasar ke menengah atas. Sekolah yang disasar melalui program ini adalah sekolah yang bernaung di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, yaitu Sekolah Dasar (SD/MI); Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs); dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Program BSM dimulai sejak tahun 2008 secara umum bertujuan untuk : 1) Menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk terus bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses ke pelayanan pendidikan yang lebih baik; 2) Mengurangi angka putus sekolah dan menarik anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan untuk kembali bersekolah; serta mendukung penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun bahkan hingga tingkat Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan program BSM adalah untuk melengkapi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dirancang untuk meringankan beban siswa/peserta didik dari kewajiban untuk membayar biaya operasional sekolah seperti SPP.

4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Program Jamkesmas diiniasi oleh Pemerintah sejak tahun 2005 dengan misi meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jaminan atas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan pembiayaannya sepenuhnya bersumber dari dana APBN dengan sasaran utama terbatas pada masyarakat miskin dan rentan.

5. Program Beras Miskin (Raskin).

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras bersubsidi. Pada awalnya program dilaksanakan dalam bentuk Operasi Pasar Khusus (OPK) sebagai bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan sejak tahun 1998. Program Raskin selain sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan mekanisme perlindungan sosial, program ini juga bertujuan untuk: 1) Stabilisasi harga di pasar; 2) Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi dan menjaga stok pangan nasional; 3) Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi) maupun ekonomi (harga jual terjangkau) kepada RTS; 4) Menyediakan pasar bagi hasil usaha tani padi; dan 5) membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan tunai bersyarat bagi rumah tangga/keluarga sangat miskin, yaitu persyaratan untuk memenuhi kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan. PKH bertujuan mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek dilakukan melalui pemberian bantuan tunai yang dibayarkan empat kali setahun. Pengurangan kemiskinan jangka panjang untuk mewujudkan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan anak sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. PKH diujicobakan pada tahun 2007 dan pada tahun 2011 PKH menjadi sebuah program nasional.

7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Dalam rangka kesinambungan dan penajaman prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional melalui 3 (tiga) fokus utama program penanggulangan kemiskinan, yaitu : 1) Berbasis keluarga; 2) Berbasis pemberdayaan masyarakat; dan 3)

berbasis pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Adapun kebijakan program yang masuk dalam kelompok pemberdayaan masyarakat antara lain berupa :

- 1) PNPM Perkotaan PNPM Mandiri Perkotaan atau Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri. Program ini bertujuan :
 - Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat mampu memperkuat aspirasi/ suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya;
 - Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak- pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat;
 - Mengedepankan peran Pemerinatah Kota / Kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.
- 2) PNPM Perdesaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. PNPM Perdesaan dilaksanakan merupakan keberlanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998.
- 3) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) PISEW adalah program yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Adapun tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan

kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (*local governance*) dan penguatan institusi di perdesaan.

- 4) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Program P2DTK adalah penanggulangan kemiskinan dengan sasaran daerah tertinggal dan daerah khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) untuk meningkatkan kapasitas sosial ekonomi daerah melalui pendekatan pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi di daerah- daerah tertinggal dan khusus.
- 5) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) PUAP merupakan program Kementerian Pertanian bagi petani di perdesaan dengan tujuan: a) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah; b) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani; c) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan d). Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.
- 6) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) PNPM Mandiri-KP adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir atau masyarakat nelayan pada sektor kelautan dan perikanan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang mencari nafkah di bidang kelautan dan perikanan (warga yang tinggal di wilayah pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan).
- 7) PNPM Mandiri Pariwisata PNPM Mandiri Pariwisata adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berupaya membantu masyarakat miskin yang tinggal di sekitar wilayah destinasi

pariwisata. Desa-desa miskin yang menjadi sasaran PNPM-Mandiri Pariwisata adalah desa-desa yang memiliki potensi pengembangan kegiatan kepariwisataan, dekat dengan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW), maupun fasilitas pendukung pariwisata. Tujuan dari program ini adalah untuk :

- 1) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui konsep simplifikasi perizinan dan insentif perpajakan bagi investor.
 - 2) Mendorong pertumbuhan daya tarik wisata unggulan di setiap provinsi (*one province one primary tourism destination*) bersama-sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
 - 3) Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata.
 - 4) Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan).
 - 5) Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata).
 - 6) Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar.
 - 7) Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui: (a) terbangunnya komitmen nasional agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan, perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat memfasilitasi berkembangnya kepariwisataan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki destinasi pariwisata unggulan; (b) harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan baik di tingkat pusat, daerah dan antara pusat dan daerah; (c) menformulasi, menerapkan, dan mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan.
- h. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). PLPBK merupakan kelanjutan dari transformasi sosial dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Beberapa prinsip dasar yang digunakan di P2KP seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi, diterapkan pula dalam

pelaksanaan PLPBK. Pembangunan manusia menjadi fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan yang dicerminkan melalui pembangunan bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (SEL). Intervensi kegiatan PLPBK difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan permukiman miskin di perkotaan melalui pendekatan Tridaya secara komprehensif dan terpadu. Lingkungan permukiman tersebut ditata kembali menjadi lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan SEL menjadi media belajar bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli/pemangku kepentingan dalam memperkuat kemandirian pengelolaan lingkungan permukiman ditingkat kelurahan.

8) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR merupakan program yang memuat skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). Tujuan program KUR adalah untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan.
- c. Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

PROGRAM DAERAH

1. Pembiayaan Jamkesda adalah merupakan program yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala pembiayaan bagi masyarakat miskin, dimana program ini dilaksanakan dengan sistem sharing pembiayaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana tujuan dari dilaksanakannya program jamkesda ini adalah :
 - a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan PPK (penyedia pelayanan kesehatan) Jamkesda (Puskesmas serta jaringannya, dan rumah sakit).
 - b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan, sehingga terkendali mutu dan biayanya
 - c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel)
 - d. Meningkatkan jumlah peserta (masyarakat tidak mampu) yang dicakup agar mendapat pelayanan kesehatan di jaringan PPK Jamkesda
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
2. Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana program ini dilaksanakan dengan cara sharing pendanaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan dari dilaksanakannya PBI ini adalah untuk mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu.
3. Bantuan Operasional Sekolah (Bosda) adalah merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dimana program ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat kurang mampu untuk penyediaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Program ini bertujuan mengurangi beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, di dalam menempuh pendidikan dalam kaitan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional sekolah yang di alokasikan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan sharing pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin.

4. Bea Siswa Miskin (BSM) merupakan program bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari jenjang pendidikan dasar ke menengah atas. Sekolah yang disasar melalui program ini adalah sekolah yang bernaung di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, yaitu Sekolah Dasar (SD/MI); Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs); dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Program BSM dimulai sejak tahun 2008 secara umum bertujuan untuk : 1) Menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk terus bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses ke pelayanan pendidikan yang lebih baik; 2) Mengurangi angka putus sekolah dan menarik anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan untuk kembali bersekolah; serta mendukung penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun bahkan hingga tingkat Perguruan Tinggi. Pelaksanaan program BSM adalah untuk melengkapi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dirancang untuk meringankan beban siswa/peserta didik dari kewajiban untuk membayar biaya operasional sekolah seperti SPP.
5. Peningkatan Kesejahteraan Petani merupakan program yang dilaksanakan dalam Upaya untuk menuju pada peningkatan kesejahteraan petani. secara operasional akan dilakukan melalui pemberdayaan penyuluhan, pendampingan, penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan proteksi dan promosi. Beberapa upaya tersebut memang relatif sangat diperlukan namun faktor kendala tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cermat hingga di tingkat daerah, mengingat sebagian besar petani di NTB untuk komoditas beras masih tergolong petani subsisten dalam artian berperan sebagai produsen sekaligus konsumen beras. Dengan demikian maka jumlah beras yang dijual ke pasar akan sangat bergantung pada surplus konsumsi rumah tangga dan harga beras serta harga barang lain yang diperlukan petani dari industri lain. Dalam hal ini jika kesejahteraan petani dapat ditingkatkan maka akan berdampak pula pada kesejahteraan dan peningkatan gizi masyarakat menengah ke bawah khususnya keluarga petani yang hanya mengandalkan hasil pertanian sebagai pendapatan utama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

6. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) merupakan program yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengembangan model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (dusun, desa, kecamatan dst) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat.

Disamping program yang telah dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di NTB, ada 13 program prioritas yang telah direkomendasikan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, baik yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 7 Program prioritas maupun yang direncanakan pada tahun 2019 sebanyak 6 program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan BUMDes adalah merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat di perdesaan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki serta aset yang dimiliki desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi perdesaan, maka diperlukan sebuah lembaga ekonomi perdesaan yang mampu mengelola sumber daya ekonomi perdesaan dan mampu mencari peluang pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi perdesaan yang keberadaannya dipedesaan, dimana tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi perdesaan.
 - c. Meningkatkan permodalan BUMDes untuk mengembangkan unit-unit usaha BUMDes.
 - d. Meningkatkan peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi perdesaan.

2. Jamban keluarga adalah merupakan program untuk merubah pola hidup sehat masyarakat terutama agar masyarakat jangan buang air besar pada sembarangan tempat (*open defecation*)
3. Rumah layak huni merupakan program stimulan untuk meningkatkan prakarsa masyarakat miskin dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah, dimana program ini bertujuan untuk:
 - a. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.
 - b. Mewujudkan sarana tempat tinggal yang layak, sehat dan nyaman.
 - c. Untuk mewujudkan salah satu program strategis penanganan rumah layak huni sebanyak 5.000 unit rumah dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018.
 - d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan swadaya berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB.
4. Kelompok Usaha Bersama (KUBe) merupakan program untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan cara pemberian bantuan modal usaha untuk pengelolaan usaha ekonomi produktif, dimana tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah untuk mewujudkan:
 - a. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok;
 - b. Peningkatan pendapatan;
 - c. Pengembangan usaha;
 - d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUBE dengan masyarakat sekitar.
5. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan program dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dengan adanya anjuran pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal pekarangan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan, dalam memperbaiki gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu Pemerintah telah

menganjurkan agar memanfaatkan setiap jengkal tanah termasuk lahan tidur, galengan, maupun tanah kosong yang tidak produktif.

6. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah) merupakan program pemerintah daerah dimana program ini adalah untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang dilakukan melalui Bank Sampah Berbasis Masyarakat melalui usaha daur ulang sampah, dimana program ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah langsung dari sumbernya;
 - b. Membangun Bank Sampah di 50 desa miskin.
 - c. Menumbuhkan usaha lokal kreatif berbasis pengelolaan sampah.
 - d. Meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha pengelolaan sampah
7. Pengembangan Sarana Air Bersih adalah merupakan program untuk memenuhi kebutuhan air bersih/air minum bagi masyarakat pada daerah-daerah yang mempunyai sumber air potensial, dimana program pengembangan sarana air bersih ini bertujuan untuk:
 - a. Membangun prasarana dan sarana penyediaan air bersih/air minum bagi masyarakat;
 - b. Mendukung program pemerintah untuk akses 100% air minum;
 - c. Mewujudkan target cakupan air bersih sebesar 87,56% dan 81,87% untuk kawasan perkotaan dan perdesaan, sesuai dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 - 2018;
 - d. Meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat.
8. Pengembangan Desa Wisata merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada program pengembangan kemitraan pariwisata dimana kegiatan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam upaya untuk menurunkan pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di perdesaan.
9. Pengembangan Pertanian Konservasi merupakan teknik baru yang dilaksanakan di lahan kering. Pertanian konservasi ini adalah untuk membantu para petani dan lahan pertanian mereka guna beradaptasi pada perubahan cuaca ekstrem, dimana pengembangan pertanian konservasi dilaksanakan dalam upaya agar lahan pertanian yang kurang dimanfaatkan pada saat musim kering bermanfaat sehingga dari pemanfaat lahan tersebut dapat meningkatkan produksi dan

meningkatkan pendapatan petani, sehingga mampu untuk pengentasan kemiskinan.

10. Sambungan Listrik Murah merupakan suatu program yang dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya memberikan fasilitas penyambungan listrik bagi masyarakat prasejahtera, dimana dengan dilaksanakannya program ini agar dapat menopang kegiatan ekonomi rumah tangga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Desa Berdaya merupakan program yang dilaksanakan dipedesaan. program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal di desa, dimana program tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan dilakukan sebagai bentuk percepatan pengentasan kemiskinan di pedesaan.
12. Motorisasi nelayan/budidaya udang vaname merupakan program yang dilaksanakan di daerah pesisir dan sudah tentu memiliki lahan yang sedikit relative kecil. Program ini dilaksanakan pada halaman rumah dengan menggunakan teknik bioplok yang bisa dilakukan sambil pada saat tidak melaut sehingga dapat menambah penghasilan apabila cuaca sedang tidak bersahabat.
13. Ketahanan keluarga berbasis pendidikan, kesehatan dan revitalisasi Posyandu.

6.2. Tinjauan Kelembagaan

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan yang diperankan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 740-255 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembentukan TKPKD tersebut berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan Fungsi TKPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi, dengan fungsi:

- pengoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
- pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
- pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
- pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan

b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi, dengan fungsi:

- pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan

- penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

3. Pendukung Tim Koordinasi

Dukungan kelembagaan untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dilaksanakan dengan membentuk:

- a. Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan administrasi.
- b. Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - Pokja Pendataan dan Sistem Informasi, bertugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi.
 - Pokja Pengembangan Kemitraan, bertugas mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - Pokja Pengaduan Masyarakat, bertugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.
- c. Tim Koordinator Program (Pokgram) terdiri dari:
 - Pokgram Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
 - Pokgram Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 - Pokgram Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
 - Pokgram Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial.
 - Masing-masing Pokgram bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai pibidangnya.

4. Kinerja TKPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat Semenjak dibentuk, TKPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan tugas utamanya berkenaan dengan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat, namun demikian pelaksanaan tugas tersebut dirasakan belum optimal. Kondisi dan permasalahan berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan yang mengkait pula keberadaan TKPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memerlukan perhatian untuk penanganan ke depan antara lain:

- a. Belum adanya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara

Barat dalam mewujudkan database warga miskin yang dimutakhirkan, terarah, terpadu sesuai kondisi, profil, potensi dan kebutuhan keluarga miskin.

- b. Belum terbangunnya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan database warga miskin yang dimutakhirkan, terarah dan terpadu dalam rangka penyusunan strategi dan percepatan program penanggulangan kemiskinan.
- c. Belum terbangun koordinasi teknis TKPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan serta pengembangan database sistem informasi kemiskinan yang dimutakhirkan, terpadu dan terkoneksi dengan SKPD.
- d. Belum terbangun kesepakatan antar masing-masing SKPD Provinsi dalam menentukan kriteria kemiskinan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dalam APBD.
- e. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum memiliki sistem informasi terpadu yang memadai untuk mengelola informasi anggaran dan realisasi keuangan seluruh program penanggulangan kemiskinan.
- f. Belum optimalnya kinerja TKPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan data dan informasi kemiskinan.
- g. Penetapan alokasi anggaran belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan pemenuhan target penurunan angka kemiskinan.
- h. Program dan kegiatan yang dikoordinasikan TKPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya didesain untuk penanggulangan kemiskinan.

Bab VII Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah

6.1. Isu Strategis Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Perumusan isu strategis yang dilakukan untuk setiap bidang yang menjadi prioritas masalah kemiskinan di Provinsi NTB yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, dan ketahanan pangan. Hal ini sesuai hasil analisis profil kemiskinan dan determinan masalah kemiskinan daerah. Isu strategis percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dianalisis berdasarkan pendekatan ekonomi, pendekatan wilayah, dan pendekatan bidang intervensi penanggulangan kemiskinan terhadap kondisi eksisting penduduk miskin yang menjadi sasaran/target program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Isu strategis percepatan penanggulangan kemiskinan, secara spesifik, dianalisis berdasarkan laku pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat berkontribusi langsung pada penurunan angka kemiskinan. Penggunaan parameter kemiskinan bersifat dinamis dan berdampak pada metode perhitungan, variabel, dan parameter kemiskinan. Kebijakan penetapan parameter kemiskinan oleh Pemerintah Pusat berdampak pada pemerintah daerah. Parameter pendapatan yang bersifat fluktuatif akan dikonversi menjadi nilai kebutuhan kalori per bulan yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan masyarakat di daerah. Kontroversi lainnya adalah berkaitan dengan agregat expenditure and income per kapita yang juga terkait dengan fluktuasi mata uang, inflasi, dan kegiatan makro ekonomi daerah. Isu lainnya adalah angka pengangguran terdidik yang dikaitkan dengan terciptanya lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB perlu mengupayakan perubahan pola kebijakan pembangunan daerah yang menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan daerah. Indikator keberhasilan pembangunan adalah pada peningkatan kesejahteraan terjadi secara agregat terutama pada penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran secara integratif.

Berdasarkan pendekatan wilayah, isu strategis untuk percepatan penanggulangan kemiskinan secara spesifik perlu dilakukan analisis kewilayahan terkait lokasi kegiatan ekonomi lokal yang menjadi pendorong utama dan pendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini juga didasarkan pada ketersediaan sumber daya lokal di masing-masing wilayah yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah. Sumber daya lokal ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia dan ketersediaan teknologi dan

inovasi daerah dalam menghasilkan produk-produk unggulan daerah memiliki nilai ekonomis tinggi.

6.2. Rencana Aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah merupakan bentuk intervensi Pemerintah Provinsi NTB dalam mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan para pihak untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB. Rencana aksi ini memuat rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023, sesuai rincian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam penanggulangan kemiskinan. Dukungan anggaran pada masing-masing OPD juga diperlukan untuk menjamin terselenggaranya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rencana aksi ini berfokus pada upaya nyata untuk mengurangi beban penduduk miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan membutuhkan komitmen pemimpin daerah untuk mengawal perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, keterpaduan kebijakan dan program antar klaster, dukungan lembaga non-pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Inovasi dan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan pada 4 klaster utama yaitu:

- a. Klaster I – Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
- b. Klaster II – Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
- c. Klaster III - Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
- d. Klaster IV - Kelompok program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.

Selain sistem klaster, kriteria penanggulangan kemiskinan dapat dikalsifikasikan pada 5 bidang utama yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan

3. Bidang Infrastruktur

4. Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

5. Bidang Ketahanan Pangan

Total kebutuhan anggaran per bidang pada penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Tabel 70 indikator kerja, kondisi kerja awal RPJMD, target capaian dan kondisi kinerja akhir RPJMD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambahan Bijih Logam	%	7,1	3,08	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0	6,5 - 7,0
2	Inflasi		3,7	3,16	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
3	Angka Kemiskinan	%	15,05	14,63	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75	9,75
4	Gini Ratio		0,378	0,372	0,367	0,366	0,365	0,362	0,360	0,360
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,58	67,3	68,07	68,84	69,61	70,38	71,15	71,15
6	Indeks Kebahagiaan		70,7	-	-	71,9	-	-	73,1	73,1
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
7	Indeks Kriminalitas		18,05	17,25	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25
8	Indeks Kebermanfaatn Infrastruktur		-	74,60	75,76	77,14	78,56	79,84	81,17	81,17
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56,99	57,03	57,53	58,03	58,53	59,03	59,53	59,53
10	Ketaatan Terhadap RTRW	%	-	87,51	87,79	88,45	89,03	89,69	90,31	90,31
11	Indeks Risiko Bencana		177,50	177,50	172,18	167,01	162,00	157,14	152,43	152,43
12	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB
13	Indeks Pelayanan Publik		97,58	97,68	97,78	97,87	97,97	98,07	98,17	98,17
14	Indeks Demokrasi		76,04	-	76,37	76,7	77,03	77,36	77,69	77,69
C	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	Pendidikan									
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79	13,79
16	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	6,96	6,98	7,01	7,04	7,07	7,07
1.02	Kesehatan									
17	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	73,00	75,00	77,00	80,00	83,00	83,00
18	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	72,62	75,72	78,81	81,91	85,00	85,00
19	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,55	66,07	66,2	66,43	66,65	66,82	66,82
20	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	32,49	31,49	30,49	29,49	28,49	28,49
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
21	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	-	10,00	50,00	100,00				100,00
22	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	84,65	86,65	88,65	89,65	90,65	90,65
23	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	74,08	75,74	77,55	79,52	81,66	81,66

Perhitungan total kebutuhan diperoleh dari rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2018-2023 yang tercantum dalam 6 Misi NTB yakni:

Tabel 71 MISI 1 NTB Tangguh dan Mantap melalui penuatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator sasaran IKK	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana	Indeks risiko bencana	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan keterentanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	172,18	167,01	162,00	157,14	152,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pulihnya infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa (100%)	50	100	-	-	-	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
Terwujudnya penmbangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Usaha	Indeks kebermanfaatan pembangunan dan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	75,76	77,14	78,56	79,84	81,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas transportasi publik	76,7	78,64	80,58	82,52	84,47	Dinas Perhubungan

Tabel 72 MISI 2 NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator sasaran IKK	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019 B WTP	2020 B WTP	2021 B WTP	2022 BB WTP	2023 BB WTP	
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat
			Nilai SAKIP	B	BB	BB	A	A	Badan Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan
			Indeks Profesionalisme ASN	0,65	0,67	0,7	0,73	0,75	Biro Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi
		Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Persentase Kerjasama Daerah	100	100	100	100	100	Biro Administrasi Kerjasama
			Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	10,43	11,35	11,42	11,49	11,56	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,47	0,49	0,52	0,54	0,57
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100		100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator sasaran IKK	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019 B	2020 B	2021 B	2022 BB	2023 BB	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	97,87	97,87	97,97	98,07	98,17	Daerah Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Dinas Pembardayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Statistik, Inspektorat Biro Organisasi, Biro Humas dan Protokol, Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP

Tabel 73 MISI 3 NTB Sehat dan Cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			68,07	68,84	69,61	70,38	71,15	
	Indeks Kebahagiaan			-	71,9	-	-	73,1	
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	13,57 6,96	13,62 6,98	13,68 7,01	13,73 7,04	13,79 7,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	65,96	66,16	66,36	66,56	66,77	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, RSJ Mutiara Sukma
		Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting (%)	32,49	31,49	30,49	29,49	28,49	Dinas Kesehatan, DP3AP2KB

Tabel 74 MISI 4 NTB Asri dan Lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	57,09	57,19	57,29	57,39	57,49	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan
			Indeks Kualitas Udara	22,75	25,25	27,75	30,25	32,75	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	88,45	88,53	89,01	89,09	89,17	
					60,03	60,13	60,23	60,33	60,43
			Neraca pengelolaan sampah (%)	60	75	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Geosite yang tertata	-	12,5	25	37,5	50	Dinas Pariwisata

Tabel 75 MISI 5 NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata, dan industriisasi

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Biji Logam			4,5-5,0	5,0-5,5	5,5-6,0	6,0,-6,5	6,5-7,0	
		Meningkatnya Inventaris kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Inventaris (Rp. Miliar)	16,000	16,800	17,640	18,522	19,448	DPMPTSP
	Pertumbuhan Industri	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,39	3,26	3,21	3,19	3,17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan	Pertumbuhan Industri	3,20	4,04	5,26	6,70	8,40	Dinas Perindustrian, Dinas Pemuda dan Olahraga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Inflasi	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp. 000)	3,0-4,0 9,956	3,0-4,0 9,996	3,0-4,0 10,036	3,0-4,0 10,076	3,0-4,0 10,116	Dinas Perdagangan
	Gini Ratio	Menurunnya Tingkat Kesenjangan	Gini Ratio	0,367	0,366	0,365	0,362	0,360	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
		ekonomi Masyarakat							Menengah, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Angka Kemiskinan			13,75	12,75	11,75	10,75	9,75	
		Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cangkupan Jaminan Kesehatan Nasional	73	75	77	80	83	Dinas Kesehatan
			Cangkupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
		Terpenuhnya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	74,08	75,74	77,55	79,52	81,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	72,62	75,72	78,81	81,91	85,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan
			Rasio Elektrifikasi	94,46	95,09	95,72	96,35	97,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan Meningkatnya produksi Sektor Primer	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	92,37	92,74	93,1	93,46	93,82	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78,80	79,60	80,60	81,80	83,30	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan,	820.307.23	825.043.71	829.328.38	833.239.98	836.838.30	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
			dan kehutanan (Rp. Juta)						Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Mostem Tourism	Angka Kunjungan Wisatawan	4.000.000	4.400.000	4.650.000	4.850.000	5.200.000	Dinas Pariwisata

Tabel 76 MISI 6 NTB Aman dan Berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas			16,45	15,65	14,85	14,05	13,25	
	Indeks Demokrasi			76,37	76,70	77,03	77,36	77,69	
		Menambahkan Nilai Sosial Budaya,	Indeks Kriminalitas	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25	Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Capaian					OPD Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
		Torelansi Masyarakat, dan Iklim Demorasi							Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelenggaraan Produk Hukum Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Biro Hukum
				91,08	91,45	91,81	92,18	92,55	
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,43	60,67	60,91	61,16	61,4	DP3AP2KB

Bab VIII Sistem Monitoring dan Evaluasi

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB memerlukan sistem monitoring dan evaluasi guna menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah memantau kemajuan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama dampak, manfaat, dan sasaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Secara spesifik, sistem monitoring dan evaluasi juga bertujuan:

- a. untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- b. untuk mengukur keluaran/hasil, manfaat/maksud dan atau dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan.
- c. untuk umpan balik dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB.

Sistem monitoring dan evaluasi bermanfaat untuk mengetahui output dan outcome dari berbagai upaya program/kegiatan yang sedang dan telah berjalan terkait penanggulangan kemiskinan. Disamping itu, monitoring dan evaluasi juga bermanfaat sebagai pembelajaran bersama antara pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif.

Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pelaku atau pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Provinsi NTB, Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan Masyarakat. Penguatan kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangna kemiskinan memerlukan upaya sebagai berikut:

- a. membangun keterpaduan dan sinergisitas dalam system monitoring dan evaluasi yang memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi secara regular dan terpilar.
- c. mengembangkan standarisasi indikator, variabel, dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

- d. memperluas kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengakses data dan informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
- e. melaksanakan survey dan kunjungan lapangan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- f. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagai respon terhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi.

Peran lembaga resmi penyedia data capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di daerah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dan BPS pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB memerlukan beberapa upaya penguatan kapasitas sebagai berikut:

- a. melakukan penyempurnaan metodologi pengumpulan data kemiskinan sesuai dengan pendekatan hak-hak dasar.
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi baru yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dengan tingkat kedalaman dan cakupan lebih luas.
- c. menyajikan indikator, variabel, dan data statistik secara regular dan terpilah menurut laki-laki dan perempuan untuk mengetahui kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar.
- d. meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penyusunan keusioner, pengumpulan, penyajian, dan pelaporan data dan informasi terkait kemiskinan daerah.
- e. meningkatkan penyebaran data dan informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui berbagai media.

Terkait evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, waktu pelaksanaannya dapat diklasifikasikan pada saat evaluasi pra-program, evaluasi pada saat program penanggulangan kemiskinan berjalan, evaluasi akhir, dan evaluasi dampak. Evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersifat berkelanjutan agar capaian setiap tahapan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pelibatan para pihak dalam sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB bertujuan untuk mendorong pembagian peran dan meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Peran para pihak dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 77 Pembagian peran para pihak dalam evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah

No.	Lembaga	Pembagian peran
1.	Tim Pengarah (TKPKD Provinsi NTB)	Bertanggung jawab dalam operasional pelaksanaan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah
2.	Pokja Pengaduan Masyarakat, TKPKD Provinsi NTB	<ul style="list-style-type: none"> • menyiapkan rencana pelaksanaan evaluasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah • menyusun kerangka evaluasi • memantau aktifitas evaluasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah • melaksanakan lokakarya, FGD, dan pertemuan evaluasi • menginformasikan kemajuan hasil evaluasi • menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi
3.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB yang menangani program penanggulangan kemiskinan secara langsung	<ul style="list-style-type: none"> • menyiapkan rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan rincian tugas dan fungsi OPD • menyusun laporan berkala hasil evaluasi internal OPD untuk bahan masukan TKPKD Provinsi NTB • menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah
4.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • bersedia diwawancarai/survey untuk masukan hasil pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan • memperoleh informasi tentang kemajuan hasil evaluasi
5.	Komunitas/penggiat penanggulangan kemiskinan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • bersedia diwawancarai/survey untuk masukan hasil pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan
6.	Akademik/Perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • membantu menyiapkan rencana pelaksanaan evaluasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah • membantu menyusun kerangka evaluasi • mengkaji/meneliti dampak program penanggulangan kemiskinan • merekomendasikan hasil-hasil penelitian penanggulangan kemiskinan untuk perbaikan kebijakan pemerintah daerah
7.	Pemerintah Kabupaten/Kota (TKPKD Kabupaten/Kota)	<ul style="list-style-type: none"> • berkoordinasi dan bekerjasama dengan TKPKD Provinsi NTB untuk menyusun rencana sistem monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah

No.	Lembaga	Pembagian peran
		<ul style="list-style-type: none"> • memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi • memberikan masukan tentang hal-hal penting yang perlu dilaksanakan untuk evaluasi penanggulangan kemiskinan
8.	Media massa	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan siaran pers yang mendidik dan mendorong perubahan mindset/perilaku dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah • memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan pelaporan secara rutin • bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintahan untuk kampanye penanggulangan kemiskinan daerah

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB disusun sesuai dengan matrik indikator kinerja monitoring dan evaluasi SPKD Provinsi NTB sebagai berikut:

Tabel 78 Matrik indikator kinerja monitoring dan evaluasi SPKD Provinsi NTB

No	Uraian Tujuan dan Target	Indikator	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
1.	Bidang Pendidikan			
	Tujuan: Memenuhi hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender			
	Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) siswa SD/MI/Paket A laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin	1. APK siswa SD/MI/Paket A laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin	Susenas (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. APM siswa SD/MI/Paket A laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin	Susenas (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Bidang Kesehatan			
	Tujuan: Memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender.			
	1. Menurunnya angka kematian bayi dan balita 2. Meningkatnya jumlah anak yang	1. Angka Kematian Bayi (IMR)	Susenas (BPS)	Dinas Kesehatan
		2. Angka Kematian Balita (Under 5 Mortality Rate)	Susenas (BPS)	Dinas Kesehatan
		3. Angka cakupan	Susenas	Dinas

No	Uraian Tujuan dan Target	Indikator	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
	diimunisasi campak sebelum usia satu tahun Menurunnya angka kematian ibu Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	imunisasi berdasarkan Universal Child Immunization (UCI) 1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	(BPS) Susenas (BPS) Susenas (BPS)	Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
	1. Menurunnya angka prevalensi HIV/AIDS 2. Menurunnya angka kesakitan malaria	1. Angka prevalensi HIV/AIDS Susenas, 2. Angka kesakitan malaria 3. Angka deteksi kasus TBC 4. Angka Pengobatan DOTS	Susenas (BPS) Susenas (BPS) Susenas (BPS) Susenas (BPS)	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
3.	Bidang Infrastruktur Dasar			
	Tujuan: Memenuhi hak masyarakat miskin atas tempat tinggal atau perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat.			
	Dihormatinya hak-hak masyarakat miskin untuk mengusahakan tempat tinggal yang layak	1. Persentase rumah tangga miskin berdasarkan status kepemilikan tempat tinggal	Susenas, Podes (BPS)	Dinas Perumahan dan Permukiman
		2. Persentase keluarga yang tinggal di bantaran sungai	Susenas, Podes (BPS)	Dinas Perumahan dan Permukiman
		3. Persentase keluarga yang bertempat tinggal di permukiman kumuh	Susenas, Podes (BPS)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Terjaminnya kepastian masyarakat miskin untuk menempati tempat tinggalnya	Status tanah dan bangunan tempat tinggal rumahtangga miskin	Susenas, Podes (BPS), BPN/ATR	
	Berkembangnya sistem penyediaan	1. Jumlah rumah murah layak dan sehat yang	Susenas, Podes (BPS)	Dinas Perumahan

No	Uraian Tujuan dan Target	Indikator	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
	perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin	dibangun		dan Permukiman
		2. Adanya skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin	Susenas, Podes (BPS)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	<p>Tujuan: Meningkatkan akses masyarakat miskin atas air bersih dan aman, serta sanitasi dasar yang baik.</p>			
	Meningkatnya persentase keluarga miskin yang memiliki akses terhadap air yang bersih dan aman	1. Persentase keluarga miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan aman	Susenas, Podes (BPS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
		2. Rumah tangga yang memiliki akses air minum	Susenas, Podes (BPS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
	Menurunnya persentase penduduk tanpa akses terhadap sarana sanitasi dasar yang aman	1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar yang aman	Susenas, Podes (BPS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
		2. Jumlah desa/kelurahan yang sebagian besar penduduknya memiliki sarana sanitasi dasar yang aman	Susenas, Podes (BPS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
4.	Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan			
	<p>Tujuan: Memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan yang layak dan kesempatan berusaha, serta pengembangan usaha tanpa diskriminasi gender.</p>			
	Berkurangnya angka pengangguran terbuka	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (L/P)	Susenas (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2. Pengangguran Terbuka (L/P)	Susenas (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3. Angka Setengah Pengangguran Terbuka	Susenas (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Uraian Tujuan dan Target	Indikator	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
		4. Jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri secara legal	Susenas (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5. Angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK	Susenas (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya perlindungan kerja bagi masyarakat miskin, khususnya perempuan dan anak	1. Jumlah dan persentase pekerja di bawah umur (L/P)	Susenas (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2. Rasio upah/gaji pekerja perempuan dan laki-laki berdasarkan tingkat pendidikan	Susenas (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3. Tingkat kekerasan 175SPKD terhadap perempuan dan anak di tempat kerja	Susenas (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Berkembangnya usaha Mikro, Kecil dan Koperasi	1. Jumlah usaha Koperasi, Mikro dan Kecil.	Statistik Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		2. Rata-rata nilai aset usaha Koperasi, Mikro dan Kecil	Statistik Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
5.	Bidang Ketahanan Pangan			
	Tujuan: Memenuhi kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau serta meningkatkan status gizi masyarakat miskin (ibu, bayi, dan anak balita)			
	Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kecukupan konsumsi pangan	1. Persentase penduduk dibawah garis kecukupan konsumsi pangan 2100 kalori/kapita/hari	Susenas (BPS)	Dinas Ketahanan Pangan
		2. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan makanan (setara 2100 Kilo Kalori/kapita/hari)		Dinas Ketahanan Pangan
		3. Persentase anak balita dengan status gizi kurang		Dinas Kesehatan

Kunjungan lapangan diperlukan selama pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Metode sampling diperlukan untuk jumlah lokasi kerja program yang banyak dengan jumlah

anggota tim pemantau, waktu dan anggaran yang terbatas. Penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk miskin, jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan, sasaran penerima manfaat, kondisi keparahan wilayah penanggulangan kemiskinan, capaian program/kegiatan, dan aspirasi serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dianalisis oleh TKPKD Provinsi NTB yang meliputi laporan rutin OPD pelaksana kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, pendataan oleh BPS, penelitian dan kajian kemiskinan daerah yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya, pemberitaan media massa, hasil koordinasi dengan TKPKD Kabupaten/Kota se-NTB, dan laporan kelompok masyarakat. Tim TKPKD menyiapkan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Laporan hasil monitoring dan evaluasi juga memuat rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah untuk ditindaklanjuti.

Bab IX Penutup

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah terkait organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini penting dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan target penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kunci keberhasilan percepatan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Provinsi NTB adalah dukungan pemimpin lokal baik formal dan informal dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, rencana program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan lokasi, serta tata kelola penanggulangan kemiskinan yang perlu terus ditingkatkan di masa mendatang.

Dokumen SPKD Provinsi NTB Tahun 2018-2023 merupakan upaya sistematis dalam jangka pendek dan jangka menengah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sesuai dengan perkembangan lingkungan, potensi wilayah, karakteristik, dan sosial budaya masyarakat. Dokumen SPKD ini diharapkan dapat mempercepat capaian target penanggulangan kemiskinan dari 14.75% pada tahun 2018 menjadi 9.75% pada tahun 2023. Untuk itu, kerjasama dan kerja cerdas semua pihak yang terlibat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk mencapai target 9.75% pada tahun 2023.